

WAJIDI

GLOSARIUM SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN

Periode 1900 - 1950

**Sambutan oleh
Gubernur Kalimantan Selatan**

GLOSARIUM
SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN
Periode 1900-1950

WAJIDI

GLOSARIUM
SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN
Periode 1900-1950

Debut Press

**GLOSARIUM
SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN
Periode 1900-1950**

© WAJIDI

**Penyunting: Nor'anida Fiteraniah, M.Pd
Desain Cover: Sulis**

Penerbit:

**Debut Press
Jl. Sisingamangaraja 23 Yogyakarta 55153
e-mail: debutpress@yahoo.com**

**ISBN 978-979-96468-37-X
Cetakan Pertama, 2008
Cetakan Kedua, Juli 2011**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wajidi

Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan: Periode 1900-1950/Wajidi —Yogyakarta: Debut Press, 2008

.....hlm, 14 x 21 cm

ISBN 978-979-96468-37-X

**1. Kalimantan Selatan — Glosarium Sejarah
I. Judul II. Wajidi**

959.844

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan, Periode 1900-1950* dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang Sejarah Lokal Kalimantan Selatan dengan cara lebih mudah.

Penyusun menyebutnya “memperoleh pengetahuan” bukan “memperoleh pemahaman”, karena untuk memahami peristiwa sejarah dengan sebab musabab yang melatarbelakanginya, tidaklah cukup dengan hanya membaca daftar istilah dan penjelasannya (*glosarium*) yang bersifat pragmentaris, seperti yang terdapat dalam buku ini.

Glosarium sejarah lokal sebagaimana terdapat dalam buku ini bukanlah penerjemahan atau definisi baku apalagi dimaksudkan sebagai ensiklopedi, melainkan pemaknaan yang dianggap sesuai untuk menjelaskan sebuah kata atau istilah yang berkaitan dengan sejarah lokal dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, pers, organisasi pergerakan, tempat, nama, pelaku peristiwa sejarah, dan hal lainnya.

Sesuai judul, maka isi buku ini hanya memuat glosarium dari tahun 1900 sampai dengan 1950. Dalam rentang waktu tersebut terdapat tiga babakan yang dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai Periode Pergerakan Kebangsaan (Perintis Kemerdekaan), Periode Pendudukan Jepang, dan Periode Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik), sampai dengan Pengakuan Kedaulatan di tahun 1950.

Para sejarawan di Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa awal periode Pergerakan Kebangsaan di daerah ini adalah tahun 1901 saat dimana cikal bakal organisasi yang bersifat teratur lahir di Banjarmasin yakni Seri Budiman. Organisasi ini memang bersifat *sinoman* dan sama sekali belum mengarah kepada kebangsaan, akan tetapi organisasi ini dapat dipandang sebagai pendorong kemunculan organisasi berikutnya yang lebih modern.

Pada proses perkembangannya, organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan tidak hanya bersifat lokal dan “primordial”, tetapi juga tumbuh organisasi yang berlingkup regional maupun nasional yang bergerak di bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Perkembangan organisasi pergerakan di

Kalimantan Selatan dapat dikatakan berakhir dengan masuknya tentara pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan pada tahun 1942.

Berkuasanya tentara pendudukan Jepang bukan saja menjadi akhir dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan, tetapi juga dimaknai sebagai “awan gelap” bagi pergerakan kebangsaan. Pada masa itu tidak ada satu pun organisasi pergerakan yang beraktivitas secara terang-terangan, karena adanya larangan dari tentara pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka dimulailah periode Perang Kemerdekaan yang berlangsung sampai dengan 1949. Istilah ini dimaknai ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan maka lahirlah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Karenanya, manakala kemerdekaan itu ingin diambil alih lagi oleh Belanda, maka tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali perang mempertahankan kemerdekaan baik melalui perjuangan bersenjata maupun perjuangan di jalur politik.

Periode peperangan ini melibatkan hampir seluruh unsur potensi bangsa dengan titik tolak bertumpu pada aktivitas fisik, yang bersemangatkan gelora pembaharuan dan perubahan hidup untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Buku ini mencoba mendefinisikan atau menjelaskan kata, peristilahan sejarah lokal, dan beberapa aktor sejarah Kalimantan Selatan dalam berbagai aspek yang terjadi pada masa Pergerakan Kebangsaan, Pendudukan Jepang, dan Perang Kemerdekaan, meski tidak semuanya peristilahan yang dapat dipaparkan karena terbatasnya tempat dan data yang berhasil dikumpulkan.

Berbagai istilah disusun secara alfabetis ---meski tidak seketat penggunaan alfabet pada susunan kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang serupa--- dan dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya dari buku “sejarah Banjar” maupun buku-buku yang telah penulis susun sebelumnya.

Meski berbagai istilah diambil dari beberapa buku, dalam hal ini penulisannya tidak memakai pola pengutipan langsung. Untuk memperdalam referensi, penyusun menganjurkan kepada pengguna buku ini untuk mempelajari langsung sumber rujukan yang tercantum dalam daftar pustaka atau referensi lainnya.

Semoga buku ini bermanfaat, kendati disadari masih banyak peristilahan kesejarahan dan tokoh sejarah yang belum termuat dalam buku ini disamping penjelasan atau pendefinisian yang masih perlu lebih diperdalam. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran perbaikan dari para pembaca.

Banjarmasin, April 2008

Wajidi



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Assalamuailaikum Wr.Wb.

Kami menyampaikan penghargaan atas terbitnya buku *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan, Periode 1900-1950*.

Definisi peristilahan kesejarahan dalam berbagai aspek yang terdapat dalam buku ini patut dipelajari dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah lokal Kalimantan Selatan.

Sejarah lokal Kalimantan Selatan periode 1900 s.d. 1950 mempunyai makna yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses kesinambungan sejarah perjuangan kemerdekaan dari tiga periode sejarah yakni periode Pergerakan Kebangsaan, periode Pendudukan Jepang, dan akhirnya mencapai klimaksnya pada periode Revolusi Fisik 1945-1949 sampai dengan Pengakuan Kedaulatan di tahun 1950.

Kini para pelaku sejarah ketiga periode itu telah banyak yang tiada, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang mungkin saja akan semakin kabur dan tenggelam ditelan waktu.

Buku ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan jejak sejarah dimaksud, dan meski disusun secara sederhana semoga memberikan manfaat kepada para pembaca.

Wassalamuailakum Wr. Wb.



A

A.A. Hamidhan

Dilahirkan di Rantau, 25 Februari 1909. Pendidikan terakhir *Europese Lagere School*. Tokoh wartawan perintis dan pernah 3 kali dihukum kurungan di penjara kolonial. Pertama kali memimpin perusahaan surat kabar Soeara Kalimantan (1930) yang kemudian dihancurleburkan oleh AVC (*Algemene Vernielings Corps*) Belanda menjelang kedatangan tentara Jepang di Banjarmasin, pengurus dan pemimpin redaksi surat kabar Kalimantan Raya (1942), dan surat kabar Borneo Simboen terbitan Banjarmasin (1942-1945).

Ia satu-satunya utusan Kalimantan dalam keanggotaan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan turut hadir pada malam “penggodokan” naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda tanggal 16 Agustus 1945 dan Sidang Pleno PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD 1945 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Ia menolak jabatan Gubernur Kalimantan yang ditawarkan Presiden Soekarno dan mengusulkan Ir. Pangeran Mohammad Noor untuk menduduki jabatan tersebut.

Sebelum pulang ke Banjarmasin, Presiden Soekarno menyerahkan kepada A.A. Hamidhan Surat Keputusan pengangkatan Mr. Rusbandi sebagai Ketua KNI Daerah dan dr. Sosodoro Djatikusomo sebagai PNI Daerah Kalimantan. Sedangkan A.A. Hamidhan sendiri diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia (KNIP) Pusat. A.A. Hamidhan sempat pula membawa surat kabar “Asia Raya” pimpinan B.M. Diah yang memuat berita dan teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Meski berita proklamasi itu tidak dapat segera diberitakan di media cetak di Kalimantan Selatan karena kuatnya tekanan militer Jepang, ia akhirnya menyiarkan berita tentang

Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan tentang Bentuk Indonesia Merdeka pada surat kabar Borneo Simboen terbitan Nomor 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 (26 Agustus 1945).

Aberanie Sulaiman

Pejuang gerilya pada masa revolusi fisik di Kalimantan Selatan 1945-1949. Dilahirkan di Rangas Birayang, 3 Agustus 1925. Kiprahnya dalam perjuangan bersenjata dimulai ketika bersama Abdul Rahman Karim dan Anwarudin membentuk Gerpindom (Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka) di Birayang pada tanggal 10 Oktober 1945.

Bulan Mei 1947 bertepatan dengan 17 Ramadhan, Aberanie Sulaiman bersama pejuang lainnya untuk pertama kalinya menyerang pasukan Belanda di Hambawang Pulasan, Batu Mandi.

Setelah peristiwa Hambawang Pulasan, ia dan pasukannya memimpin perjalanan menuju Kalimantan Tenggara-Kotabaru menembus pegunungan Meratus dengan tugas antara lain mencari senjata dan penghubung.

Dalam perjalanan ke Kotabaru itulah Aberanie Sulaiman bertemu dengan Hassan Basry yang berniat hendak menyeberang ke Jawa, namun kemudian membatalkan rencananya dan menyatakan bergabung dengan Gerpindom. Perkembangan selanjutnya, Gerpindom dilebur ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan Hassan Basry sebagai Pimpinan Umum (PU) dan Aberanie Sulaiman sebagai Wakil PU/Kepala Staf.

Aberanie Sulaiman juga terlibat dalam pertempuran di Janggar di kaki Gunung Meratus pada bulan Desember 1947, juga di beberapa pertempuran lainnya.

Ia adalah salah seorang anggota perumus teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 yang ditandatangani oleh Hassan Basry, dan sekaligus sebagai Wakil Gubernur/Kepala Staf pada Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI yang

dipimpin oleh Hassan Basry sebagai Gubernur Tentara/Panglima Divisi. Selain tokoh pejuang gerilya, ia dikenal sebagai Gubernur Kalimantan Selatan periode 1963-1965.

Abdurrahman Sidik

Ulama dan tokoh politik lulusan Universitas “Al Azhar” Kairo Mesir tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Ketua Jami’ah Islamiyah Borneo (*Borneo Kaikjo Kjekai*) di bawah pengawasan “ulama” yang didatangkan dari Jepang, seperti H. Umar Faisal, Tahir Zaky, Usman Yusuf, Said Waqas, dan Sarik Imaizumi.

Pernah memberikan sepucuk pistol FN kepada Gerpindom (Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka) Amuntai. Menerima dan melindungi Hassan Basry di kediamannya di Banjarmasin, yang baru datang dari Jawa.

Ketika SERMI didirikan oleh tokoh-tokoh Republiken yang berasal dari golongan ulama agama Islam, ia diangkat sebagai ketuanya, namun ia kemudian keluar dari SERMI karena bersedia menerima ajakan Belanda dengan iming-iming fasilitas untuk mengetuai partai Islam pro Belanda sebagai saingan SERMI, yakni SRI (Serikat Rakyat Islam) pada tanggal 2 Juli 1947 di Banjarmasin.

Menurut Aam Niu (Anang Abdul Muin) seorang jurnalis yang pernah selama 82 hari kamar tahanannya berdampingan dengan kamar tahanan Abdurrahman Sidik di kantor polisi jalan Jawa (sekarang jalan D.I. Panjaitan), kesediaan Abdurrahman Sidik menjadi ketua SRI merupakan buah dari paksaan dan intimidasi berat yang dilakukan Belanda kepadanya, karena dahulu ia “pernah” bekerjasama dengan pemerintahan pendudukan Jepang yakni sebagai Ketua Jam’iah Islamiyah Borneo.

Adspirant Controleur

Wakil (pembantu) controleur dalam menjalankan pemerintahan di onderafdeling.

Advertentie Blad

Lembaran advertensi dari surat kabar Borneo Courant yang terbit di Banjarmasin dua kali dalam seminggu.

Afdeling

Wilayah administratif pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Secara vertikal, afdeling berada di bawah keresidenan.

Afrondings Politiek

Politik ekspansi pembulatan wilayah yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal van Heuts sehingga terbentuk *Pax Neerlandica* dari Sabang sampai Merauke.

Ahmad Basuni

Seorang wartawan pergerakan. Dilahirkan di Margasari, 11 Agustus 1922. Ia adalah pemimpin redaksi Borneo Simboen cabang Kandangan (1944-1945) yang membacakan Mukaddimah UUD 1945 pada Pasar malam di Kandangan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan pertama di Kandangan, Agustus 1945.

Termasuk wartawan yang ditangkap Belanda dan kemudian dibebaskan. Ia pergi ke Jawa untuk meneruskan perjuangan, dan aktif dalam kegiatan organisasi Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) di Solo dan Jogjakarta dengan menerbitkan majalah Mandau, di samping koresponden surat kabar Soeara Kalimantan, Kalimantan Berjuang, dan lain-lain.

Aidan Sinaga

Tokoh politik dari kaum republiken kelahiran Tarutung Sumatera Utara, 6 Maret 1906. Kehadirannya di Kalimantan Selatan dimulai ketika tahun 1935 menjadi

guru HIS (*Hollands Inlandse School*) di Kandangan (tempat Hassan Basry bersekolah). Ia juga mengajar di HIS Banjarmasin dan guru sekolah *Hutsu Cho-Gakko* (pengganti MULO/*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di masa pendudukan Jepang.

Terjun ke dunia politik ketika bersama dr. D.S. Diapari mendirikan partai politik Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dengan Ketuanya D.S. Diapari, Wakil Ketua I A.A. Rivai, Wakil Ketua II Aidan Sinaga. Sekretaris umum E.S. Handuran di samping pembantu lainnya.

Menyikapi Persetujuan Linggajati, maka Aidan Sinaga, E.S. Handuran dan A.A. Rivai menghadap Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta di Jogjakarta dan mengeluarkan surat pernyataan bertanggal 20 November 1946 berisi dukungan dan kesetiaan SKI terhadap Republik Indonesia Perjuangannya bersama tokoh-tokoh SKI lainnya berhasil membelokkan suara dalam Dewan Banjar, sebuah badan legislatif bentukan Belanda, untuk kepentingan perjuangan.

Menjelang Konferensi Meja Bundar A. Sinaga bersama A.A. Rivai sebagai utusan BFO dari Dewan Banjar telah mengikuti persidangan antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO di Scheveningen dan 's-Gravenhage membicarakan persiapan Konstitusi RIS, dan diwakili A.A. Rivai telah membubuhkan tanda tangan pada Piagam Persetujuan Naskah Undang-undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan dalam piagam tersebut. Mereka berdua selanjutnya mengikuti Persidangan KMB di Den Haag, dari bulan Agustus sampai kembali ke Jakarta dengan pesawat constellation KLM tanggal 9 November 1949. bersama utusan lainnya. Sesudah pengakuan kedaulatan, ia dipercaya sebagai walikotapraja Banjarmasin (1950-1958).

Aisyiah

Organisasi kewanitaan dari organisasi Muhammadiyah didirikan tahun 1931.

Ajunct Jaksa

Pembantu Jaksa. Misalnya Ajunct Jaksa H.M. Hasan Corong yang membantu perkembangan Muhammadiyah sehingga dapat berdiri pada tahun 1932 di Martapura.

Akademi Militer Kilat

Wadah penggemblengan pelajar pejuang. Diberi nama Akademi Militer Kilat ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan berlangsung selama 3 bulan di Haruyan. Resminya dimulai tanggal 17 Juli 1949. Pesertanya anak-anak pelajar Sekolah Normal (*Normaalschool*) di Barabai ditambah beberapa orang pemuda sukarelawan, ditampung oleh Pasukan X.4 Mu'ui (Haruyan). Mereka menerima Surat Tanda Lulus, dengan Pangkat Sersan (L).

Algemene Rubber Restrictie

Peraturan Pembatasan Karet untuk ekspor tahun 1934.

Algemene Vernielings Corps atau AVC

AVC (*Algemene Vernielings Corps*) atau Korps Untuk Penghancuran. Milisi yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi serangan Jepang dengan tugas merusak dan menghancurkan segala fasilitas dan jalan kemungkinan dilalui atau dimanfaatkan tentara Jepang menuju ke Banjarmasin, seperti lapangan terbang Ulin, bangunan pemerintahan, jembatan Coen, dan jalan raya, dan lain-lain.

Alam Roh

Nama samaran Markas Besar Daerah Selatan yang berlokasi di desa Sungai Lulut di pinggiran kota Banjarmasin di bawah pimpinan Mayor P. Arya. Daerah Alam Roh meliputi Sungai Jingah, sepanjang Sungai Martapura, jalan Martapura Lama, dan jembatan besi-Sungai Bilu sampai ke Martapura. Berdirinya markas

besar Alam Roh di daerah Selatan, merupakan strategi Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV menghadapi markas *Territoriaal Commandant Voor Zuider en Oosterafdeling van Borneo* atau untuk memblokade kota Banjarmasin.

Berdiri tanggal 6 Juni 1949 sampai dengan cease fire di Munggu Raya 2 September 1949.

Markas Alam Roh tidak hanya berfokus kepada masalah penyerangan yang sifatnya militer, melainkan juga menyusun kekuatan politik, sosial dan ekonomi seperti membentuk pemerintahan sipil, mendirikan koperasi, dan memblokade ekonomi kota Banjarmasin.

Amat Heiho

Sebuah cerita karangan Lamberi Bustani dari kantor bagian Penerangan (Keimin Syibodo) pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Ceritera ini sangat terkenal di seluruh Kalimantan Selatan, yang menggambarkan keberanian seorang pemuda bernama Amat sebagai seorang Heiho.

Ambarawa

Nama samaran desa Telaga Langsung, Kandangan. Di sini pernah dilakukan rapat persiapan tentang perlunya memproklamasikan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Amir Hasan Bondan

Amir Hasan Bondan. Nama lengkapnya Amir Hasan Kiai Bondan, mengikutsertakan nama ayahnya: Kiai Bondan. Ia dilahirkan di Marabahan pada tanggal 10 Februari 1882. Termasuk putera Banjar pertama yang memasuki sekolah *Europese Lagere School* (ELS) tahun 1893, kemudian melanjutkan ke STOVIA namun tidak tamat. Amir Hasan Bondan salah seorang pendiri Seri Budiman (1910) sebuah organisasi lokal beranggotakan para pangreh praja dan pedagang yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya,

mempromogandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian. Bersama-sama dengan dr. Rusma, Gusti Citra, Kumala Ajaib, Mas Abi dan Abdullah, ia mendirikan organisasi Srie tahun 1923. Organisasi Srie mempunyai Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) dan majalah mingguan Malam Djoema'at yang ia pimpin bersama Saleh Bal'ala. Dalam majalah ini para anggota Srie mengadakan rubrik tulisan tersendiri. Haluan dan isi tulisan mereka mula-mulanya bertemakan keagamaan, lambat laun isinya mengarah kepada kebangsaan. Menyambut proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ia aktif dalam kepengurusan PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang diketuai Pangeran Musa Ardikesuma. Sebagai seorang tokoh pergerakan, budayawan dan wartawan maka Amir Hasan Bondan sering menulis di media cetak. Bukunya berjudul "Suluh Sedjarah Kalimantan" terbitan Fadjar Banjarmasin tahun 1953, merupakan buku yang "wajib" dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin menulis terutama tentang kebudayaan Banjar.

A. M. Sangaji

Tokoh pergerakan kelahiran Ambon (Maluku) yang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda aktif menggelorakan semangat kebangsaan di Kalimantan Timur dan Selatan. Ia seangkatan dengan pejuang perintis kemerdekaan lainnya seperti H.O.S. Cokroaminoto dan H. Agus Salim. A.M. Sangaji memiliki mobilitas. Ia tidak hanya di Maluku, tapi juga pernah berkiprah di Borneo, terlebih lagi di Jawa. Di tahun 1920-an, saat berada di Surabaya, ia melakukan korespondensi dengan Mohamad Horman, seorang tokoh pergerakan Sarekat Islam cabang Banjarmasin. Tidak hanya itu, ia juga pernah lama tinggal di Kalimantan untuk menggelorakan semangat kebangsaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di Samarinda Kalimantan Timur, A.M. Sangaji melalui Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rakjat (BPPR) yang didirikannya ia

mengelola Neutrale School untuk menampung anak-anak sekolah dari kalangan bumiputera. Setelah Proklamasi Kemerdekaan A.M. Sangaji mengkoordinir suatu perjalanan panjang yang dilakukan oleh 3 grup/gelombang dari Samarinda ke Banjarmasin untuk bertemu dengan pimpinan BPRI sekaligus memberitahukan Proklamasi Kemerdekaan, mengibarkan bendera, dan memberikan kesadaran kepada rakyat di daerah-daerah yang dilalui. Setibanya di Marabahan ia ditangkap militer Belanda dan dijejloskan ke penjara Banjarmasin pada bulan April 1946. Ketika keluar dari penjara ia menyeberang ke pulau Jawa dan melibatkan diri dalam kegiatan politik di sana serta memimpin Laskar Hisbullah. A.M. Sangaji meninggal di Jogjakarta karena ditembak militer Belanda ketika Agresi Militer I (1947).

Anak Cucu Orang Sepuluh

Anak cucu dari sepuluh orang menteri/datu Kerajaan Banjar yang berjasa sebelum tahun 1860 sehingga memiliki hak-hak istimewa dari Kerajaan Banjar. Hak istimewa tetap berlanjut beberapa saat untuk kemudian dihapus pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia atau AKSI

Diprakarsai oleh Bahri Arpan seorang pelajar Sekolah Menengah Islam (SMIP) Banjarmasin bersama dengan kurang lebih 10 orang pemuda pelajar lainnya. Pada pertemuan para pelajar SMIP, *Ambachtschool* dan MULO Banjarmasin bertempat di kursus mengetik "Semangat" di samping Masjid Noor Banjarmasin, mereka sepakat untuk membentuk AKSI (Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia) yang sejak bulan September 1948 menjadi bagian dari ALRI Divisi IV BN-10 Cerbon.

Apanase

Berasal dari istilah bahasa Perancis *apaner* berarti memelihara; kata Latin *panis* yang tersirat dalam *apaner* ialah *roti*, maka *apanase* bermakna menghidupi. Apanase ialah tunjangan dari Raja atau Tuan Tanah (*Landlord, Landheer*) yang berkuasa, diberikan kepada kerabatnya yang tidak duduk dalam pemerintahan atau yang masih belum dewasa. Materi tunjangan itu dapat berupa puri dan pekarangannya, daerah perburuan, subsidi berupa uang, dan dapat pula berupa lahan pertanian dan serupa. Pada masa Kerajaan Banjar, terdapat beberapa wilayah apanase yang dikuasai kerabat kesultanan, namun kemudian hak-hak atas tanah apanase itu dihapus oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Arabische School

Sekolah yang didirikan oleh orang-orang keturunan Arab seperti

Muhammad bin Thalib, Syekh Ali Baraisy dan Umar bin Saif, berlokasi di Kampung Bugis, Banjarmasin. Selain itu, terdapat pula

Arabische School di Amuntai dipimpin oleh ulama H. Abdurrasyid.

Di Banjarmasin, sekolah ini merupakan yang pertama kali menggunakan bangku-bangku belajar dengan lama belajar 6 tahun.

Pada mulanya para guru didatangkan dari Mesir dipimpin oleh Syekh Iberahim Al Mulla, namun lambat laun digantikan oleh guru-guru alumni sekolah itu sendiri.

Melalui Arabische School gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang dimulai dengan faham Muhammad Abduh, masuk ke daerah ini.

Sesudah Iberahim Al Mulla kembali ke Mesir, pimpinan sekolah ini dipegang berganti-ganti oleh Syekh Mahmud dari Madinah, K.H. Muhammad Yasin, K.H. Ahmad Amin dan Saleh Bal'ala.

Pada waktu Saleh Bal'ala inilah nama Arabische School diganti namanya menjadi *Islamsche School* (berlokasi di jalan Sulawesi sekarang; sekolah madrasah). Saleh Bal'ala yang dikenal suka bergaul dengan pemuka masyarakat bumiputera, adalah juga anggota Sarekat Islam yang kemudian menjabat ketua Fathal Islam yakni suatu organisasi dakwah Islamiyah, dan juga ketua PKU yakni organisasi filial dari Muhammadiyah.

Sekolah ini merupakan peletak pertama pembaharuan Islam di daerah ini, karena alumninya kemudian menjadi ulama dan pemimpin Muhammadiyah. Atau kalau tidak menjadi anggota Muhammadiyah, sekurang-kurangnya menjadi ulama yang berpikiran maju.

Asisten Residen

Nama jabatan di bawah Residen yang mengepalai sebuah afdeling.

B

Badan Pembantu Oesaha Gubernur atau BPOG

BPOG dibentuk pada tanggal 2 September 1945 berkantor di jalan Embong Tanjung 17 Surabaya diketuai G. Obus. Tugas BPOG adalah mempersatukan seluruh putera Kalimantan yang berada di Jawa untuk membantu perjuangan rakyat di Kalimantan, membentuk cabang BPOG di daerah-daerah, dan membantu Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor. Salah satu dari kegiatan adalah diadakannya rapat oleh para pemuda pejuang Kalimantan di Kantor BPOG di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1945.

Badan Permusyawaratan Federal atau BFO

BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) atau Badan Permusyawaratan Federal. Dibentuk atas inisiatif Pemerintah Negara Indonesia Timur dengan bantuan Pemerintah Pasundan. Keanggotaannya sebanyak 15 orang berasal dari 15 daerah federal bentukan Belanda. BFO memegang peranan penting dalam perkembangan struktur ketatanegaraan dan federasi di Indonesia. Dalam konferensi inter Indonesia yang dilakukan BFO, maupun pada saat Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda, para utusan dari BFO berhasil menyatukan sikap untuk mengembalikan bentuk negara RIS yang digagas Belanda menjadi NKRI.

Bangsa

Bangsa atau Nation adalah suatu kesadaran moral (*conscience morale*) yang timbul oleh adanya keinginan hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu

sekarang, meskipun ada perbedaan rasial, agama, dan sebagainya, karena adanya kemuliaan bersama di waktu lampau seperti sejarah nasib bersama dalam suka dan duka, lebih-lebih dalam duka.

Otto Bauer mengartikan bangsa sebagai sebagai suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat senasib. Pendapat keduanya itu berlawanan dengan Teori Geopolitik yakni teori yang bersangkutan dengan *Blut-und-Boden Theorie* (Teori Persatuan Darah-dan-Tanah). Teori ini semula berasal dari Kar Haushofer yang diuraikannya dalam bukunya *Geopolitik des pazifischen Ozeans* (1924) maupun buku yang ditulisnya bersama März: *Zur Geopolitik der Selbstbestimmung* (1923).

Menurut Panitia Lima yang dibentuk Pemerintah Orde Baru, bangsa adalah keseluruhan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu yang secara geografis merupakan satu kesatuan yang karena ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang sama diderita, mujur sama dinikmati, karena mengalami sejarah yang sama, kemudian berkehendak untuk hidup bersama dalam satu tertib masyarakat untuk mewujudkan cita-cita yang sama di bawah tanggung jawab sendiri.

Bangsa Indonesia lahir karena adanya persamaan “nasib” dan “sejarah”, yakni sama-sama dijajah dan menderita oleh penjajah yang sama, terutama oleh penjajahan Belanda. Wadah persatuan, wilayah tempat dimana bangsa Indonesia berada adalah wilayah Hindia Belanda sebagai hasil politik kolonial yang dipaksakan kepada daerah/pulau-pulau yang dikuasainya. Pemaksaan itu, di satu sisi telah menimbulkan penderitaan, tetapi akibat dari itu telah menimbulkan kesadaran senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.

Banjarmasin-Syi

Nama pemerintahan pada masa pendudukan Jepang yang serupa dengan “Pemerintah Kota Banjarmasin”. Wilayah Banjarmasin-Syi dibagi menjadi 3 (tiga) Ku, yakni Higashi-Ku (Wilayah Timur), Nisi-Ku (Wilayah Barat), Kita-ku (Wilayah Utara). Masing-masing wilayah Ku dikepalai oleh seorang Ku-Cho.

Barito Rangers

Milisi yang anggotanya berasal dari suku Dayak yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi serangan Jepang.

Basler Mission Gesellschaft

Lembaga missionaris yang bercirikan Calvinisme sebagai pengganti tugas RMG (*Rheinische Missions Gesellschaft*) dalam menyiarkan agama Kristen sesudah tahun 1914. Pendetanya selain berasal dari Jerman juga dari Swis. Mereka tetap melanjutkan program-program RMG. Oleh misi-misi ini sebelum abad ke-20 telah disalin Kitab Injil baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ke dalam Bahasa Dayak Ngaju.

Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan

Dibentuk secara resmi tanggal 18 November 1946 di desa Tabat – Haruyan, sebagai hasil pertemuan antara Letnan II Asli Zuchri sebagai Wakil Markas Besar ALRI Divisi IV Mojokerto dengan tokoh-tokoh Banteng Indonesia; Hassan Basry, Hasnan Basuki, H.Rusli, dan Abdul Muti, dan lain-lain. Kedudukan resmi Batalyon ini adalah di Kandangan.

Kode “A” pada nama Batalyon menunjukkan wilayah operasi di Kalimantan Selatan. Selain Batalyon Rahasia ALRI Divisi “A”, terdapat pula Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “B” (Kaltim), “C” (Kalbar), dan “D” (Riau).

Belanda Tiga Suku

Julukan terhadap golongan peranakan atau kalangan pribumi berpendidikan Barat yang statusnya dipersamakan dengan orang Eropa atau '*gelijkgestelden*' sehingga hak dan kewajibannya juga sederajat dengan golongan orang Eropa.

Status itu bermula dari adanya permohonan 'rekes' (dari kata "*request*") dari pribumi bersangkutan, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan persetujuan Dewan Hindia mengabulkan rekes tersebut.

Kerap kali perilaku 'gelijkgestelden' ini kebelanda-belandaan. Golongan ini oleh masyarakat Banjar diberi julukan "Belanda Tiga Suku", karena surat keputusan atau besluit Gubernur Jenderal dipetik untuk yang bersangkutan di atas kertas segel berharga 1,50 gulden (satu setengah gulden atau tiga suku; satu suku ialah uang logam coin perak senilai setengah gulden atau lima puluh sen).

Bendahara Borneo

Nama suatu usaha Studi Fonds yang dibentuk tahun 1930- yang anggotanya dari golongan pegawai.

Berita Bahalap

Sebuah surat kabar yang terbit tahun 1914, menggunakan bahasa Kapuas, sebagai alat penyiaran agama Kristen dan pengetahuan politik pada zamannya.

Berita Merdeka

Surat kabar yang terbit di Banjarmasin pada tahun 1947 di bawah pimpinan H. M. Thalhah dan A.M. Karim.

Bestuur Commissie

Sebuah komisi yang bertugas menilai seorang anak bumiputera (Indonesia) yang akan masuk sekolah,

apakah diterima atau tidak. Hasil penilaiannya sangat ditentukan pada martabat orang tuanya.

Bindo atau Barisan Indonesia

Sebuah organisasi lokal yang berwatak kebangsaan dan non-kooperatif. Bermula dari Kongres Sarekat Kalimantan yang ke-2 di Barabai tahun 1931 yang melahirkan suatu tekad bulat untuk menjadikan Sarekat Kalimantan berasaskan kebangsaan dengan merubah nama organisasi menjadi Barisan Indonesia (BINDO) dengan pedoman besarnya H.M. Arip.

Organisasi ini mempunyai kartu anggota berwarna merah putih, dan di dalam kartu itu disebutkan bahwa Barisan Indonesia bermaksud hendak turut: (a) Mendukung dan menjunjung derajat Bangsa dan Tanah Air Indonesia; (b) Mempelajari tentang kepolitikan di antara anggota-anggota yang telah insyaf tentang asas dan tujuan Bindo. Disebutkan pula, bahwa maksud itu dicapai dengan cara: (a) Membangkitkan keinsyafan dan memperkuat perasaan persatuan di antara segala putera dan puteri Indonesia; (b) Memberantas analphabetisme (picak mata huruf), menyiar-nyiarkan hal nasional Onderwijs dan membangunkan fonds-fonds (*Studie-partij-congres-enz*); (c) Memajukan hal pertanian, koperasi, dan segala usaha yang sah.

Tanggal 27 s.d. 29 April 1934 dilaksanakanlah Kongres Bindo I di Banjarmasin diikuti oleh para utusan dari Hulu Sungai dan daerah Barito. Meski dilarang oleh polisi P.I.D Belanda, mereka berani melanggar larangan itu dengan memasang atau mengibarkan bendera merah putih, di dalam maupun di luar gedung kongres.

Sebagai dampak dari kuatnya tekanan Pemerintah Hindia Belanda, maka lambat laun aktivitas Bindo mengalami kemunduran.

Binnenland; Bestuur Ambtenaar

Pegawai pemerintahan dalam negeri (pamong praja) Hindia Belanda yang khusus dijabat oleh orang-orang bumiputera.

Binnenland, Zaken

Departemen Dalam Negeri dalam pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas dalam hal: administrasi dalam negeri, swapraja-swapraja dan kotapraja-kotapraja; pelaksanaan desentralisasi; pengawasan wilayah-wilayah yang termasuk wewenang Gubernur Jenderal; pengawasan pada pencabutan hak untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh daerah-daerah; urusan warga negara Cina dan Jepang; pengelolaan kepolisian; urusan-urusan pertanahan; pemberian izin perkebunan tebu dan nila; kredit untuk rakyat; dan penerapan ketentuan-ketentuan tentang mendirikan pabrik dan niaga kecil.

Bintang Borneo

Nama surat kabar yang didirikan tahun 1926 di Banjarmasin, menggunakan bahasa Melayu dan Cina dipimpin oleh W.Schmid untuk keperluan iklan dan propaganda dagang.

B.J. Haga, Dr

Gubernur Gewest Borneo. Tahun 1942, ia dan rombongan melarikan diri ke Purukcahu, dan secara diam-diam menyusun kekuatan untuk kembali merebut kekuasaan Jepang. Namun, komplotannya itu akhirnya tercium mata-mata Jepang. Militer Jepang bertindak melakukan pencidukan. Pada subuh 10 Gogatsu 2603 (10 Mei 1943) anggota-anggota komplotan yang bergerak di luar diciduk. Dalam empat kali pencidukan lebih dari 200 (dua ratus) orang ditahan. B.J. Haga dan kawan-kawan menyerah pula, dan kemudian ia dan beberapa pimpinan komplotannya seperti Ir. Makaliwy, Dokter Soesilo (saudara kandung Dokter Soetomo pendiri Boedi Oetomo), C.M. Vischer, Housman Babu (mantan Gunco

Sampit seorang pelopor suku Dayak dan pendiri Pakat Dayak) dieksekusi mati pada tanggal 20 Desember 2603 (1943).

Boei Teisin Tai

Tenaga cadangan untuk pembangunan yang dipersiapkan Jepang sebagai pasukan gerilya di daerah yang akan diduduki musuh. Boei Teisin Tai mendapat latihan militer dan pengetahuan senjata ringan dari anggota Kaigun dan diawasi oleh Bunken Kanrikan atau wakilnya. Pelatihan yang mereka terima berupa penggemblengan seisin atau semangat, anti Amerika dan Inggris, kesetiaan kepada Tenno Heika, bahasa Jepang dan Kyoren atau latihan kemiliteran termasuk taiso atau senam, pelatihnya semua orang Jepang.

Bond Inlandse Ambtenaren

Majalah mingguan di Kandangan, yang dipimpin oleh Kiai Besar Afdeling Hulu Sungai, Merah Nadalsyah.

Bond Indonesische Chauffeur atau BIC

Organisasi para sopir yang artinya Persatuan Sopir Indonesia. Cikal bakal berdirinya BIC di Kalimantan Selatan adalah Persatuan Sopir Barabai. Pimpinan pengurus besarnya yang berpusat di Banjarmasin diketuai Achmad Zakaria.

Di akhir tahun 1939 BIC seluruh Indonesia mengadakan Kongres I di Malang Jawa Timur yang diikuti pula oleh utusan BIC dari Kalimantan Selatan. Kongres itu dihadiri oleh Mr. Tajuddin Noor, penasihat BIC seorang putera Kalimantan yang bertempat tinggal di Lawang Jawa Timur. Kongres mengeluarkan beberapa keputusan, seperti bendera BIC berwarna merah dan putih sebagai simbol bendera kebangsaan, dan warna hijau dengan tanda bundaran di tengah sebagai simbol BIC; lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan satu negara Indonesia

Borneo Advertentie Blad

Diterbitkan oleh Usaha Dagang Belanda, sebagai alat Propaganda iklan Toko Jerman "Rob Henneman"

Borneo Association Native Company

Disingkat Bonaco yaitu suatu Badan Usaha yang bergerak di bidang ekspor/impor dan kemudian diubah menjadi Maskapai Oesaha Dagang Indonesia (ODI).

Borneo Bergerak

Nama surat kabar sebagai usaha komunikasi tertulis para anggota anggota Sarekat Islam cabang Banjarmasin, dicetak di Surabaya.

Borneo Kaikjo Kjekai

Nama organisasi keagamaan (Jami'ah Islamiyah Borneo) yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang diketuai H. Abdurrahman Siddik di bawah pengawasan ulama-ulama yang didatangkan dari Jepang, seperti H. Umar Faisal, Tahir Zaky, Usman Yusuf, Said Waqas, dan Sarik Imaizumi.

Borneo Minami

Sebutan bahasa Jepang untuk menyebut Borneo Selatan.

Borneo Minseibu

Sebutan wilayah pemerintahan pada masa pendudukan Jepang yang serupa dengan provinsi (Gewest Borneo) pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Borneo Museum

Museum Banjar pertama yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda, namun saat kedatangan tentara Jepang tahun 1942, bangunan Borneo Museum dimusnahkan, setelah benda-benda arkeologi, dan benda-benda budaya dijarah habis-habisan. Bekas lokasi bangunan

museum itu adalah Wisma Antasari sekarang di jalan Lambung Mangkurat.

Borneo Post

Surat kabar Pemerintah Hindia Belanda yang menggunakan Bahasa Belanda, diterbitkan oleh *Regering Voorlichtingen Dienst* (RVD) Daerah Kalimantan Selatan dan Timur. Pimpinan editor (*Head Editor*) Borneo Post yakni Smits merupakan salah seorang yang dipancung tentara Jepang di atas sisa-sisa reruntuhan Jembatan Coen ketika kedatangan tentara Rikugun Jepang (Angkatan Darat) dari Hulu Sungai pada tanggal 13 Februari 1942.

Borneo Simboen

Surat kabar resmi pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan (*Borneo Minseibu*) tahun 1942-1945. Pimpinan umumnya (Kuasa Umum) E. Kato, Pengurus dan Pemimpin Redaksi A.A. Hamidhan yang sebelumnya telah menerbitkan harian Kalimantan Raya yang kemudian dilebur menjadi Borneo Simboen dan merupakan bagian dari Asahi Simboen. Surat kabar Borneo Simboen menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, selain terbit di Banjarmasin sebagai kantor pusat juga terbit di Kandangan, Balikpapan, dan Pontianak.

Kantor dan percetakan Kalimantan Raya yang menjadi Borneo Simboen berada di sebelah kantor Borsumij, kemudian menjadi Aduma Niaga kemudian pindah ke gedung bertingkat kepunyaan Geo Wehry di sebelah BIM, Banjarmasin.

Penerbitnya adalah Borneo Simboensja (Pusat Daerah) dengan alamat redaksi dan administrasi Itjiba Dori Banjamasin dengan telepon redaksi no. 153 dan telepon administrasi no. 154.

Harga langganan yang tertulis seperti pada penerbitan Borneo Simboen No. 435, Jumat 28 April 2604 adalah f

1.60 untuk dua bulan, dan harga eceran 4 sen selembarnya, dan harga advertensi 1 cm- 1 kolom adalah f 1.50.

Untuk Borneo Simboen edisi Indonesia, jumlah wartawannya 12 orang terdiri dari: A.A. Hamidhan sebagai pengurus dan pimpinan redaksi, A.A. Rivai pengganti pimpinan redaksi, Gt. Sugian Noor, F. Mohani, Marwan Ali, Zaglulsyah, Ahmad Basuni, Syaharansyah, Abdul Wahab, Rosita Gani, Golek Kencana dan Yanti Tajana.

Berita Proklamasi Kemerdekaan pertama kali disiarkan surat kabar Borneo Simboen edisi Kandangan pimpinan A. Basuni yang informasinya diperoleh dari kantor berita Jepang "Domei" Banjarmasin yang menerima berita dari kantor "Domei" Jakarta. Baru kemudian Borneo Simboen edisi Banjarmasin terbitan Nomor 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 (26 Agustus 1945). Menyiarkan atau memberitahukan tentang pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan Bentuk Indonesia Merdeka. Setelah pasukan sekutu dari Australia datang di Banjarmasin pada bulan September 1945, penerbitan Borneo Simboen dihentikan.

Borneo Simboensja

Penerbit surat kabar harian Borneo Simboen beralamat di Itjiba Dori Banjamasin dengan telepon redaksi no. 153 dan telepon administrasi no. 154.

Borneo Suijan Kabushiki Kai

Perseroan terbatas untuk urusan ikan.

Borneo Shoensho Kabushiki Kai

Perseroan terbatas untuk pembuatan kapal.

Borsumij

Borsumij (*Borneo-Sumatra Handels Maatschappij*) sebuah badan usaha pedagang Belanda yang termasuk The Big Five di Hindia Belanda.

Boven Digul

Nama daerah di Irian Jaya (Papua) yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda menjadi tempat pembuangan dan pengasingan orang-orang politik yang dianggap Pemerintah Hindia Belanda membahayakan, seperti Mohammad Hatta dan Syahrir. Pejuang pergerakan di Kalimantan Selatan yang dibuang ke Boven Digul adalah para guru PHIS (*Particuliere Hollands Inlandse School*) di Rumah Bulat Marabahan yakni Marjono, Sutomo dan Sunaryo.

BPO atau Borneo Padvinder Organisatie

Organisasi Pandu Borneo, yakni nama kepanduan yang digunakan antara lain oleh guru-guru *Particuliere Hollands Inlandse School (PHIS)* di Marabahan dalam menggembleng semangat kebangsaan para pemuda. Seiring dengan semakin menebalnya semangat kebangsaan, maka nama *Borneo Padvinder Organisatie* berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia.

Budi Sempurna

Perkumpulan Sosial yang didirikan tahun 1904 oleh Kiai Muhammad Zamzam di Banjarmasin.

Budi Utomo

Dideklarasikan pendiriannya pada tanggal 20 Mei 1908 (minggu pukul 9 pagi) di Aula STOVIA (School tot Opleiding van Inlandshe Artsen) jalan Hospitaalweg (kini jalan dr. Abdul Rahman Saleh No. 26) di Batavia (Jakarta) oleh dr. Sutomo, dan kawan-kawan.

Meski mengandung diskusi yang bersifat polemis, tanggal kelahirannya (20 Mei) ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.

Bun

Wilayah pemerintah pada masa pendudukan Jepang yang serupa dengan afdeling pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Bunken Kanrikan

Pejabat pemerintahan pada masa pendudukan Jepang yang bertugas mengawasi pekerjaan Gun-cho yang mengepalai wilayah Gun. Dalam pekerjaannya dibantu oleh seorang Bunken Kanrikan Dairi. Pada masa Hindia Belanda, pejabat itu serupa dengan Controleur dengan adspirant-nya yang mengawasi Kiai atau Kiai Kepala.

C

Curu

Istilah atau sebutan yang dikenakan terhadap mata-mata musuh atau spion Belanda. Istilah lainnya adalah *Cecunguk*.

Cecunguk

Sebutan yang dikenakan terhadap mata-mata musuh atau spion Belanda. Istilah lainnya adalah *Curu*.

Centraal Sarekat Islam

Sarekat Islam Pusat di Surabaya yang menghubungkan dan mengkoordinasi kegiatan Sarekat Islam lokal.

Cho Sai Gi In

Semacam DPRD Provinsi pada masa pemerintahan pendudukan Jepang yang anggotanya diangkat oleh *Minseibu Chokan* berkedudukan di Banjarmasin.

Collecteloon

Sistem pemungutan pajak pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam sistem ini pembakal melaksanakan pemungutan pajak yang besar kecilnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Setiap wajib pajak, harus menyerahkan uang pajaknya kepada pembakal dengan ditambah 0,75 gulden sebagai penghasilan kepada pembakal. Pajak yang terkumpul ini kemudian

oleh kepala desa diserahkan kepada kiai, dan selanjutnya oleh kiai diserahkan ke kas negara.

Color Line

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang membedakan-bedakan penduduk Hindia Belanda berdasarkan warna kulit, sehingga disebut juga sebagai Politik Garis Warna.

Kebijakan yang dimaksudkan untuk memisahkan antara penguasa dengan yang dikuasai ini lahir berdasarkan *Nederlands Indische Onderdaanschap* tahun 1911 yang membedakan masyarakat Hindia Belanda kepada tiga golongan, yakni: (1) Orang Eropa, termasuk Belanda dan orang Jepang yang dipersamakan dengan status orang Eropa; (2) Timur Asing, yakni yang bukan Eropa. Kelompok ini termasuk orang Cina, India, dan sebagainya yang bukan Bumiputera dan Eropa; (3) Bumiputera, masyarakat Banjar termasuk dalam kelompok ini.

Selain golongan tersebut di atas, ada suatu golongan khusus yang disebut “Belanda Tiga Suku” atau ‘*gelijkgestelden*’ yakni orang-orang peranakan atau pribumi yang dipersamakan statusnya dengan orang Eropa.

Untuk kepentingan kolonial, politik garis warna itu senantiasa dinampakkan dalam bentuk diskriminasi dimana perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial terhadap Orang Eropa, maupun Timur Asing berbeda jauh dengan perlakuan yang diberikan terhadap golongan bumiputera.

Commies

Dieja komis. Suatu jabatan administratif untuk Kepala suatu Bagian dan Kantor, biasa disebut Komis Kepala (*Hoofd Commies*).

Commissie Aanslag

Komisi yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda untuk menetapkan besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

Cultuurstelsel

Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) diterapkan Gubernur Jenderal van Den Bosch. Sistem ini mewajibkan kepada penduduk pribumi untuk menanam komoditas tertentu seperti gula dan kopi untuk kepentingan ekspor Pemerintah Hindia

D

Dai Asia Shugi

Sebuah nama majalah yang diterbitkan “Perkumpulan Asia Raya” di Jepang. Majalah ini selalu melancarkan gerakan anti Barat dan kampanye “Pan Asia” untuk menarik perhatian rakyat Jepang terhadap rakyat bangsa-bangsa Asia yang sedang dijajah oleh bangsa Barat. Oleh mereka dikumandangkan semboyan “Asia Untuk Orang Asia”.

Darat Hangit Amun Manyarah Kada

Maksudnya “biar hangus terbakar (sampai mati), tidak akan menyerah”. Tekad heroik para pejuang kemerdekaan di Kalimantan Selatan yang ditulis dengan sepotong arang di dinding Gua Liang Bawah; persembunyian mereka selepas pertempuran di Janggar tahun 1947. Gua tersebut sekarang berada di wilayah desa Gadang Kecamatan Malangkayan Kabupaten Tanah Bumbu. Tim Napak Tilas dari para pelaku sejarah dan pemuda tahun 1992 masih dapat membaca tulisan tersebut meski agak kabur karena ditelan masa selama 45 tahun.

Darussalam

Madrasah Islam yang pertama didirikan oleh Sarekat Islam tahun 1915 di Martapura. Madrasah ini terkenal ke

berbagai daerah sehingga santrinya tidak hanya dari Kalimantan Selatan, namun juga dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan ada juga yang berasal dari Tembilahan Sumatera Timur.

Departement *van Binnenlandse Zaken*

Departemen Dalam negeri

Departement *Economische Zaken*

Departemen Ekonomi

Departement *Sociale Zaken*

Departemen Sosial

Departement *van Justitie*

Departemen Kehakiman

Dewan Banjar

Meski namanya sama dengan Dewan Banjar (*Banjar Raad*) yang pernah ada pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, maksud Dewan Banjar di sini adalah Lembaga Legislatif yang dibentuk oleh pemerintah NICA untuk menjalankan Daerah Otonom Banjar (lihat Pasal 2 Staatsblad 1948 Nomor 14 tanggal 14 Januari 1948). Sesungguhnya dewan ini dibentuk guna melicinkan jalan pembentukan Negara Borneo (Kalimantan), sehingga seolah-olah nantinya pembentukan Negara Kalimantan merupakan hasil dari aspirasi rakyat sendiri melalui anggota Dewan Banjar. Akan tetapi, ternyata anggota Dewan Banjar yang pro Republik, terutama yang berasal dari anggota SKI-SERMI dapat membelokkan suara dalam dewan ke arah kepentingan perjuangan, walau akhirnya kemudian Belanda dapat pula mengusainya. Ketua Dewan Banjar yang pertama adalah Mohammad Hanafiah.

Diniyah School

Sekolah Agama Islam tahun 1921 di Sungai Kidaung Banjarmasin (kini MDI Muhammadiyah 1-2). Diniyah School merupakan tempat persemaian pembaharuan Islam yang dikelola organisasi Muhammadiyah.

Distrik

Wilayah administrasi yang merupakan bagian dari Onderafdeling yang diperintah oleh seorang bumi putera dengan pangkat *kiai*.

Drukkerij Eendracht

Perusahan pencetak dan penerbit koran-koran pro-Pemerintah Hindia Belanda , seperti *Borneo Post* yang berbahasa Belanda dan *Bintang Borneo* yang berbahasa Indonesia.

D.S. Diapari

Nama lengkapnya Dja'far Siregar Diapari, lahir 10 Oktober 1910 di Bungabundar, Tapanuli, Sumatera Utara. Ia seorang dokter pemerintah lulusan NIAS (*Nederlands Indische Artsen School*) di Surabaya tahun 1939. Ia termasuk tokoh politik di Kalimantan Selatan. Bersama reka-rekannya ia mendirikan partai politik Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) pada tanggal 19 Januari 1946 dengan ketuanya ia sendiri dibantu Wakil Ketua I A.A. Rivai, Wakil Ketua II Aidan Sinaga. Sekretaris umum E.S. Handuran di samping pembantu lainnya. Partai SKI merupakan partai legal pro unitarisme yang berjuang lewat jalur parlementer yakni Dewan Banjar. Karena aktivitas politiknya, D.S. Diapari ditangkap Belanda, sehingga waktu Kongres Pertama SKI (Desember 1946) ia masih mendekam dalam penjara Banjarmasin. Selanjutnya Diapari diasingkan ke Jawa.

Dunia Isteri

Organisasi wanita Sarekat Islam di Banjarmasin tahun 1923 yang dipimpin oleh Nyonya Siti Masiah. Organisasi ini mempunyai keterkaitan dengan Sarekat Islam Wanodya Oetomo yang dipimpin oleh R. Ajoe Tjokroaminoto yang beralamat di Kedoengdjati, Surabaya.

E

Economische Uitbuiting

Economische uitbuiting (pengurasan ekonomi) adalah salah satu bentuk penindasan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi, antara lain berupa pungutan pajak yang besarnya tidak sebanding dengan penghasilan rakyat. Taksiran pajak dikenakan berlapis-lapis dan dipungut antara lain oleh Gementeraad Bandjermasin, oleh Desaraad di bagian Afdeling Hulu Sungai serta pajak-pajak yang dipungut oleh Kas Negeri di pasar.

Eendracht

Nama Percetakan/Penerbit yang menerbitkan koran "Pengharapan".

Eigenaar

Sebutan untuk orang-orang kaya pribumi di desa namun berperilaku kebelanda-belandaan. Karena perilaku itulah mereka diberikan julukan *His Master's Voice* yang artinya "suara majikan".

Ekspedisi Rombongan TKR Laut Tegal

Ekspedisi gabungan anggota-anggota TKR Laut dan Pemuda Pejuang Kalimantan Barat yang dikirim oleh Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor. Jumlah seluruh ekspedisi ini adalah 53 orang terdiri dari 6 orang anggota TKR Laut Tegal dan 43 orang pejuang pemuda Kalimantan Barat ditambah dengan 4 orang anak buah kapal. Pada tanggal 23 November 1945 rombongan ekspedisi meninggalkan pelabuhan Tegal menuju Kalimantan Barat dengan Kapal Srikaton yang menggunakan motor berlayar di depan dan diikuti kapal layar. Kedatangan ekspedisi di daerah Kalimantan Barat sudah ditunggu oleh NICA, sehingga terjadilah pertempuran. Karena kekuatan tidak seimbang, maka rombongan itu pecah menjadi 2, satu di antaranya menuju dan terdampar di pulau Karimata, sedangkan yang lainnya menuju pedalaman. Dalam pertempuran di Kandawangan ini Rahadi Usman (pimpinan) dan Tamat (anggota TKR Tegal) gugur.

Ekspedisi Rombongan Husin Hamzah dan Firmansyah

Merupakan ekspedisi pasukan Pesindo yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui BPOG dan PRI Kalimantan, terdiri dari 120 orang pemuda bersenjata di bawah pimpinan A.Murad, Firmansyah serta Bachtiar. Pertama kali berangkat dengan kapal “Merdeka” namun kemudian gagal. Setelah anggota ekspedisi dihimpun kembali, maka tanggal 4 Februari 1946 rombongan meninggalkan pelabuhan Tegal menuju pulau Kalimantan. Pelayaran memakan waktu selama dua hari dua malam. Akhirnya rombongan mendarat di Kuala Jelai, perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan saat itu (sekarang Kalimantan Tengah), sebuah lagi mendarat ke arah barat yaitu di dekat Kuala Sapu. Husin Hamzah yang memimpin ekspedisi ini adalah pejuang kelahiran Pekapuran Raya Banjarmasin, seorang pejuang berdarah campuran Arab. Letnan Muda Kadet Militer Akademi Gusti Abdurrahman

yang nanti terkenal dengan nama Gusti Aman (G.M. Yaman) ikut dalam rombongan ini.

Ekspedisi Rombongan PMC

Ekspedisi ini diberangkatkan oleh Gubernur dengan tugas khusus. PMC (Penyelidik Militer Khusus) dipimpin oleh Letkol Zulkipli Lubis. PMC adalah suatu organ dari Kementerian Pertahanan yang bergerak di bidang intelijen, dan sejak tahun 1946 telah melakukan ekspedisi ke luar Jawa, Sumatera, Maluku dan Kalimantan bahkan ke Australia dan Singapura. Ekspedisi PMC ke Kalimantan dipimpin oleh Kapten Mulyono dan berangkat bulan Februari 1946 dari pelabuhan Pekalongan. Ekspedisi ini mendarat di Kuala Pembuang dan terus ke Tumbang Manjul, dimana terlibat pertempuran hebat melawan NICA, dan akhirnya Mulyono tertangkap dan dipenjarakan di Banjarmasin.

Ekspedisi Pimpinan Mayor Tjilik Riwut

Ekspedisi ini dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Ir. Pangeran Mohammad Noor dengan surat Gubernur tertanggal Jogjakarta 16 Januari 1946 dan surat instruksi No. 73/L/46 tanggal 4 Februari 1946 dan penjelasan No. 142 tanggal 24 Januari 1946. Surat Gubernur tertanggal 16 Januari 1946 itu merupakan surat kuasa yang diberikan kepada Mayor Tjilik Riwut sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia ke Kalimantan khususnya untuk daerah yang berpenduduk Suku Dayak OT Danum untuk mengambil tindakan pembelaan dan pembangunan negara. Pimpinan Ekspedisi ini diberi nama MN 1001 singkatan dari Mohammad Noor sedangkan 1001 berarti nama 1001 akal harus mampu menghadapi segala rintangan dan hambatan dalam melaksanakan ekspedisi. Rombongan ini berangkat bulan Februari 1946 dari pelabuhan Pekalongan menuju daerah Kalimantan Tengah dan berhasil mendarat di kampung Sungai Tabuk, dekat Pangkalan Bun dan kemudian terus ke pedalaman Kalimantan di bawah

pimpinan Tjilik Riwut diikuti oleh A. Mukran, Reinold Silvanus dan Willem Batu, sedangkan yang lainnya seperti Nazaruddin, M. Saleh Abdis, Darham Hidayat dan Hamdi Gaffar menggabungkan diri dengan ekspedisi Husin Hamzah yang sedang menjalankan operasi di daerah sungai Rangas. Rombongan Tjilik Riwut berhasil tiba di Kotawaringin menyusun Pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut serta menggerakkan para pemuda untuk mempertahankan daerah itu. Hasil positif yang dapat dibawa oleh misi ekspedisi ini ialah dibentuknya satu pasukan perjuangan yang diberi nama "Pasukan MN 1001", yang merupakan pasukan bagian dari pasukan MN 1001 yang berpusat di Jawa. Setelah kurang lebih setahun bertugas mengobarkan semangat perjuangan di Kalimantan Selatan, Mayor Tjilik Riwut kembali ke Jawa.

Ekspedisi Rombongan 9 Pelopor

Ekspedisi berasal dari BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia) pimpinan Bung Tomo di Surabaya. Rombongan ini terdiri dari 9 orang yang semuanya berasal dari Kalimantan, yaitu Haji Achmad Hasan, Mohammad Asnawi, Mohammad Maran, Abdul Manan, Djaderi, Utut, Burhan Saktor, Anang Basri dan Haji Muradi. Pemberangkatan ke Kalimantan dilakukan pada tanggal 18 November 1945 dari Panarukan dengan menggunakan perahu layar dan tiba Samuda Sampit tanggal 28 November 1945. Selanjutnya mereka ke Marabahan dan Negara. Selain membentuk BPRI, mereka membentuk pemerintahan Republik Indonesia di daerah-daerah yang mereka datang. Pertemuan antara pimpinan PPRI Marabahan dengan rombongan ekspedisi "9 Pelopor" yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 1945 menghasilkan suatu keputusan yang sangat positif yaitu: melebur PPRI Marabahan menjadi "Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia"(BPRI), mengambil alih kekuasaan NICA di Marabahan dan mengadakan hubungan dengan Kesatuan Kelaskaran terutama BPRI

yang bermarkas di Pengambangan (Banjarmasin). Dalam pertemuan itu pula rombongan ekspedisi “9 Pelopor” menyerahkan persenjataan kepada BPRI Marabahan berupa: 6 pucuk senapan panjang tipe 91, 1 peti granat berisi 100 biji dan 1 peti bom bakar.

Ekspedisi I Pimpinan Letnan II Asli Zuchri

Ekspedisi ini dikirim oleh ALRI Divisi IV daerah Kalimantan pimpinan Letnan II Asli Zuchri dan wakilnya Letnan Muda Mursyid, Tujuan ekspedisi adalah Kalimantan Selatan dengan tugas membentuk organisasi ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan dan menyatukan organisasi pejuang yang ada di daerah Kalimantan Selatan ke dalam organisasi ALRI Divisi IV.

Ekspedisi dengan membawa gula sebagai alat penyamaan ini berangkat tanggal 10 Oktober 1946 dari pelabuhan Tuban dan pada tanggal 21 Oktober 1946 berhasil mendarat di desa Tabanio Kalimantan Selatan, dan perahu A.A. Bodja diperintahkan meneruskan pelayaran ke Banjarmasin untuk mencari informasi tentang kedudukan Hassan Basry pimpinan Syaifullah.

Setelah memperoleh informasi dimana kedudukan Hassan Basry, maka Letnan II Asli Zuchri berhasil bertemu dengan Hassan Basry pimpinan Syaifullah pada 11 November 1946 di Tabihi dan selanjutnya dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan.

Ekspedisi II Pimpinan Letnan I Asli Zuchri

Setelah menjalankan tugas dan berhasil pada ekspedisi pertama, Letnan I Asli Zuchri ditugaskan kembali untuk menjalankan tugas ekspedisi kedua dari pelabuhan Probolinggo pada tanggal 25 Juli 1947 dengan menggunakan perahu layar A.A. Bodja, seperti pada pemberangkatan pertama menuju Kalimantan. Rombongan ekspedisi diikuti oleh Letnan Muda M.S. Abdis, Letnan Muda Hilmi, Sersan Mayor M. Husin dan M.Lukman alias Abdurrahman Lubis alias P.Arya.

Ekspedisi kedua ini berhasil mendarat di kampung Bawah Layang dekat Tabanio. Tugas yang dibebankan pada ekspedisi ini ialah menyampaikan beberapa instruksi kepada Komandan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Hassan Basry sehubungan dengan dilancarkan Agresi I Belanda terhadap Republik di Jogjakarta.

Karena kesulitan yang dihadapi untuk memasuki daerah Hulu Sungai, mereka memutuskan untuk kembali ke Jawa. Setibanya di Surabaya, mereka ditangkap kembali oleh tentara Belanda dan dikembalikan ke Banjarmasin untuk di proses oleh Polisi Militer NICA.

Ekspedisi Pimpinan Mustafa Ideham

Ekspedisi ini dikoordinasikan oleh ALRI Divisi IV dipimpin oleh Mustafa Ideham dan A.Rizekin dilakukan pada bulan Oktober 1947. Tugas ekspedisi adalah menyelidiki kekuatan organisasi Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" dan mempersiapkan pangkalan untuk dijadikan pendaratan anggota ALRI Divisi IV dari Jawa. Kedua perahu ini berangkat meninggalkan Tuban menuju daerah Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan rencana semula, Mustafa Ideham mendarat di Bapayung, dan A. Rizekin mendarat di Banjarmasin. Keduanya setelah berkumpul kembali merencanakan untuk menuju daerah Hulu Sungai tempat Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" berkedudukan, tetapi tidak berhasil karena ketatnya penjagaan. Karena gagal menuju Hulu Sungai sesuai dengan tugasnya ialah membentuk pangkalan-pangkalan, selanjutnya menuju Teluk Sebangau di tepi Sungai Mendawai, kemudian ke Kuala Pembuang dan ke Tanjung Puting. Di sinilah mereka berhasil mengobarkan semangat perjuangan dan membentuk pangkalan-pangkalan. Ketika mereka kembali ke Jawa, Markas Besar ALRI Divisi IV sudah pindah ke Madiun, karena situasi yang gawat.

Ekspedisi Pimpinan Kapten Danussaputera

Ekspedisi pimpinan Kapten Danussaputera berangkat dari pelabuhan sebelah timur Tuban pada tanggal 20 Juni 1949, menuju ke arah pulau Salembu, hanyut sampai terdampar kandas di Pantai Takisung tanggal 25 Juni 1949. Rombongan ekspedisi diputuskan dibagi menjadi dua, satu rombongan menuju Balikpapan dan Samarinda, sedangkan Kapten Danussaputera menuju pedalaman Kalimantan Selatan ke arah Hulu Sungai. Pada tanggal 6 Juli 1949 rombongan Danussaputera berangkat menuju Sungai Rasau dari Takisung dan meneruskan berjalan kaki selama 4 hari 4 malam melewati daerah-daerah Banjarmasin, Marabahan, Margasari dan akhirnya Kapten Danussaputera berhasil menemui Letnan Kolonel H.Hassan Basry di kubu pertahanan induk pasukan ALRI Divisi IV di pegunungan Batu Bini di atas Padang Batung.

Selanjutnya Kapten Danussaputera diperbantukan pada Markas ALRI Divisi IV Kemudian diberi tugas sebagai wakil dalam perundingan antar ALRI Divisi IV, NICA dan Misi Militer Republik Indonesia sebagai realisasi dari perintah Presiden tanggal 3 Agustus 1949.

Eldorado

Nama gedung bioskop di Pasar Lama, Banjarmasin. Di bekas lokasi, kini berdiri bangunan baru yang ditempati sejumlah ruko atau eks Bioskop Merdeka.

Pernah menjadi tempat berlangsungnya Kongres Parindra ke-3 tanggal 10-12 Mei 1940. Selain dihadiri anggota Parindra, Surya Wirawan, rapat umum itu juga dihadiri oleh polisi PID, Wedana, dan Komisaris Polisi untuk Kalimantan, di samping banyaknya pengunjung sehingga penuh sesak sampai meluap ke luar gedung. Kongres di gedung itu berakhir ricuh karena dibubarkan pihak Belanda.

Ketika tentara Jepang berkuasa di Banjarmasin, Bioskop Eldorado juga juga diaktifkan kembali dengan nama

Minami Borneo Gekidjo. Sekitar tahun 1950-an, di bekas lokasi bangunan lama oleh pemiliknya (Hoesein Razak) bersama Muhammad Hasyim, dan PGRI didirikan bioskop dengan nama “Bioskop Merdeka”.

Elite Agama

Sering diterjemahkan ke dalam kata “ulama”, mempunyai arti sebagai orang-orang pintar, terkemuka, atau orang-orang terpandang dari kalangan agama khususnya dikaitkan dengan agama Islam.

Europese Lagere School

Sekolah dasar 6 tahun berbahasa pengantar Belanda untuk orang Belanda, orang peranakan atau pribumi yang haknya dipersamakan (*gelijkgesteld*).

Erakan

Sebutan untuk kerja rodi (kerja paksa). Kerja erakan dapat dikenakan kepada setiap orang, kecuali golongan pangreh praja, yang berumur antara 18 s.d. 45 tahun. Rodi bisa terjadi dalam kampung sendiri maupun di luar kampung. Mereka dipaksa membersihkan jalanan, saluran air atau got, jembatan, *tabat* dan *antasan* dan sebagainya. Di luar kampung ia mungkin bekerja sejauh 15 s.d. 30 km dari kampungnya, membuat jalan, memecah batu pengeras jalan dan sebagainya. Bagi yang berada, ia dapat menebus kewajiban kerja rodi ini dengan membayar uang erakan yang diserahkan kepada pangerak-pangerak.

Erfpacht

Hak sewa tanah

E.5. Handuran

Salah seorang tokoh politik. Menjabat sebagai Sekretaris Umum organisasi Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) yang diketuai dr. D.S. Diapari. Sebagai organisasi pro unitarisme, maka dalam menyikapi Persetujuan Linggajati yang salah satu pasalnya adalah menghendaki pembentukan Negara Borneo dalam negara Indonesia Serikat, maka E.S. Handuran bersama A.A. Rivai dan A. Sinaga, atas nama SKI menyampaikan sebuah pernyataan kepada Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta di Jogjakarta berupa dukungan dan kesetiaan SKI terhadap Republik Indonesia bertanggal 20 November 1946.

Exorbitante Rechten

Hak Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang seseorang yang dicurigai tanpa pengadilan.

F

Fajar Minami

Cerita karangan Lamberi Bustani dari kantor penerangan (*Keiming Syidobo*) yang mendapat hadiah nomor satu dari pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan yang mengisahkan keberhasilan pembangunan berkat kerjasama pemuda Jepang dan Indonesia.

Fajar Timur

Majalah bulanan di Banjarmasin di bawah pimpinan Haspan Hadna dan M. Sjaidillah.

Federalisme

Faham yang menganjurkan pembagian negara atas bagian-bagian yang berotonomi penuh mengenai urusan dalam negeri. Federalisme dapat juga diartikan sebagai cita-cita penggabungan negara-negara yang masing-masing memegang kemerdekaannya dalam suatu kebulatan negara (negara serikat atau serikat negara-negara). Pada masa Revolusi Fisik, federalisme pernah digagas dan diperjuangkan oleh Van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sebagai upaya

Belanda untuk memecah belah Indonesia yang terkenal dengan gerakan “separatisme”.

Fort Tatas

Sebuah pulau kecil berupa delta di Banjarmasin yang di atasnya terdapat Benteng Tatas, sebagai pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo. Bekas lokasi Fort Tatas kini ditempati Komplek Masjid Sabilal Muhtadin.

Front ABCD

Merupakan Front America, British, China, dan Dutch, yang ditujukan untuk menghadapi kemungkinan serbuan Jepang ke Selatan sebelum tahun 1941.

Fujin-Kai

Organisasi kaum wanita yang dibentuk Jepang pada bulan Agustus 1945 dalam rangka Nipponisasi. Tujuannya sebagai bagian pengerahan tenaga wanita untuk ikut membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya. Keberadaan organisasi ini berdampak pada pembekuan organisasi kewanitaan yang ada sebelumnya.

Fuku Bun

Wilayah pemerintah pada masa pendudukan Jepang yang serupa dengan Onderdistrict (Kecamatan) pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Fuku Gun dikepalai oleh seorang Fuku Gun-Cho atau Asisten Kiai. Sebuah Fuku Gun meliputi sejumlah Son atau Kampung dipimpin oleh Son-Cho atau Kepala Kampung.

Fuku Gun-Cho

Kepala Fuku Gun. Serupa dengan Asisten Kiai yang mengepalai Onderdistrict pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Fungerend Notari; en Vendumeester

Notaris Berjabatan dan Kepala lelang.

G

Gabungan Politik Indonesia

Disingkat GAPI. Merupakan gabungan partai-partai politik, dengan anggotanya, antara lain: PNI, Parindra, Gerindo, PSII, PII, PTII. GAPI berpusat di Jakarta. GAPI mempunyai cabang-cabang, perwakilan atau komite di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tahun 1939 terdapat kegiatan GAPI di Kalimantan Selatan, yakni ketika PARINDRA membentuk Komite GAPI untuk menyebarluaskan tuntutan Indonesia berparlemen. Di Kandangan, Sekretariat GAPI berada di gedung Parindra, kemudian dipindahkan ke gedung PII jalan Al Musyawarah Kandangan. Anggota GAPI di Kalimantan Selatan antara lain Parindra, Gerindo, PSII, PII, Musyawaratutthalibin, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Mereka bergerak untuk mencapai Indonesia berparlemen.

Gewest Borneo

Sejenis dengan provinsi yang dibentuk berdasar Besluit Gubernur Jenderal (Staatsblad 1938 Nomor 352). Wilayah

Gewest Borneo dibagi dalam dua bagian yakni Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo ibukotanya Banjarmasin, dan Residentie Westerafdeling van Borneo ibukotanya Pontianak.

Provinsi Borneo (*Gewest Borneo*) dengan ibukotanya Banjarmasin dikepalai oleh seorang gubernur, sedangkan tiap-tiap residentie dikepalai oleh seorang residen. Gubernur Gewest yang pertama sekaligus terlahir adalah Dr. B.J. Haga (28 Juni 1937-1942).

Di tingkat Provinsi terdapat satu “masyarakat kelompok” (*groepsgemeenschap*) lengkap dengan dewan perwakilan dan dewan hariannya di bawah pimpinan residen sebagai ketuanya.

Di setiap keresidenan, terdapat berbagai dinas khusus, antara lain pekerjaan umum, kesehatan rakyat, kehewanan, pertanian dan lain-lain, yang masing-masing dipimpin oleh inspektur daerah.

Gemente

Nama daerah otonom yang lahir sebagai implementasi Undang-undang Desentralisasi tahun 1903. Dengan undang-undang itu lahir dewan-dewan lokal, baik dewan keresidenan maupun dewan kota sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak, urusan bangunan-bangunan umum, dan sebagainya. Melalui undang-undang tersebut, kota-kota kemudian menjadi sejenis daerah otonom dengan penyerahan dan penyelenggaraan kekuasaan yang terbatas, dimana masyarakat kulit putih diberi keleluasaan mengatur soal kehidupan kelompok mereka melalui sebuah sosial.

Gemente Bandjermasin

Sebutan untuk Balai Kota Banjarmasin di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dibentuk berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* (Lembaran Negara Hindia Belanda) tahun 1919 nomor 252 tanggal 28 Mei 1919 yang berlaku mulai 1 Juli 1919.

Gementeraad Bandjermasin

Nama Dewan Kota (Dewan Haminte) daerah Banjarmasin. Personalia atau keanggotaan Gementeraad Bandjermasin ada dua kemungkinan yakni ada yang diangkat dan ada pula yang dipilih. Ketika pertama kali dibentuk, personalia Gementeraad Bandjermasin diangkat (*benoemd*) berdasarkan Staatsblad 252 tanggal 1 Juli 1919. Berdasarkan Gouvernements Besluit tanggal 29 Maret 1930 No. 7 untuk pertama kali diadakan pemilihan anggota-anggota Gementeraad. Bandjermasin. Anggota yang terpilih (*verkozen leden*) itu dilantik pada 18 November 1930.

Gerakan Tengkorak Putih

Gerakan Tengkorak Putih, adakalanya disingkat Go Teng Poe. Sebuah kelompok gerilya di Kalimantan Selatan tahun 1949-1950. Dibentuk sekitar Agustus 1949 yakni menjelang perundingan antara pihak ALRI, Misi Militer Republik Indonesia, Belanda, dan UNCI di Munggu Raya, 2 September 1949.

Perjuangan Pasukan Tengkorak Putih lebih banyak mengarah kepada perang psikologis menghadapi Belanda yang seringkali melanggar perintah gencatan senjata (*cease fire*) sebagaimana yang diperintahkan Jenderal Mayor R Suhardjo Hardjowardojo kepada ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan pada pertemuan di Munggu Raya.

Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo

Dibentuk oleh dr. Adnan Kapau Gani pada bulan Mei 1937 di Jakarta. Sedangkan di Kalimantan Selatan partai ini disponsori oleh Haji Busri dan M. Nawawi yang pada tanggal 12 September 1937 berhasil membentuk Pengurus Persiapan Gerindo cabang Birayang dan Barabai tanggal 12 September 1937. Panitia pengurus persiapan ini aktif membentuk ranting-ranting persiapan antara

lain: Rangas, Abung, Cukan Lipai, Wawai, Luk Besar, Kaparkias, Batutangga dan Barabai.

Setelah semuanya dipersiapkan, maka pada permulaan 1938 Gerindo Kalimantan Selatan disahkan berdirinya oleh dr. Adnan Kapau Gani yang datang ke Birayang. Sesuai anggaran dasarnya, Gerindo melaksanakan prinsip koperasi dengan Pemerintah Hindia Belanda.

G. Obus

Putra kelahiran Kalimantan Tengah tahun 1903 ini aktif dalam perjuangan di Jawa. Ia salah seorang putra Kalimantan yang hadir dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan "Sumpah Pemuda". Pemuda Kalimantan lainnya yang hadir adalah Masri. Ketika jatuhnya kekuasaan Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia memasuki Badan Keamanan Rakyat. Kemudian berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan, Ir. Pangeran Mohammad Noor, ia dan teman-temannya mendirikan Badan Pembantu Oesaha Gubernur (BPOG) pada tanggal 2 September 1945 ber Kantor di jalan Embong Tanjung 17 Surabaya dengan G. Obus sebagai ketua dengan dilengkapi Wakil Ketua, Sekretaris, Tata Usaha dan Pembantu. Tugas dari BPOG adalah mempersatukan seluruh putra Kalimantan yang berada di Jawa untuk membantu perjuangan rakyat di Kalimantan, membentuk cabang BPOG di daerah-daerah dan membantu Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor.

Gouvernementen

Gouvernementen atau kesatuan-kesatuan daerah yang kemudian disebut provinsi, lahir sebagai implementasi dari Undang-undang Perubahan (*Bestuurs hervorming-swet*) tahun 1922. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka wilayah Hindia Belanda dibagi-bagi menjadi beberapa provinsi. Mula-mula dibentuk Provinsi Jawa Barat (1926), Jawa Timur (1929) Jawa Tengah (1930). Selain itu, pada tahun 1926 juga dibentuk Provinsi

Maluku, tetapi kemudian mengalami kegagalan. Baru kemudian melalui Besluit Gubernur Jenderal (Staatsblad 1938 Nomor 264) terhitung 1 Juli 1938 diadakan lagi tiga provinsi atau *eilandgewest*, ialah Sumatera, Borneo (Kalimantan), dan Timur Besar (*Groote Oost*) dengan berturut-turut ibukotanya Medan, Banjarmasin, Makassar.

Gouverneur Generaal

Gouverneur Generaal (Gubernur Jenderal) disingkat GG (orang Banjar mengejanya “hi hi”) merupakan jabatan Kepala Pemerintahan Tertinggi di Hindia Belanda yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat 2 Undang-undang Dasar Nederland (*Nederlandse Grondwet*) tahun 1814.

Gubernur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh dan terhadap pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Raja melalui Menteri Urusan Daerah Jajahan (*Minister van Kolonien*). Artinya kepada Menteri Urusan Jajahan, ia memberikan segala keterangan yang diminta tentang pemerintahan tersebut. Gubernur Jenderal harus seorang warga negara Belanda dan berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun. Disamping itu, Gubernur Jenderal menjabat Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut.

Ia mengangkat dan memberhentikan opsir angkatan darat, kecuali pengangkatan komandannya, pemberian pangkat dan pemberhentian opsir-opsir tinggi yang dilakukan oleh raja. Atas persetujuan *Raad van Indie* ia juga dapat menyatakan keadaan darurat perang di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh sebuah Dewan Hindia Belanda yang memberikan nasihat kepadanya, sebuah sekretariat (*Algemeene Secretarie*) yang bertugas seperti kabinet dan sejumlah departemen.

Gouverneur

Nama kepala daerah di gewest (provinsi) misalnya Gewest Borneo. *Gouverneur* pertama dan sekaligus

terakhir bagi Provinsi Borneo adalah Dr. B.J. Haga yang memegang kekuasaan tanggal 28 Juni 1937 sampai dengan 1942.

Gubernemen

Asal kata Gouvernement atau Pemerintahan.

Gun

Wilayah pemerintah pada masa pendudukan Jepang yang serupa dengan District (Kabupaten) pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Gun-cho

Kepala Gun. Serupa dengan Kiai atau Kiai Kepala yang mengepalai District pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

H

Hadhariyah M

Tokoh pejuang kemerdekaan di bidang politik. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda menjabat Ketua Partai Indonesia Raya (Parindra) Cabang Banjarmasin, dan kemudian Komisaris Pengurus Besar Parindra daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menggantikan Merah Johansyah, ketua Majelis Luhur Taman Siswa di Banjarmasin yang mengundang Ki Hajar Dewantara dan isteri selaku tokoh utama Majelis Luhur Taman Siswa ke Banjarmasin.

Karena tulisan-tulisan politiknya yang tajam, maka ia dinilai oleh Pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin sebagai seorang "*Hollander Hater*" (Pembenci Belanda). Ia pernah menjadi korban delik bicara dalam suatu rapat umum Parindra di Barabai dengan tuntutan melanggar pasal 151 bis dari *Wetboek van Strafrecht* Pemerintah Hindia Belanda dan dianjar hukuman penjara selama 3 bulan dan membayar denda f. 100.

Tanggal 17 Juni 1941 ia kembali ditangkap dan didakwa melanggar pasal-pasal 156, 157, dan 193 bis/ter *Wetboek*

van Straafrecht (KUHP), karena telah menulis sebuah roman politik yang berjudul SUASANA KALIMANTAN dan diterbitkan di Medan dengan judul "*Tersungkur Di Bawah Kaki Ibu*". Pada tanggal 1 Februari 1942 Hadhariyah M menjalani kehidupan 4 tahun penjara, setelah upaya naik bandingnya ditolak oleh *Raad van Justitie* di Surabaya.

Pernah menjadi guru sekolah rakyat di Pangkalan Bun dan Alabio, *Hoofdredacteur* mingguan "Bendahara Borneo" Samarindra, *Hoofdredacteur* "Utusan Kalimantan" Banjarmasin, Kepala Kelaskaran BPRI, *Hoofdredacteur* "Indonesia Merdeka. Setelah ikut dalam pemberontakan 9 November 1945 di Banjarmasin, maka Hadhariyah M termasuk orang yang paling dicari Belanda. Oleh pemerintah NICA akan diberikan hadiah f.1000 (seribu gulden/rupiah) bagi yang menangkapnya hidup atau mati. Hadhariyah M menyeberang ke Pulau Jawa dan berhasil mendarat di pantai Tuban Jawa Timur pada bulan Juni 1946. Namun sesampai di sana ia kembali ditangkap, diinterogasi sebagaimana lazimnya dilakukan terhadap para pendatang dari seberang. Setelah dibebaskan atas bantuan Gubernur Kalimantan, Ir. Pangeran Mohammad Noor, ia kemudian bergabung ke dalam badan perjuangan yang didirikan oleh pemuda-pemuda asal Kalimantan di Pulau Jawa.

Handel

Serikat dagang yang didirikan orang Alabio dalam jual beli karet rakyat Hulu Sungai untuk memutus rantai monopoli orang China dalam perdagangan.

Hashimoto

Seorang warga Jepang di Kalimantan Selatan yang berprofesi sebagai tukang potret (*photografer*) sekaligus bertugas sebagai mata-mata atau spionase bagi negerinya guna melancarkan rencana ekspansi Jepang di kemudian hari. Ketika dipanggil pulang ke negerinya tahun 1940, Hashimoto menitipkan peralatan kameranya

kepada Abdul Muis di Barabai yang telah diajarinya memotret. Dengan keterampilan memotret itulah Abdul Muis yang kemudian menjadi juru potret ANEK mendokumentasikan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan kebangsaan, kedatangan Jepang, dan perang kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

Hassan Basry

Dikenal sebagai Bapak Gerilya Kalimantan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/TK Tahun 2001, tanggal 3 November 2001. Hassan Basry dilahirkan di Padang Batung, Kandangan 17 Juni 1923. Pendidikannya *Volkschool* Padang Batung 1929-1932, HIS Kandangan 1940-1942, Tsanawiyah Al Wathaniyah Kandangan 1940-1942, *Kweekschool* Islam Pondok Modern Gontor Ponorogo 1942-1945, Al Azhar University 1951-1953, *American University* 1953-1955 dan SSKAD Bandung 1956. Pada masa perjuangan ia merupakan aktivis PRI di Surabaya 1945, kemudian menyeberang ke Kalsel sebagai pemimpin Lasykar Syaifullah Haruyan 1946, pemimpin Banteng Indonesia 1946, dan Komandan Batalyon ALRI Divisi IV "A" Pertahanan Kalimantan 1946. Ia mengembara sebagai ekstremis buronan di hutan-hutan Kalimantan. Namanya paling dibenci, tapi juga ditakuti Belanda, dan disegani pengikut-pengikutnya. Ia dipandang sebagai biangkeladi ekstremis paling berbahaya di kawasan ini. Namun oleh rakyat ia adalah "Bapak Gerilya" yang paling dicintai dan berkharisma pada zamannya. Ia adalah Pimpinan Umum/Komandan/Panglima/ Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Di tahun 1948-1949, ia berhasil memimpin perlawanan bersenjata sehingga pasukannya dapat menguasai sebagian besar wilayah teritorial di Kalimantan Selatan minus kota-kota yang masih diduduki NICA.

Pada tanggal 17 Mei 1949 Hassan Basry atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memproklamasikan

Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguasaan para gerilyawan itu akhirnya memaksa Belanda meminta bantuan pihak militer Republik dan UNCI sebagai penengah dalam perundingan dengan pihak ALRI Divisi IV. Perundingan pertama kali antara ALRI Divisi IV yang diwakili Hassan Basry dengan pihak Belanda yang ditengahi Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo dari misi militer Republik dan UNCI berlangsung pada tanggal 2 September 1949 di Munggu Raya Kandangan. Selanjutnya setelah melalui beberapa pertemuan, perundingan resmi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh misi militer Republik dan UNCI tanggal 16/17 Oktober 1949 menghasilkan kesepakatan penghentian permusuhan secara resmi di Kalimantan Selatan.

Pada masa Orde Lama, Hassan Basry merupakan tokoh yang teguh pendiriannya dalam menentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Bersama Letnan Kolonel M. Yusi dan Gubernur H. Maksid dan didukung oleh masyarakat Kalsel yang agamis, ia dikenal sebagai tiga serangkai yang solid menentang Komunisme. Selaku Penguasa Perang Daerah (Peperda) Kalimantan Selatan, Hassan Basry mengeluarkan keputusan untuk sementara melarang kegiatan Partai Komunis Indonesia dalam Daerah Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan No. 140/S/K.P./tahun 1960 yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1960. Sikap Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan ini diikuti oleh Daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, walaupun dua daerah ini tidak secara konkrit menuangkannya dalam Surat Keputusan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan PERISTIWA TIGA SELATAN.

Hassan Basry meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada tanggal 15 Juli 1984, dan keesokan harinya dimakamkan di Simpang Tiga desa Liang Anggang Km. 25 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Heiho

Heiho adalah pembantu prajurit dalam beberapa angkatan yang dilatih secara militer, mempunyai hierarki kemiliteran sendiri, dan dibentuk untuk bertempur menghadapi musuh. Di Kalimantan Selatan terdapat Kaigun Heiho (Heiho Angkatan Laut) yang ikut terlibat dalam pertempuran di Balikpapan.

Het Leesgezelschap

Diartikan sebagai Taman Bacaan yakni tempat per kumpulan pembaca antara lain diselenggarakan oleh organisasi Srie pada tahun 1923, atau yang didirikan oleh Persatoean Pemoeda Marabahan (PPM) di tahun 1929 dengan nama *Family Bond*. Taman bacaan mempunyai fungsi lain yakni sebagai *study club* untuk bersama mempelajari politik dan tipu muslihat penjajahan Belanda.

His Master's Voice

Julukan yang ditujukan kepada para para Eigenaar atau orang-orang kaya di desa. Perilaku para eigenaar yang kebelanda-belandaan mengakibatkan mereka diberi julukan *His Master's Voice* yang artinya “suara majikan”.

HIS Partikelir

Nama Belandanya *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) atau HIS swasta/sekolah dasar swasta. Misalnya PHIS di Pasar Lama Banjarmasin dan PHIS di Rumah Bulat Marabahan.

Hizbul Wathan

Sebuah organisasi kepanduan yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1918. Hizbul Wathan berarti Pencinta Tanah Air.

H.M. Arip

H.M. Arip atau H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai) adalah seorang putera Bakumpai (kini Marabahan, Kabupaten Barito Kuala). Profesi kesehariannya adalah pedagang yang pulang pergi Banjarmasin-Surabaya. Namun, karena profesi itulah ia memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan hubungan dengan dunia luar, melakukan kontak-kontak dengan tokoh-tokoh pergerakan di tanah Jawa dan melihat kemajuan pergerakan di daerah lain, sehingga ketika kembali ke kampung halaman turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan di daerah ini. Ia adalah pembawa organisasi Sarekat Islam ke Kalimantan Selatan. Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Atas saran Vorzitter Central Sarekat Islam, OS Cokroaminoto agar mendirikan cabang SI di Kalimantan, maka H.M. Arip bersama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, mendirikan SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan. Sehingga kemudian pada tahun 1914 Sarekat Islam berdiri di Banjarmasin dan mendapat pengakuan badan hukum (rechtspersoon) dengan besluit Gubernur Jenderal Nomor 33 tanggal 30 September 1914. Dari Banjarmasin, SI berkembang di beberapa kota di Kalimantan Selatan. Di Marabahan, atas dorongan H.M. Arip telah pula berdiri HIS Swasta yang dikelola oleh Sarekat Islam dan di kemudian hari nantinya menjadi Perguruan Taman Siswa. Peran H.M. Arip terukir pula pada saat dibentuknya Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) pada tanggal 1 Maret 1929 yang mana ia berperan pelindungnya. Ketika PPM memperluas tujuan dan ruang geraknya dengan mensponsori berdirinya Sarekat Kalimantan pada tahun 1930, maka H.M. Arip kembali berperan sebagai Pedoman Besarnya. Sebagai hasil keputusan kongres Sarekat Kalimantan yang ke-2 tahun 1931 di Barabai, maka dibentuk Barisan Indonesia (BINDO). BINDO merupakan organisasi lokal pertama yang berasaskan kebangsaan dan non-

cooperatif yang dibentuk atas inisiatif para putera daerah Kalimantan Selatan. Dalam organisasi ini H.M. Arip berkedudukan sebagai pedoman besarnya. H. M. Arip pernah pula menjadi pelindung cabang PNI Pendidikan di Marabahan pada tahun 1932. Keberadaan Perguruan Taman Siswa di Kalimantan Selatan juga tidak terlepas dari peran H.M. Arip. Mula-mula Taman Siswa berdiri di Marabahan dan kemudian di Banjarmasin dan Barabai. Cikal bakal lahirnya Taman Siswa bermula dari *Particuliere Hollands Inlandse School (PHIS)* atau HIS Swasta pada tahun 1929 yang didirikan pemuda Marabahan dan dikelola oleh Sarekat Islam yang nota bene dibidani oleh H.M. Arip. H.M. Arip terus berkiprah dalam menanamkan semangat kebangsaan di kalangan bumiputera. Ia tidak hanya berperan dalam kepengurusan organisasi, namun juga terjun langsung sebagai guru, sebagaimana ia lakoni sebagai guru kursus dan sekolah *Neutralschool* di Birayang yang dikelola Parindra Cabang Birayang.

Hoesein Razak

Dikenal sebagai salah seorang tokoh Parindra dan juga pembina ROEPELIN (Rukun Pelayaran Indonesia) yang memasok barang dagangan dari Jawa ke Banjarmasin. Bersama A. Zakaria, ia menerbitkan majalah Suara *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC) yang kemudian menjadi Majalah Perintis, terbit di Banjarmasin. Pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949, ia aktif dalam partai SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia), dan memasok logistik untuk para pejuang gerilya. Di tahun 1950-an, ia salah seorang pendiri Bioskop Merdeka, sebagai nama pengganti bioskop Minami Borneo Gekidjo (masa pendudukan Jepang), atau bioskop Eldorado (masa pemerintahan Hindia Belanda). Ia mempunyai semangat juang tinggi dan tak kenal menyerah, meski beberapa kali dipenjarakan Belanda. Semangat juangnya antara lain tercermin dari nama anak-anaknya, yakni Pasti

Merdeka (anak pertama), Basry Sukanda
Bratamenggala (anak kedua).

Holland; Inlandse School atau HIS

Sekolah negeri untuk pribumi dengan lama pendidikan tujuh tahun. Dari kelas I sampai dengan kelas III masih menggunakan pengantar bahasa Melayu di samping bahasa Belanda, kelas IV sampai dengan kelas VII menggunakan bahasa Belanda.

Yang bersekolah di HIS ini adalah anak-anak dari masyarakat Kategori A yakni para kaum bangsawan, pejabat tinggi serta pengusaha kaya yang berpenghasilan bersih di atas 75 gulden sebulan, dan Kategori B yakni orang tua yang memperoleh pendidikan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan *Kweekschool* ke atas, serta anak dari pegawai pemerintah yang berpangkat minimal Asisten Wedana.

Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS, murid yang pintar dan mempunyai orang tua mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO, sekolah lanjutan pertama, dan dari sini terus ke AMS (*Algemene Middelbare School*). Jika nasibnya baik, ia dapat melanjutkan ke sekolah tinggi, di Pulau Jawa atau Eropa.

Holland; Chinese School atau HCS

Sekolah Dasar Cina 6 tahun yang memakai bahasa Belanda.

Hoofd van Plaatselijke Bestuur atau HPB

Kepala Pemerintahan setempat, bisa berupa kepala Onderafdeling yakni Controleur atau Kepala Distrik yakni Kiai. Mereka merupakan perpanjangan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Huur

Hak sewa tanah atas perjanjian.

Hutsu Co Gakko

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengganti MULO, terdapat di Banjarmasin dan Barabai.

Hutsu Kogakko

Sekolah Rakyat (SR) 3 tahun.

Hutsu Djikyū Kogakko

Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun.

Hutsu Tju-Gakko

Sekolah Menengah Pertama (pengganti MULO).

I**Ikatan Perjuangan Kalimantan**

Organisasi perjuangan kemerdekaan di Pulau Jawa yang dibentuk oleh para pejuang asal Kalimantan. Organisasi ini menentang federalisme dan menyokong negara kesatuan. Melalui Konferensi Darurat Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) tanggal 15-17 Februari 1948, organisasi ini antara lain menyatakan: (1) merasa kecewa terhadap hasil perundingan di Renville; (2) Tetap bercita-cita mewujudkan Negara Kesatuan; (3) Tetap menuntut plebisit di seluruh Indonesia; (4) Berjuang memperkuat Republik Indonesia sebagai modal meneruskan perjuangan dan untuk itu mendesak supaya secepat mungkin terbentuk satu kabinet yang kuat yang memperjuangkan selanjutnya kemerdekaan yang bulat meliputi seluruh Indonesia

Imperialisme

Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Imperialisme dapat bermula dari usaha pemerintah kolonial yang mempunyai koloni-koloni di lain-lain daerah dan berusaha menyatukan koloninya menjadi satu sistem penguasaan.

Indirect Bestuur

Pemerintahan tak langsung. Rakyat diperintah oleh atasan dari bangsanya sendiri, tetapi atasannya tersebut didampingi pula oleh pegawai-pegawai kulit putih. Misalnya Kepala District atau Onderdistrict yang dipimpin oleh bumiputera berpangkat Kiai atau Asisten Kiai mempunyai atasan pegawai kulit putih berpangkat Controleur.

Indisch Staatsblad

Disingkat Ind. Stb. atau Lembaran Negara Hindia Belanda.

Indonesia Merdeka, Surat Kabar

Surat kabar pengganti nama “Soeara Kalimantan”, yakni ketika surat kabar Soeara Kalimantan dipimpin oleh Merah Ardansyah dan Gusti A. Soegian Noor. Selanjutnya sesuai dengan nama Indonesia Merdeka, maka akhirnya media massa ini merubah sikap dari menyuarakan kepentingan NICA menjadi bersikap nasionalis. Bahkan kemudian lebih dikenal sebagai surat kabar Partai Nasional Indonesia. Surat kabar tersebut tetap terbit hingga sekarang ini beralamat di jalan Masjid Jami Banjarmasin.

Indra Buana

Didirikan pada tahun 1906 sebagai nama baru atau kelanjutan dari Budi Sempurna. Kecuali nama yang berbeda, tujuan, keanggotaan dan struktur organisasi

Indra Buana sama dengan Budi Sempurna. Perubahan nama itu ternyata tidak banyak memberikan manfaat terhadap kelangsungan organisasi karena timbul perselisihan-perselisihan diantara anggota-anggotanya. Sebagai akibatnya maka pada tahun 1907 Indra Buana dibubarkan secara resmi oleh pengurusnya.

Ingezezenin van Nederland;ch Indie

Penduduk Hindia Belanda.

Inheemse

Sebutan yang dikenakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi Indonesia, bersifat merendahkan dan diskriminatif serta lebih rendah dibanding inlander. Seperti dikatakan oleh Prof. J. Van Gelderen dalam bukunya *Voorlezingen over koloniale Staatshuishoudkunde* bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa dari kuli-kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa (*Een Natie van Koelies en Koelies onder de Naties*).

Inkomstenbelasting

Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap rakyat oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun Gementeraad. Misalnya Pemerintah mengenakan pungutan 30% Opcenten, sedangkan Gementeraad Bandjermasin mengenakan pungutan 10% Opcenten yang kesemuanya memberatkan rakyat.

Inlander

Sebutan yang dikenakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi Indonesia. Istilah inlander sesungguhnya bersifat merendahkan sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kalangan bumiputera Belanda.

Internering

Hak Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memaksa seseorang untuk bertempat tinggal di satu tempat tertentu yang ditunjuk dan dilarang untuk meninggalkan tempat tersebut. Tindakan internering pernah dilakukan Belanda terhadap Marjono dan Sunaryo, guru PHIS (*Particuliere Hollands Inlandse School*) di Marabahan. Mereka “dianggap berbahaya untuk keamanan umum” sehingga dibuang ke Boven Digul.

Invoerrechten

Bea masuk (impor).

Islam Berjuang, Majalah

Terbit tahun 1946 di bawah pimpinan Darmawi Sarudji. Karena dianggap berbahaya oleh pemerintah NICA, maka penerbitan media massa ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Sedangkan masing-masing pemimpin redaksinya ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, maka dengan sendirinya kegiatan penerbitan media massa tersebut berhenti.

Islamsche School

Semula bernama Arabische School atau Sekolah Arab berlokasi di Kampung Bugis, namun setelah pimpinan sekolah dijabat Saleh Bal'ala, maka nama Arabische School diganti namanya menjadi *Islamsche School*. Sekolah ini punya peranan penting sebagai peletak pertama pembaharuan Islam di daerah ini, karena alumninya kemudian menjadi ulama dan pemimpin organisasi Muhammadiyah. Atau kalau tidak menjadi anggota Muhammadiyah, sekurang-kurangnya menjadi ulama yang berpikiran maju.

J

Jakarta Dalam

Nama samaran untuk Markas Daerah MTKI Daerah Banjar yang dibentuk saat organisasi itu dipimpin A. Rustam (Guru Alwi). Nama lengkapnya “Pendalaman Jakarta Dalam”. Lokasinya berada di dalam Hutan Guntung Papuyu.

Pendalaman Jakarta Dalam berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pejuang, tempat persembunyian dan latihan militer, dan tempat eksekusi mata-mata musuh.

Janji November

Janji dari Pemerintah Hindia Belanda untuk merubah Volksraad menjadi Badan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan penuh membuat Undang-Undang, mengganti Kepala Departemen dengan

Menteri-Menteri yang bertanggung jawab penuh pada dewan, serta ikut serta menentukan Anggaran Belanja Negara.

Java Bode

Nama surat kabar Belanda dari Jawa yang banyak dibaca di Banjarmasin.

Java Centris

Pandangan yang terpusat pada Jawa.

Jeugd Oefen Corps atau JOC

Jeugd Oefen Corps merupakan sebuah milisi bagian dari *Stadswacht* yang beranggotakan siswa-siswa dari sekolah MULO Banjarmasin. *Stadswacht* dipimpin oleh J.A.T. Van Walsem, guru sejarah pada sekolah MULO yang dalam milisi berpangkat *kapiten*.

K

Kaigun

Tentara Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar. Tentara ini datang di Kalimantan Selatan dari arah tenggara yakni dengan kapal laut mendarat di Jorong, Pelaihari, dan tiba di Banjarmasin tanggal 13 Februari 1942. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan menyebut Angkatan Laut atau Kaigun “Cap Jangkar”.

Kalimantan Berdjuang

Nama surat kabar republikan pada masa perang kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan. Dalam beberapa edisi penerbitan adakalanya ditulis “Kalimantan Berdjoang” disingkat Ka-Be. Pelopornya adalah orang-orang dari surat kabar Sinar Hoeloe Soengai dan Majalah Republik, seperti Abdoel Djabar dan Haspan Hadna.

Tanggal penerbitan pertama Harian Kalimantan Berjuang adalah 1 Oktober 1946 beralamat di jalan Musyawarah Kandangan. Setelah kurang lebih berjalan 3 bulan, media massa ini dipindahkan ke Banjarmasin berkantor di suatu ruangan bagian depan Hotel Noor di jalan Emmastraat (kini simpang empat Kertak Baru/jalan Pangeran Samudera dan sekarang di bekas lokasi Hotel Noor berdiri gedung kantor pengadilan).

Ketika masih terbit di Kandangan, oplah atau tiras harian ini sudah mencapai 500 hingga 750 lembar per hari, maka sesudah pindah ke Banjarmasin tirasnya meningkat menjadi 3.500 lembar perhari.

Surat kabar ini dikenal sebagai pendukung penuh (baca: terompet) perjuangan gerilya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, sehingga sejak pertama kali terbit selalu diawasi dengan ketat oleh mata-mata NICA. Bahkan setelah beberapa hari terbit, A.Djabar selaku pimpinan umum dipanggil dan mendapat peringatan keras dari Merah Nadalsyah Kiai Besar Afdeling Hulu Sungai.

Sebagai harian republikan, harian Kalimantan Berjuang menyaingi dan mengimbangi berita-berita dua harian yang diterbitkan oleh NICA di Banjarmasin. Pertama, "Soeara Kalimantan" (bukan kelanjutan dari harian dengan nama yang sama terbit tahun 1930 dipimpin A.A. Hamidhan yang dalam tahun 1945 menjadi anggota PPKI). Kedua, harian berbahasa Belanda Dagblad "Borneo Post".

Dalam tahun 1947 pendukung harian ini bertambah kuat dengan masuknya Adonis Samat (yang berhenti sebagai Pimpinan Redaksi Sinar Hoeloe Soengai dengan seizin Merah Danil Bangsawan). Kemudian pada sekitar bulan Mei 1947 Adonis Samat diangkat menjadi pimpinan redaksi Kalimantan Berjuang. Haspan Hadna yang sebelumnya memegang jabatan pemimpin redaksi kemudian bertindak sebagai pemimpin perusahaan. Sedangkan wartawannya adalah Mustafa, Zainal dan Arthum Artha.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948, pemerintah NICA melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang dan tokoh-tokoh pers termasuk PU/Pemimpin Perusahaan Harian Kalimantan Berdjung Haspan Hadna, Pemred Adonis Samat dan Kepala TU Abdoel Djabar. Sehubungan dengan ditahannya pimpinan Kalimantan Berdjung, maka demi terbitnya harian ini, diangkatlah Zainal sebagai Pgs. Pemimpin Redaksi dibantu anggota redaksi Artum Artha, Mustafa, dan Sjamsi Widnin (pembuat karikatur), sehingga keesokan harinya tanggal 20 Desember 1948 sore harian ini tetap terbit seperti biasa, dan isinya mendapat perhatian masyarakat, serta pengecernya dikejar-kejar oleh pihak polisi NICA.

Tanggal 21 Desember 1948, mesin stensil besar pencetak harian ini bersama sheet-sheet stensil terbitan tanggal 20 Desember itu disita dari kantor harian Kalimantan Berdjung di jalan Emmastraat dan diangkut ke kantor polisi NICA di jalan Jawa (kini jalan D.I. Panjaitan). Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Kalimantan Berdjung diizinkan terus terbit dengan syarat berita yang dimuat harus melalui sensor *Regeerings Voorlichting Dienst* (RVD) NICA. Meski dengan hati yang pedih, karena harus melalui sensor, redaksi Kalimantan Berdjung mencoba mengambil taktik “mengakali” sensor tersebut sehingga beritanya tetap menguntungkan perjuangan kemerdekaan.

Memasuki tahun 1949 Harian Kalimantan Berdjung diperkuat dengan masuknya tokoh pers perjuangan lainnya, yakni Yusni Antemas dan Zafry Zamzam. Pada penerbitan Kalimantan Berdjung edisi Djumat, 11 Nopember 1949 tertulis bahwa Ketua Umum: Haspan Hadna, Ketua Redaksi: Zafry Zamzam, Tata Usaha: Abdoel Djabar. Alamat redaksi: Kertak Baru 133 Banjarmasin Telepon No. 131. Zafry Zamzam kemudian disertai jabatan sebagai Pemimpin Redaksi yang ditinggalkan Adonis Samat, karena yang bersangkutan bergabung dalam barisan perjuangan bersenjata.

Kalimantan Raya

Merupakan surat kabar yang didirikan oleh A.A. Hamidhan atas perintah penguasa Jepang di Banjarmasin. Terbit pertama kali awal bulan Maret 1942 dengan nama “Kalimantan Raya” (bukan “Kalimantan Raja”). Nama ini dipilih A.A. Hamidhan, karena menurutnya Pemerintah Jepang bukan hanya menduduki daerah Kalimantan yang tadinya dikuasai oleh Belanda, tetapi juga meliputi daerah Serawak, Brunai dan Sandakan yang dulunya dikuasai Inggris. Penjelasan atau keterangan di atas dapat diterima oleh pemerintah Jepang. Dalam Kalimantan Raya edisi Rabu 4 Nopember 1942 tertulis bahwa yang menjadi kuasa umum adalah E. Kato, pemimpin redaksi A.A. Hamidhan, redaktur warta kawat M. Sj. Ariefin. Penerbitnya Borneo Kaigoen Minseibu. Terbit setiap hari kecuali hari yang dibesarkan. Alamat redaksi dan administrasi Jatijjo Dori – Tilpon No. 21 Bandjermasin. Harga langganan F.1.50 sekewartal. Harga eceran 2½ sen selembarnya. Penerbitan Kalimantan Raya berakhir ketika surat kabar ini dilebur menjadi surat kabar Borneo Simboen.

Kandangan

Kandangan merupakan ibukota Afdeling Hulu Sungai dipimpin seorang Assistent Resident, dengan beberapa perangkatnya, antara lain: Detachement Commandant Koninklijk Nederlands Indische Leger van de Afdeling Hulu Sungai, Veld Politie Centraal van de Afdeling Hulu Sungai, Departement Financien van de Hulu Sungai, dan tempat kedudukan kepala pemerintahan Onderafdeling atau Hoofd van Plaatselijk Bestuur.

Pada masa revolusi fisik dikenal sebagai kota perjuangan, karena di daerah ini menjadi tempat dikumandangkannya Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan tanggal 17 Mei 1949 yang isinya menyatakan Kalimantan Sebagai Bagian dari Republik Indonesia.

Kanda

Pejabat tertinggi di Kandangan yang memberitahukan kepada tokoh pergerakan di Kandangan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita itu disampaikannya sambil menangis.

Kapitain der Arabieren

Kepala Kampung orang-orang Arab.

Kasen Ongkookai Kabushiki Kaisha

Perseroan terbatas milik Jepang untuk urusan pengangkutan sungai.

Kaum Muda dan Kaum Tua

Istilah “Kaum Muda” yang diidentifikasi kepada organisasi Muhammadiyah dan istilah “Kaum Tua” yang memegang teguh aliran lama, muncul pertama kali di Alabio pada saat terjadi perdebatan antara ulama pembaharu dengan ulama berfaham lama di *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* Amuntai tahun 1926.

Perselisihan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua diantaranya adalah menyangkut soal tahyul, khurafat dan bid'ah juga menyangkut masalah yang berkenaan dengan soal ushalli, qunut, talkin, haul kematian, azan jumat dan sebagainya.

Kedaulatan, Mingguan

Terbit di Banjarmasin di bawah pimpinan Fachrudin Mohani dan Masdari. Media cetak yang lahir pada tahun 1946 ini terbit tiga kali seminggu. Semangat perjuangan yang disuarakannya, menyebabkan mingguan Kedaulatan ini hanya dapat berjalan beberapa bulan saja.

Keiming Syidobo

Kantor Penerangan pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin. Kantor ini dalam tugasnya banyak menggunakan media kebudayaan, seperti seni lukis, seni drama, seni sastra, dan segala jenis kesenian lainnya untuk kepentingan Nipponisasi.

Ken Kyoso Kabushiki Kaisha

Perseroan terbatas milik Jepang untuk penelitian dan pengadaan obat-obatan.

Kepala Hutan

Jabatan non formal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas membantu pembakal mengepalai sebuah hutan. Ia bertugas mengukur batas-batas hutan yang masuk hutan garapan, mengawasi hutan, rimba, kebun dan sebagainya.

Kepala Padang

Jabatan non formal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas membantu pembakal dengan tugas membagi tanah hutan yang akan dibuka oleh peminat baru atau mengklasifikasikan tanah untuk menilai iuran pajak tanah yang harus dibayarkan.

Kepala Sungai

Jabatan non formal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang bertugas membantu pembakal dalam hal mengawasi kebersihan sungai supaya dapat dilalui, membuat tabat-tabat baru untuk menaikkan air ke sawah, memungut hasil pedalaman yang keluar melalui sungai tersebut.

Kepanduan Bangsa Indonesia

Nama organisasi kepanduan sebagai wadah untuk menanamkan rasa kebangsaan dan membebaskan anak-anak pribumi dari perasaan takut dan kebodohan. Di Kalimantan Selatan. Kepanduan Bangsa Indonesia

(KBI) berasal dari peleburan organisasi kepanduan sebelumnya yakni *Borneo Padvinder Organisatie*.

Kesadaran Nasional

Kesadaran nasional Indonesia merupakan suatu perasaan yang muncul di kalangan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah dan keinginan lepas dari penjajahan yang didorong oleh persamaan nasib dan sejarah dan keinginan hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) sebagai suatu bangsa dalam satu wadah negara kesatuan.

Selain didorong oleh dampak dari penjajahan, kesadaran nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di Asia, antara lain kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia; Gerakan Turki Muda di bawah pimpinan Mustapa Kemal Pasha; Pemberontakan di Cina di bawah pimpinan dr. Sun Yat Sen; gerakan cita-cita kemerdekaan di India yang dipelopori Mahatma Gandhi.

Keresidenan Borneo Selatan

Keresidenan Borneo Selatan (*Residentie van Zuid-Borneo*) dengan ibukotanya Banjarmasin merupakan sebuah keresidenan di bawah pemerintahan NICA yang dibentuk berdasarkan Staatsblaad 1945 Nomor 64 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1946. Wilayah keresidenan Borneo Selatan meliputi daerah provinsi Kalimantan Selatan sekarang (37.660 km²) dan ditambah dengan daerah Provinsi Kalimantan Tengah sekarang (152.600 km²) sehingga berjumlah 190.260 km².

Kiai

Dahulu, kiai di Kalimantan Selatan bukanlah ulama agama Islam, melainkan gelar pangkat/jabatan menteri di masa Kesultanan Banjarmasin yang dipakai Belanda

sebagai gelar jabatan dalam struktur pemerintahannya, yakni sebagai kepala distrik.

Menurut Amir Hasan Kiai Bondan dalam bukunya Suluh Sedjarah Kalimantan, asal ada nama Kiai di Kalimantan Selatan bermula sejak abad ke-16 setelah Pangeran Samudera di Islamkan oleh Khatib Dayan dan setelah itu diresmikanlah nama Kiai oleh pemerintah Kerajaan Banjar sebagai nama pangkat dari para pembesar yang diserahkan menjalankan pemerintahan di lingkungan kerajaan.

Ketika itu, syarat menjadi Kiai adalah berpengetahuan tentang hukum agama Islam, cakap dan bijaksana menjalankan pemerintahan. Setelah Pemerintah Hindia Belanda berkuasa menyusul jatuhnya Kerajaan Banjar, maka gelar Kiai tetap dipakai Belanda sebagai gelar jabatan dalam struktur pemerintahannya, namun syarat Kiai Belanda tidak diharuskan berpengetahuan tentang hukum agama Islam, cukup kalau pandai menjalankan pemerintahan.

Di masa pendudukan NICA di Kalimantan Selatan, pangkat kiai tertinggi disebut sebagai “Kiai Besar” yang kedudukannya dalam pemerintahan sejajar dengan Asisten Residen, misalnya Kiai Besar Merah Nadalsyah di Afdeling Hulu Sungai.

Kinrohosi

Mobilisasi atau gerakan pengerahan massa untuk kerja bakti pada sebuah pekerjaan yang ditentukan Jepang. Meski tidak disebut pekerjaannya sebagai romusha, perlakuan terhadap pekerja Kinrohosi tidak ada bedanya dengan kerja paksa (romusha). Pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga Kinrohosi ini ialah : memperbaiki lapangan terbang Ulin, lapangan terbang Maluka di Pelaihari, lapangan terbang di Kandris daerah Dayu Ampah, membuat perlindungan di daerah lapangan terbang Ulin, Pelaihari, membuat bendungan untuk pengairan menggali sungai untuk pengairan sawah atau

untuk sawah pasang surut, membuat bangunan bagi tukang.

Kogyo Djitsumo Gakko

Sekolah Teknik 2 tahun.

Konan Kaiyoon Kabushiki Kaisha

Perseroan terbatas milik Jepang untuk urusan pengangkutan laut.

Konan Hokoku Dan

Gerakan pemuda yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang. Anggotanya pemuda berumur 20 tahun sampai 35 tahun, dari tiap Fuku Gun atau Sotai atau Seksi dan dipusatkan pada Gun atau Bandjermasin Syi.

Koninklijke Nederland; Indische Leger atau KNIL

Tentara Kerajaan di Hindia Belanda. Anggotanya kebanyakan berasal dari orang pribumi Indonesia.

Kolonialisme

Kolonialisme adalah faham tentang penguasaan oleh suatu negara atas negara atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara penguasa. Kolonialisme dapat juga diartikan sebagai rangkaian nafsu sesuatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan jalan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, penetrasi kebudayaan.

Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNI Daerah

Dibentuk oleh Pengurus Besar Persatuan Rakyat Indonesia (PBPRI) pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan ketuanya A. Ruslan serta Hadharyah M sebagai penulis l

dan F. Mohani sebagai penulis II. Kegiatan membentuk KNI Daerah sebenarnya sudah dimulai ketika A.A. Hamidhan kembali dari Jakarta tanggal 20 Agustus 1945 dengan membawa Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Mr. Rusbandi sebagai ketua KNI Daerah. Tetapi karena A.A Hamidhan kemudian menghadapi tekanan Jepang, dia tidak dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Kompi X

Dibaca Kompi Sepuluh berlokasi di Kelayan Banjarmasin. Merupakan sebuah kompi tentara NICA di Banjarmasin yang pada mulanya berasal dari Balikpapan, anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia bekas serdadu Belanda, bekas Romusha dan orang politik yang akan dibawa tentara Sekutu ke Australia. Kompi X merupakan salah satu sasaran penyerangan yang dilakukan pejuang pada pertempuran 9 November 1945 di Banjarmasin.

Koninklijke Pakketvaart Maatschappij atau KPM

Maskapai Pelayaran Angkutan Kerajaan Belanda. Maskapai ini beroperasi di Kalimantan dan memiliki kapal uap yang melayani sungai Barito hingga ke Puruk Cahu.

Kumiai

Sejenis koperasi pada masa pendudukan Jepang yang ditugaskan untuk mengumpulkan produksi rakyat. Misalnya mengumpulkan padi dari rakyat dan di setiap desa disediakan lumbung padi, tetapi rakyat tidak diperkenankan untuk menggunakan padi tersebut.

Kweekschool voor Inlandse Onderwijzers

Disebut juga sebagai Sekolah Raja yakni sekolah untuk mengadakan tenaga guru dan pamong, diantaranya terdapat di Banjarmasin. Yang diterima di Sekolah Raja

adalah lulusan Sekolah Kelas Dua, yang dikenal dengan sebutan Sekolah Melayu. Setelah Sekolah Raja ditutup, maka sejak 1910 putera-putera Kalimantan Selatan melanjutkan ke Makassar memasuki *Kweekschool* untuk jadi guru, dan sesudah 1919 beralih ke *Normaalschool* Makassar karena Kweekschoolnya tutup.

Kyein Jeseije

Sekolah Guru Pengganti CVO 2 tahun. Sekolah Guru jenis ini terdapat di Banjarmasin, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung.

L

Landraad Kantoer

Kantor Pengadilan Negeri pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Landswacht

Sebuah milisi pengawal kota yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi serangan Jepang.

Laskar Hisbullah

Laskar Hisbullah dibentuk di daerah Martapura, Rantau dan Hulu Sungai oleh beberapa tokoh pejuang. Nama ini diambil dari Laskar Hisbullah yang berpusat di Jogjakarta yang dipimpin oleh A. M. Sangaji yang mengutus Kapten

R. Soedirman untuk membentuk Laskar untuk daerah Martapura dan Pelaihari, serta Kapten Tamtomo sebagai penghubung Markas Besar Hisbullah Jogja untuk Kalimantan. Laskar ini dapat dibentuk di Kalimantan Selatan dengan dukungan laskar Banteng Borneo di bawah pimpinan M. Hammy A.M di Rantau. Nama Banteng Borneo tetap dipakai yang secara administratif berada di bawah Hisbullah, sementara taktik dan operatif dipegang oleh M. Hammy A.M. sendiri.

Lucht Bescherming Dienst

LBD (*Lucht Bescherming Dienst*) atau Dinas Perlindungan Bahaya Udara. Sebuah milisi yang dipersenjatai senjata penangkis serangan udara yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi serangan udara Jepang.

Luitenant der Chinezen

Letnan Cina, Kepala Kampung Cina yang ditunjuk dan diangkat oleh Belanda.

M

Ma'ahad Rasyidiyah

Sebuah Madrasah Islam di Amuntai, mula-mula disebut Arabische School. Kemudian pada tahun 1930 direorganisasi oleh H. Abdurasyid, seorang alumnus Al Azhar, Mesir, menjadi Ma'ahad Rasyidiyah. Sekolah itu telah diatur sesuai metode pengajaran modern dengan menggunakan sistem klasikal.

Maatschappij Poeloe Laoet

Nama lengkapnya adalah Maskapai Tambang Pulau Laut (*De Steenkolen-Maatschappij 'Poeloe Laoet'*) suatu perusahaan yang mengeksploitasi batu bara di Sembilimbangan, Pulau Laut sejak 1903.

Madrasah Musyawaratutthalibin

Musyawaratutthalibin berdiri sekitar tahun 1930 di Banjarmasin dan mempunyai banyak cabang di Kalimantan Selatan hingga ke pesisir Timur Sumatera. Kegiatannya di bidang pendidikan yang terkenal adalah madrasah syafiiyahnya.

Untuk melaksanakan ayat empat pasal tiga Statuten Musyawaratutthalibin yaitu mendirikan sekolah-sekolah yang diberi pengajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan Umum, maka di hampir semua cabang Musyawaratutthalibin didirikan Sekolah Musyawarah.

Madrasah yang terkenal adalah Normal Islam sebagai sekolah Islam tertinggi kala itu.

Madrasah Persatuan Perguruan Islam

Madrasah ini didirikan di Barabai oleh para pemuka agama antara lain H. As'ad, H. Mukhtar dan H. Mansur dengan tujuan untuk mengkoordinasikan madrasah-madrasah Islam dan menyeragamkan bentuk serta isi kurikulum seluruh madrasah yang ada.

Madrasah PPI mempunyai tingkatan pendidikan, yaitu tingkat Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan tingkat Aliyah. Mata pelajaran yang diajarkan selain pengetahuan agama juga ilmu pengetahuan umum. Cara mengajar yang dipergunakan adalah sistem guru vak (guru pemegang pelajaran). Untuk itu, PPI banyak melibatkan tokoh agama untuk bersama-sama membina madrasah PPI, dan setiap guru diberi wewenang untuk memegang mata pelajaran yang disenangi.

Madrasah Sarekat Islam

Sekolah bercorak Islam yang dibangun atau dikelola oleh Sarekat Islam. Kegiatan sekolah ini seringkali mengambil tempat di markas SI yang dikenal masyarakat dengan sebutan gedung *kalap* (club).

Di Banjarmasin terdapat Gedung Club yakni di Seberang Masjid, dan di gedung inilah SI mendirikan sekolah Islam lima tahun yang diberi nama “Hadhihil Al-Madrasatul Arabiah al Wathoniah”.

Mata pelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan agama dan sedikit pengetahuan umum.

Madrasatul Arabiah al Wataniah

Madrasah Agama Islam 1916 di Seberang Mesjid, Banjarmasin. Sekolah ini merupakan tempat persemaian pembaharuan Islam dan kebanyakan lulusannya menjadi simpatisan atau langsung menjadi anggota organisasi Muhammadiyah.

M. Afiat

Penerjemah pamflet yang dibagikan tentara Australia dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang kemudian dicetak dengan huruf arab dan latin, kemudian diperbanyak ± 400 lembar. Isi pamflet itu ialah menerangkan bahwa Indonesia telah merdeka, mengajak semua lapisan masyarakat dan golongan pegawai, polisi, buruh dan rakyat umumnya untuk bersatu dan supaya menolak kedatangan NICA.

Majlis

Sebuah majalah bulanan Majelis Ulama Islam Kandangan bernama Madjilis telah terbit dalam tahun 1948. Penerbitan majalah yang memuat masalah-masalah ke Islaman ini berlangsung setiap tanggal satu bulan Arab/Hijriah. Majalah ini sudah tampil dalam bentuk cetakan. Percetakannya dilakukan oleh Drukkerij “Sinar Hoeloe Soengai”. Pimpinan penerbitan adalah Mohammad Arsjad, sedangkan alamat penerbit adalah kantor Majelis Ulama Islam Hulu Sungai di Kandangan. Majalah ini di memasang harga langganan sebulan/satu eksemplar adalah f.1.

Malam Jum'at

Majalah mingguan yang diterbitkan pertama kali tahun 1924 oleh organisasi Srie. Majalah ini dipimpin Amir Hasan Bondan dan Saleh Bal'ala. Mula-mula isi tulisan bertemakan keagamaan, lambat laun isinya mengarah kepada kebangsaan.

M. Amin Effendi

Salah seorang tokoh pemberontakan 9 November 1945 di Banjarmasin. Ia adalah anggota Barisan Pemberontakan Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) yang dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 dengan anggotanya terdiri dari para pemuda khususnya para bekas Heiho.

Meisjes Normaal School Blitar

Sekolah Guru Puteri yang didirikan Belanda di Blitar. Wanita-wanita Banjar yang mau menjadi guru, dan pernah sekolah di sini antara lain Malati, Atung, Nursehan, Itai, Jawiah, Aluh, Nursiah, dan Maserah dari Kandangan. Barlian dan Masriah dari Rantau. Siti Aisyah dari Barabai. Syamsyiah dari Amuntai. Johar Manikam dari Alabio. Nursaniah dari Kotabaru dan Aisyiah dari Muarateweh.

Menara Indonesia

Pertama kali terbit pada Juli 1947 hingga tahun 1948 di Amuntai. Majalah ini dicetak stensilan. Terbit dua kali sebulan, setiap tanggal 10 dan 25. Alamat redaksi dan Adminstrasinya adalah Kampung Baru, Alabio. Majalah Menara Indonesia berukuran kwarto dan tebal berkisar 30 halaman. Isinya memuat tulisan-tulisan yang bertemakan perjuangan. Ada yang dalam bentuk naskah ilmiah populer, surat terbuka terjemahan tulisan dari majalah luar negeri, pengetahuan keagamaan, filsafat, puisi/sajak dan berita-berita ringan lainnya.

Militaire Transport Dienst atau MTD

Badan militer untuk urusan angkutan darat.

Minami Borneo Gekidjo

Nama pengganti Bioskop Eldorado di Pasar Lama, yakni saat tentara Jepang berkuasa di Banjarmasin. Sekitar tahun 1950 an, di bekas lokasi bioskop, oleh pemiliknya (Hoesein Razak) bersama Muhammad Hasyim, dan PGRI dibangun bioskop baru dengan nama “Bioskop Merdeka”.

Mingguan Samarata

Terbit pada tahun 1946 di Kandangan di bawah pimpinan Saberi Tobing dan Saberi Oetis. Mingguan ini hanya dapat bertahan terbit beberapa bulan saja.

Minister van Kolonien

Menteri Urusan Daerah Jajahan

Mohammad Hanafiah

Lahir di Kandangan 17 Juni 1904. Lulusan OSVIA (*Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren*) dan *Bestuurs Academie* di Batavia ini pernah memimpin hampir semua onderafdeling di Kalimantan Selatan. Diantaranya adalah menjabat sebagai Kiai Kepala Kelas I Martapura. Ketika militer Jepang memasuki Amuntai ia bersama tokoh-tokoh pejuang mendirikan PPC (Panitia Pemerintahan Civil) untuk mengembalikan ketertiban umum. Peranan terpenting pada masa revolusi fisik adalah Ketua Dewan Banjar yang pertama Di bawah kepemimpinannya, ia bersama anggota Dewan Banjar yang pro unitarisme melancarkan perjuangan secara politis, dan membelokkan tujuan Dewan Banjar untuk kepentingan perjuangan. Pernah menjadi Menteri Agraria pertama dalam Kabinet Ali Sostroatmadjoyo (1952-1955) di era pemerintahan Presiden Soekarno.

Muhammad Nawawi Arief

Dilahirkan 10 Maret 1909 di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia dikenal sebagai salah seorang tokoh pemberontakan yang meletus di Barabai pada tanggal 19 ke 20 Maret 1946 (malam Rabu pukul 22.00). Bersama saudaranya yakni Norman Arief dan Al Hamdi Arief memimpin penyerangan tangsi militer Belanda di kota Barabai. Aksi yang dikenang masyarakat Barabai dengan sebutan “Aksi Tiga Badangsanak” atau “Aksi Trikesuma” telah menimbulkan korban di kedua belah pihak. Ia dan adiknya Al Hamdi Arief ditangkap dan dihukum penjara masing-masing 18 tahun dan 15 tahun, ke penjara Cipinang dan Nusakambangan.

Muhammadiyah

Muhammadiyah pertamakali didirikan di Jogjakarta pada 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923).

Kapan dan dimana pertama kali Muhammadiyah tumbuh di Kalimantan Selatan belum dapat diketahui dengan jelas. Bila bertolak dari masuknya faham pembaharuan, maka proses ini telah berkembang sejak 1914 di Banjarmasin dengan didirikannya sekolah bernama *Arabische School* (kemudian menjadi *Islamsche School*) sebagai tempat penanaman faham pembaharuan oleh perkumpulan orang-orang keturunan Arab.

Sesudah *Islamsche School*, pada tahun 1916 didirikan lagi *Al Madrasatul Arabiah al Walaniah* di Seberang Masjid, dan *Diniyah School* di Sungai Kindaung pada tahun 1921. Sekolah-sekolah ini merupakan tempat persemaian pembaharuan Islam dan kebanyakan lulusannya menjadi simpatisan atau langsung menjadi anggota organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1921 tiba di Banjarmasin Syekh Ahmad Surkati bersama-sama dengan utusan Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Al Aticy. Mereka menjadi pendorong pengikut pembaharuan di Banjarmasin seperti Muhammad bin Thalib, H. Ahmad Amin (Alumni

Al Irsyad), H. Masykur, dan Yasin Amin. Bahkan H. Ahmad Amin dan H. Masykur akhirnya mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah ke Pusat Pimpinan di Jogjakarta.

Pendorong pembaharuan di Banjarmasin bertambah ketika Maraja Sayuthi Lubis, utusan Centraal Sarekat Islam (CSI) datang ke Banjarmasin pada tahun 1921 yang dengan semangat dan keberaniannya terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pengikut faham Abduh. Akibatnya jumlah tokoh pembaharuan semakin besar diantaranya H. Abdul Karim Corong, bahkan Mohammad Horman, Presiden SI cenderung kepada faham pembaharuan ini.

Meskipun faham Muhammadiyah telah masuk ke Banjarmasin sekitar tahun 1920, namun akibat kondisi masyarakatnya dan kurangnya kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jogjakarta, maka Muhammadiyah lebih dahulu berdiri Alabio dan Kuala Kapuas daripada Banjarmasin.

Untuk daerah Martapura ajaran pembaharuan ini disampaikan oleh H. Muhammad Yusuf (Ustadz Haji Yusuf Jabal). Fatwa-fatwanya seirama dengan dengan faham-faham pembaharuan yang kemudian selaras dengan Muhammadiyah.

Muhammadiyah kemudian dapat berdiri pada tahun 1932 di Martapura berkat peranan H.M. Hasan Corong, seorang *Ajunct Jaks*a bersama dengan dua orang tokoh Arab, Abdullah bin Shif dan Ali Mubarak.

Di Alabio, cabang Muhammadiyah berdiri tahun 1925 diketuai Haji Jaferi. Tahun 1929 Muhammadiyah Alabio mengadakan Konperensi I yang dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah: A.R. Sutan Mansyur. Selesai konperensi beliau juga mengunjungi Muhammadiyah Kuala Kapuas dan Banjarmasin.

Berdasarkan surat ketetapan, Muhammadiyah cabang Alabio mendapat pengakuan dari pengurus besar

berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 253 tanggal 5 Maret 1930.

Sedangkan Muhammadiyah cabang Kuala Kapuas meski berdiri setelah Alabio, ternyata mendapat surat penetapan lebih dahulu yakni Surat Ketetapan No.128 bertanggal 1 Juli 1928, sedangkan Surat Ketetapan Muhammadiyah Banjarmasin Nomor 254 tertanggal 5 Maret 1930. Bermula dari Alabio inilah kemudian Muhammadiyah menyebar ke daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Sungai Tabukan, Jarang Kuantan, Hambuku Hulu, Kelua, Haruyan, Kandangan, Rantau dan Barabai.

Tujuan terpenting dari Muhammadiyah ialah memurnikan faham-faham agama Islam yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dengan semboyan yang terkenal “kembali kepada Quran dan Hadits”. Karena tujuan memurnikan itulah yang menyebabkan Muhammadiyah pada mulanya mendapat tantangan hebat di kalangan penduduk, meski kemudian akhirnya mendapatkan posisi penting di daerah ini karena kesungguhan para penganjurnya terutama berkat peranan eksponen intelektual muda Muhammadiyah yang dengan metode-metode dakwah tertentu telah berhasil menarik masyarakat Islam di kampung-kampung untuk menjadi pengikutnya.

Berkat prestasi yang dicapai Muhammadiyah di daerah ini, maka dilaksanakanlah Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 22 Juli 1935 dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta, dari seluruh perwakilan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Hindia Belanda.

Muilkorf-Circulaire

Muilkorf-Circulaire atau Sirkuler-Pemberangusan merupakan surat edaran Gubernur Jenderal bertanggal 27 September 1919 yang berisi larangan bagi pegawai pemerintah untuk mengeluarkan pikiran secara lisan

maupun tertulis yang dapat merongrong kekuasaan pemerintah. Sirkuler-Pemberangusan dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan para pegawai pemerintah dalam pergerakan nasional dengan pelbagai sanksi antara lain dipindah ke tempat lain, diturunkan pangkatnya atau bahkan dipecat.

MULO atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs

Sekolah pemerintah setingkat sekolah menengah pertama berpengantar bahasa Belanda. Di Banjarmasin, MULO pertamakali dibuka tahun 1928 dan merupakan satu-satunya sekolah ‘tertinggi’ untuk seluruh Kalimantan berlokasi di jalan Loji. Karena satu-satunya inilah, maka tamatan sekolah rendah (ELS, HCS dan HIS) terkumpul di MULO Banjarmasin.

Untuk dapat masuk MULO di Banjarmasin, siswa kelas tujuh sekolah rendah, oleh kepala sekolahnya diberi surat rekomendasi untuk langsung ---tanpa ujian--- diterima di kelas persiapan (*voorklas*) atau di kelas satu. Rekomendasi diberikan hanya untuk “voorklas” dan siswa yang berkeinginan dapat mengikuti ujian masuk ke kelas satu.

Di kelas dua siswa diarahkan ke jurusan yang oleh rapat guru-guru dianggap tepat dan sesuai dengan kemampuan si siswa. Ada tiga jurusan atau ‘*afdeling*’ yang disediakan oleh MULO Banjarmasin, yakni jurusan Bahasa dan Sastra, jurusan Ilmu Pasti dan Alam dan jurusan Niaga yang masing-masing disebut *afdeling* A, B dan C.

Bahasa Belanda adalah bahasa pengantar di samping itu bahasa Inggris dan Jerman yang wajib diajarkan di semua kelas dan jurusan. Selain itu diajarkan pula bahasa Melayu namun bersifat fakultatif.

MULO Bumiputera

Didirikan di Banjarmasin tahun 1939, sekolah MULO yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Musyawaratutthalibin

Musyawaratutthalibin berdiri di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 1931. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Haji Ridwan Syahrani, Haji Majedi Effendi, Haji Amin dan mendapat dukungan dari para alim ulama, guru-guru agama, penuntut-penuntut ilmu di Banjarmasin.

Secara harfiah, “Musyawaratutthalibin” diartikan sebagai organisasi para pelajar atau kaum terpelajar yang menginginkan adanya permusyawaratan. Keinginan itu lahir karena meluasnya percekocokan dalam masyarakat, terutama menyangkut soal-soal agama.

Organisasi ini berfaham keagamaan yang berdasarkan Islam, dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam statuten-nya pasal dua antara lain bekerja untuk kesempurnaan ummat Islam dengan jalan membangunkan persatuan Islam terutama guru-guru, ulama-ulama, penuntut-penuntut ilmu khususnya dan kaum muslimin umumnya, dan memajukan dan menggembirakan cara hidup dengan mengamalkan segala perintah Islam.

Seperti kata Haji Ridwan Syahrani pada saat pembentukan organisasi ini bahwa dibentuknya Musyawaratutthalibin ini adalah untuk membentengi faham ahlussunnah wal jamaah dengan mewujudkan dan menggembirakan cara hidup dan kehidupan dengan mengamalkan segala perintah Allah yang sudah umum dikerjakan oleh ummat Islam di Indonesia dengan mazhab Imam Syafii berdasar Quran, Hadis, Idjma dan Qiasy.

Karena organisasi ini bermaksud membangun persatuan Islam jelaslah adanya keinginan akan kerukunan dalam beragama oleh masyarakat, maka mulai dari golongan pemuda dan pelajar beramai-ramai memasuki Musyawaratutthalibin.

Dalam perkembangannya organisasi mempunyai cabang yang sangat banyak di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke pesisir Sumatera seperti Tembilahan, Enok dan

Kuala Tungkal, di tempat mana terdapat permukiman orang-orang Banjar perantauan.

Adapun cabang-cabang yang sudah berdiri sampai tahun 1936 adalah cabang-cabang Banjarmasin, Kuin, Kandangan, Barabai, Amuntai, Kalua, Samarinda, Balikpapan, Sanga-Sanga Dalam, Kotabaru, Samuda, Senakin, Alabio dan cabang Tembilahan.

Sampai tahun 1942 organisasi Musyawaratutthalibin melaksanakan beberapakali kongres yakni Kongres I tahun 1934 di Banjarmasin, Kongres II tahun 1936 di Kandangan, Kongres III tahun 1937 di Amuntai dan Kongres IV tahun 1938 di Balikpapan.

Hasil Kongres ke empat di Balikpapan, selain memperbaharui pengurus baru juga berhasil memantapkan struktur organisasi yang terdiri dari: Pengurus Besar yang membawahi Pengurus Harian dan Pengurus Bagian (Departemen) yang terdiri dari badan-badan yakni Badan Majelis Syar'iy, Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan, Badan Propaganda, Badan Komisi Mengumpul Rancangan-Rancangan Aturan Nasrul Umum, Badan Pengurus *Stapel drukkerij*, Badan Pendirian Drukkerij M.Th (Musyawaratutthalibin), Badan Pers Commisie dan Badan Perpustakaan.

Melalui badan-badan itu, selain bergerak dalam bidang keagamaan juga bergerak di bidang sosial antara lain dengan mengadakan kursus-kursus kerajinan, pemberantasan buta huruf. Bagian terkenal dari organisasi ini adalah Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan yang program kerjanya menggiatkan berdirinya sekolah-sekolah.

Sekolah-sekolah yang dibina oleh Musyawaratutthalibin seperti sekolah-sekolah Safiyyah, Kepanduan Nasrul Umum untuk bidang kepemudaan dan Dawatutthalibin untuk kelompok laki-laki serta Jami'iyatunnisa untuk kelompok wanitanya yang bergerak di bidang propaganda agama melalukan melalui Badan Majelis Proganda yang dipimpin oleh Haji Abdullah Sidiq, melakukan propaganda-propaganda agama dalam

rangka menjunjung tinggi Al Quran, Hadist, Idjma dan Qiasy serta menolak keras serangan ahlul bid'ah waddhalalah baik di tempat terbuka, di masjid maupun langgar. Usahnya di bidang agama ditemui pula pada pembentukan kader-kadernya di setiap sekolah "musyawarah" yang terdapat pada setiap cabang-cabangnya di daerah.

Di bidang sosial kegiatan Musyawaratthalibin selain dilaksanakan melalui badan-badan juga melalui organisasi seperti Kepanduan Nasrul Umum, Dawatutthalibin, dan Jami'iyatunnisa. Mereka melaksanakan kursus-kursus buta huruf, kerajinan tangan, dan mengumpulkan biaya pendidikan bagi anak yang cerdas yang kesulitan biaya, bahkan mengadakan percetakan dan menerbitkan surat kabar yakni "Suara MTh atau Suara Musyawarah" meski tidak lama umurnya.

Terhadap Pemerintah Hindia Belanda, Musyawaratutthalibin juga mengeluarkan mosi tahun 1938 yang isinya agar bea pemotongan hewan buat aqiqah dan qurban dibebaskan. Mosi itu disampaikan kepada pemerintah, kantor voor Mohammadaan-zaken, Volksraad dan pers Indonesia.

Di bidang pendidikan, perjuangan Musyawaratutthalibin terlihat dari adanya "Sekolah Musyawarah" yang didirikan di hampir semua cabang organisasi ini. Disamping itu, organisasi ini juga mendirikan sekolah agama yang lain seperti "Qismul-Mudarisien" di Kandangan dan "Normal Islam" di Rantau.

Selain itu, Musyawaratutthalibin berhasil menyatukan dua perguruan yakni "Persatuan Perguruan Islam di Birayang" dengan "Sekolah Musyawarah", sehingga kerjasama itu dapat meningkatkan mutu kerja guru-guru dan murid di samping hubungan organisasi ini dengan perhimpunan lainnya menjadi lebih erat.

N

Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 dengan tujuan memajukan paham aliran tradisional, memelihara hubungan dengan para ulama dan pengikut keempat mazhab, memajukan pendidikan, masjid, dan kegiatan Lailatul Ijtima serta Tahlilan.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam berhaluan *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah* dengan berpegang teguh pada salah satu dari empat mazhab: Imam Syafie, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu

Hambali. Secara harfiah Nahdlatul Ulama berarti “kebangunan para ulama”.

Di Kalimantan Selatan, Nahdlatul Ulama berdiri di Martapura pada tahun 1927 diprakarsai oleh Haji Abdul Kadir yang kemudian dikenal dengan panggilan Tuan Guru Tuha. Ketika Nahdlatul Ulama berdiri di tahun 1926 di Surabaya, beliau masih belajar pada pesantren di Jombang dan sangat terpengaruh oleh kegiatan *Laitatul Ijtima* dan *Tahlilan*.

Di Martapura, Nahdlatul Ulama masuk melalui sekolah Darussalam Martapura. Masyarakat Martapura yang fanatik agama dan menjunjung kedudukan ulama tradisional segera mengikutinya dan dari sinilah Nahdlatul Ulama berkembang dengan basis utama di daerah-daerah pedesaan.

Nahdlatul Ulama dapat berkembang dengan pesat berkat dukungan tokoh-tokoh ulama yang mengajar di sekolah Darussalam Martapura khususnya alumni pesantren-pesantren di Jawa Timur.

Mengingat pengaruh ulama yang cukup besar dalam masyarakat, maka dalam waktu yang singkat Nahdlatul Ulama tersebar luas di Martapura, bahkan cabangnya berdiri pada tahun 1931 di Banjarmasin dengan tokoh-tokohnya antara lain Said Ali Alkaf, H. Akhmad Nawawi dan H. Hasyim.

Sesuai dengan cita-cita yang diembannya maka Nahdlatul Ulama bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Walaupun bukan suatu organisasi yang berdasarkan politik, namun Nahdlatul Ulama menjalankan politik *non cooperatie* terhadap setiap bantuan maupun ajakan Pemerintah Hindia Belanda untuk membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah maupun untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Bahkan melalui melalui sekolah atau madrasah yang diasuh oleh ulama Nahdlatul Ulama ditanamkan rasa cinta tanah air dan kebencian terhadap penjajah Belanda.

Nasionalisme

Diartikan sebagai aliran/ajaran faham kebangsaan. Istilah ini berasal dari kata 'Nasional' atau kebangsaan atau kata "nation" yang diterjemahkan sebagai bangsa. Menurut Han Kohn, Nasionalisme adalah faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (*nation state*).

Manai Sophian mengartikan nasionalisme sebagai suatu state of mind, suatu prinsip rohani dimana kesetiaan dari individu diabdikan kepada negara; lahiriah cinta tanah air. Oleh sebab itulah, maka suatu bangsa itu adalah suatu solidaritas yang besar; diciptakan oleh pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan dan yang akan diberikan karena cinta tanah air itu.

Nasion Lama

Penduduk bekas kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu, sebelum daerah mereka ditaklukan dan disatukan Belanda ke dalam wilayah Hindia Belanda.

Nationaal Borneo Congres atau NBC

Kongres yang diselenggarakan atas kerjasama dan diikuti organisasi Sarekat Islam dan Pakat Dayak. Berlangsung pada tahun 1923 (Kongres I) dan 1924 (Kongres II) diikuti oleh semua wakil-wakil SI Lokal yang ada di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo serta wakil-wakil Pakat Dayak, karena saat itu hanya ada dua golongan pergerakan yang dianggap mewakili rakyat Borneo. Kongres ini berhasil menyusun mosi berisikan segala macam keberatan-keberatan dan permohonan rakyat Borneo kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang-bidang politik, ekonomi, pajak, rodi, pendidikan dan sebagainya.

Nationaal Indiŝche Congres atau NIC

Wadah persatuan dan tempat pengumpulan kekuatan serta pikiran, segenap potensi rakyat yang

diselenggarakan oleh Centraal Sarekat Islam. Melalui kongres NIC yang pertama tahun 1916, Sarekat Islam telah mengemukakan perasaan kebangsaan *Indische* yang mengikat seluruh suku bangsa yang ada di kepulauan Hindia (Indonesia).

Nederlands Indische Onderdaanschap

Peraturan Kewarganegaraan Hindia Belanda tahun 1911 yang mengatur status penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan (orang Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera) atas dasar warna kulit (*Color Line*) yang memisahkan antara penguasa dengan yang dikuasai.

Nederlandsche Handel Maatschappij atau NHM

Didirikan tahun 1824, dan membuka kantor di Banjarmasin pada tahun 1840 dengan maksud untuk menghadapi perdagangan yang sebelumnya dikuasai Bugis maupun Cina.

Negara Indonesia Timur

Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara boneka terbesar yang berhasil dibentuk oleh Belanda. NIT sangat strategis bagi Van Mook, karena melalui NIT Van Mook berupaya menciptakan Republik Indonesia Serikat yang masih dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Meski demikian, pembentukan NIT dalam Konferensi Denpasar dimaknai kaum Republikan sebagai suatu tahap dalam proses perjuangan menuju negara Kesatuan RI sesuai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan bagi pendukung federalisme, adanya NIT merupakan pembuka jalan dalam rangka pembentukan negara federal yang tetap berada dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Netherlands Indies Civil Administration atau NICA

Nama pemerintahan sipil Belanda di wilayah Indonesia yang dikuasainya pada masa antara tahun 1945-1949.

Nyata

Mingguan politik Nyata dibentuk di Banjarmasin tahun 1948 dipimpin oleh H. A. Djohansyah dan Haspan Hadna.

Normal Islam

Madrasah tertinggi setingkat Tsanawiyah yang dikelola oleh Musyawaratutthalibin. Yang terkenal adalah Normal Islam di jalan Keraton Rantau, diasuh oleh H. Mahyudin dan tokoh-tokoh agama lainnya di Rantau. Sebagai pengajar, selain guru lokal juga didatangkan guru-guru dari terutama dari Gontor Ponorogo, seperti Maisyir Thaib, Bey Arifin dan Khatib Syarbaini. Bahasa pengantar yang dipakai adalah Bahasa Arab, di samping itupula diajarkan bahasa Belanda dan Inggris. Untuk mata pelajaran umum dipakai kurikulum yang mengacu kepada pesantren Gontor dengan sistem guru vak.

Nogyo Cho Gakko

Sekolah Menengah Pertanian. Terdapat di Banjarmasin dan Kandangan (sebagai pengganti Landbouw School).

**Onderafdeling**

Suatu wilayah administratif yang diperintah oleh seorang Controleur (Wedana bangsa Belanda).

Onderdistrik

Wilayah adminitratif di bawah distrik, setingkat kewedanaan atau kecamatan.

Oosterse-Renaissance

Sebuah aliran yang melihat segala sesuatu dalam pertentangan antara Timur dan Barat. Dianut oleh para lulusan sekolah negeri atau yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Sekolah negeri itu melahirkan orang-orang Timur yang terdidik secara Barat. Pada satu pihak orang-orang ini ada yang selalu menurut kepada kemauan kaum penjajah yang melihat rendah kepada orang-orang sebangsanya. Pada pihak lain ada orang-orang yang jiwanya belum mati yang menentang perlakuan dan penghinaan terhadap bangsanya. Orang-orang ini rata-rata menjadi pendekar bangsanya yang kadangkala membenci segala hal dari Barat.

Openbaar Gebaar

Suatu audiensi dalam upacara terbuka oleh wakil rakyat dengan Gubernur Jenderal, tiap wakil boleh memanfaatkan kesempatan selama 10 s.d. 15 menit.

Opmaak

Huruf yang sudah disusun siap untuk dicetak menjadi surat kabar atau majalah.

Osaka Gekijo

Nama bioskop pada masa pendudukan Jepang. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda dinamakan Bioskop Rex. Setelah merdeka berganti nama menjadi Bioskop Ria. Kini ditempati Batara Departement Store.

P

Pakat Dayak

Sebuah perserikatan yang berdiri pada tahun 1922 untuk menyatukan putera-putera Dayak demi untuk mempertebal rasa kesadaran akan persatuan dan mempertinggi taraf hidup bangsa khususnya orang Dayak di bidang sosial ekonomi, dipimpin antara lain oleh Housman Baboe dan Mahir Mahar. Bersama-sama

dengan organisasi Sarekat Islam, menyelenggarakan National Borneo Congress I (1923) dan II (1924).

Panakawan

Para pembantu Pembakal untuk segala macam tugas, baik maupun yang kurang baik

Pangerak

Pembantu dan tangan kanan pembakal yang diangkat untuk mengurus kampung yang dikuasainya. Pangerak bertugas : (1) Mengepalai wilayah-wilayah kampung; (2) Maerak (merodi) orang-orang kampung; (3) Mengumpulkan orang-orang; (4) Menagih pajak tanah; (5) Menagih pajak kepala; (6) Menagih pajak erakan. Untuk memberi tahu penduduk kampung, pangerak menugaskan tukang bendi (dokar) yang dengan membawa sebuah gong kecil berkeliling kampung memberitahukan agar halaman dan selokan dibersihkan, tabat air diperbaiki bersama, pajak-pajak segera dibayar, penduduk kampung segera berkumpul dan sebagainya.

Pangeran Mohammad Noor

Gubernur pertama Provinsi Kalimantan, berkantor di jalan Paku Alam II, seberang dengan rumah Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jogjakarta. Dilahirkan di Martapura, 24 Juni 1901. Pendidikannya adalah HIS (1917), MULO dan selanjutnya HBS (1923), lalu melanjutkan ke Sekolah Teknik Tinggi di Bandung lulus 1927 dengan gelar insinyur.

Berhubung situasi politik yang tidak memungkinkan, sebagai gubernur ia tidak dapat menunaikan tugasnya untuk berada langsung di Kalimantan. Ia hanya dapat mengatur siasat perjuangan dari daerah Republik yakni Jogjakarta.

Dalam rangka aksi gerilya bersenjata, ia membentuk dan mengirim pasukan MN-1001 yang daerah operasinya di Kalimantan Selatan dan Tengah periode 1945-1949.

Pan Islamisme

Gerakan Persatuan Islam sedunia. Antara lain dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) dan Syekh Muhammad Abduh. Pan Islamisme dimaksudkan selain untuk menghidupkan roh dan semangat kemurnian beragama, menghendaki penyelamatan sistem khilafah dan mengumandangkan pula persatuan Islam (ikatan *ummah*) untuk menghadapi imperialisme. Pola pemikiran yang dikemukakan antara lain bahwa untuk menghadapi penetrasi Barat ummat Islam harus dibangkitkan kekuatannya. Kekuatan akan terwujud apabila ummat Islam kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam yang murni yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dan ulama-ulama Salaf.

P. Arya

P. Arya nama samaran. Nama sebenarnya Munir Sutan Tumenggung. Dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat tahun 1914. Nama samaran lainnya adalah Maxim Le Miaty, Boncel, Hakim Nasir dan lainnya. Pada waktu revolusi fisik ia adalah anggota ALRI dengan pangkat Mayor dan pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kemakmuran Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, Kepala Markas Besar Selatan Alam Roh di daerah Sungai Lulut, dekat Banjarmasin. Salah seorang konseptor naskah Proklamasi 17 Mei 1949, dan mewakili Hassan Basry dalam beberapa pertemuan atau perundingan dengan pihak Belanda. Mendapat bintang gerilya yang diterima langsung dari Presiden/Panglima Tertinggi di Jogjakarta (1949).

Pasifikasi

Suatu usaha pengamanan dengan menempatkan serdadu, polisi, pegawai-pegawai sipil dan sebagainya

dalam rangka perluasan kekuasaan Belanda ke luar Pulau Jawa dan untuk perlindungan penanaman modal.

Pasukan Kucing Hitam

Sebuah pasukan kontra Republik yang dibentuk Belanda untuk menghadapi siasat gerilya dari ALRI Divisi IV dengan siasat gerilya pula. Pasukan ini dipimpin oleh seorang jago kampung jatuh, Barabai yaitu Pembakal H. Hasyim.

Pasukan Laung

Nama pasukan kontra Republik dukungan Belanda yang bergerak di daerah utara, yaitu di daerah Tabalong, Tamiang Layang yang terdiri dari pasukan suku Dayak dari Dusun Timur Tamiang Layang.

Pasukan Banteng Buas

Nama pasukan pro Republik yang dipimpin oleh M. Hammy AM. Pasukan Banteng Buas merupakan nama julukan dari pasukan Hisbullah. Julukan lainnya adalah "Banteng Borneo". Pada bulan Juni 1948 pasukan ini menggabungkan diri dengan 300 anggota pasukannya ke dalam organisasi ketentaraan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Pasukan Jibaku

Nama pasukan berani mati yang dibentuk tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan untuk melancarkan perebutan senjata musuh di setiap kesempatan.

Pasukan MN 1001/MTKI

Pasukan MN 1001/MTKI di Kalimantan Selatan merupakan kelompok gerilya dengan jumlah pasukan dan kemampuan penguasaan wilayah terbesar kedua setelah ALRI Divisi IV. Pasukannya tersebar di berbagai tempat di Kalimantan Selatan yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah sekarang, seperti Kotawaringin,

Nanga Bulik, dan Tumbang Sanamang, Marabahan, Pelaihari, dan daerah Hulu Sungai dengan pusat perjuangannya berada di daerah Gambut, berhadapan langsung dengan pusat pemerintahan Belanda (*Residentie van Zuid-Borneo*) di Banjarmasin sehingga pasukannya seperti Pasukan P.5 (Penggempur-Penculik-Pembakaran-Penghalang Aksi musuh-Penyelidik) yang merupakan inti dari MTK banyak terlibat pertempuran dengan KNIL atau Polisi NICA.

Banyaknya jumlah jasad anggota MN1001/MTKI yang dikuburkan di Makam Pahlawan Bumi Kencana atau makam lainnya di daerah Gambut, melebihi jumlah jasad anggota ALRI Divisi IV yang di kuburkan di makam yang sama, menunjukkan besarnya peranan MN1001/MTKI dalam melawan Belanda di daerah Gambut, Banjarmasin, atau sekitarnya.

Nama semula adalah MN 1001 dibentuk di Jogjakarta pada tahun 1945 oleh Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor sebagai bagian dari TRI. Arti MN 1001 adalah Pasukan Muhammad Noor dengan seribu satu akal atau jalan untuk mencapai kemerdekaan bagi pulau Kalimantan.

Pimpinan Umum (PU) MN 1001 dipegang oleh Tjilik Riwut dengan wakil A. Mukran, dilengkapi dengan bagian keuangan, bagian ketentaraan, penghubung dan pelatih. Setelah menjadi MN 1001/MTKI, berturut-turut PU dipegang oleh Aliansyah Yusuf, Hadariah Heiho, dan Guru Alwi (A. Rustam).

Menurut penjelasan Guru Alwi yang tampil di podium saat peresmian MTKI menjadi TNI (Batalyon MN 1001/MTKI TNI AD Kalimantan) tanggal 12 Oktober 1949 di Los Pasar Gambut, bahwa pada mulanya nama MTKI maupun MTK berasal dari MN 1001. Perubahan nama menjadi MTK kemudian diserobot oleh seseorang pemuda yang menyatakan pemimpin dari Jawa, namanya Soufjan Effendi. MTK yang berada di Hulu Sungai gelisah dengan kejadian itu dan akhirnya menggabungkan diri ke dalam ALRI Divisi IV. Sedangkan MTK yang berada di

Banjarmasin, untuk membersihkan nama dirinya maka namanya diganti menjadi MTKI yang artinya “Mandau Telabang Kalimantan Indonesia” atau “Mempertahankan Tanah Kalimantan Indonesia”.

Sampai akhir 1949, MTKI daerah Banjar tetap berdiri sendiri atau tidak bersedia bergabung ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Karena tidak berhasilnya penyatuan pasukan yang dilakukan oleh ALRI Divisi IV, maka Pasukan MN 1001/MTKI diresmikan menjadi sebuah Batalyon, dengan nama “Batalyon MN 1001/MTKI TNI AD Kalimantan” di bawah komandan Mayor M.A. Arsyad. Peresmian itu dilakukan oleh Letkol. Sukanda Bratamenggala pada tanggal 12 Oktober 1949 bertempat di Pasar Gambut.

Batalyon ini hanya berusia sekitar tiga bulan, karena bubar dengan sendirinya. Sedangkan sisanya yang berjumlah sekitar satu kompi dimasukkan ke dalam Kompi II Batalyon I STM III, dan pada tanggal 01 Juli 1950 dimasukkan dalam batalyon 605.

Pasukan Parang Bungkul

Pasukan kontra Republik dukungan Belanda. Pasukan ini dibentuk oleh Kiai Besar Merah Nadalsyah (Kiai Besar Afdeling Hulu Sungai) dan berada di bawah naungan PAIM (Partai Anti Indonesia Merdeka). Pasukan Parang Bungkul pernah berhasil mengepung posisi gerilyawan, yang pertama dalam pertempuran di Janggar di kaki gunung Menteng pada tanggal 23 Desember 1947 dan yang kedua di kaki gunung Ambilik.

Pasukan Tengkorak Putih

Nama lain pasukan ini adalah Gerakan Tengkorak Putih (Go Teng Po). Dibentuk atas gagasan Letnan Muda Abdul Muti dan Letnan Said Abdul Kadir Zailani pada bulan Agustus 1949. Gagasan itu pada mulanya ditolak Letkol Hassan Basry karena tidak sejalan dengan kebijaksanaan ALRI Divisi IV untuk menggabungkan semua kelaskaran yang ada ke tubuh ALRI. Akan tetapi

dengan dengan dukungan Kapten Danussaputera, akhirnya pembentukan Pasukan Tengkorak Putih dapat difahami oleh Letkol Hassan Basry sebagai sebuah tindakan antisipasi kemungkinan adanya politik licik Belanda jika terjadi penerapan cease fire order di Kalimantan Selatan.

Ketika pihak NICA memanfaatkan cease fire order sebagai sarana untuk memperkuat diri dan melakukan berbagai pelanggaran, sedangkan tentara ALRI merasa terikat kepada perintah cease fire di Munggu Raya 2 September 1949, maka pasukan Tengkorak Putih beraksi melakukan sabotase dan teror terhadap Belanda.

Untuk menghadapi Belanda yang melanggar perintah cease fire, maka Kapten Gusti Aman selaku Komandan KMD Tengah di Kandungan, menginstruksikan kepada Said Abdul Kadir Zailani dan Abdul Muti agar membentuk Pasukan Tengkorak Putih yang anggotanya diambil dari ALRI Divisi IV yang disertai tugas untuk memegang senjata dan menjaga penyimpanannya, serta bersiap-siap berhadapan kembali dengan KNIL, KL dan Polisi NICA jika tidak dapat dielakkan, sebelum pasukan resmi ALRI dapat digerakkan.

Sejak itulah aksi-aksi balasan terhadap NICA mulai bermunculan dengan seringnya ditemukan pamflet yang berisi kata-kata ancaman, penangkapan terhadap mata-mata musuh, serangan terhadap pos-pos polisi NICA, dan ditinggalkannya tanda pengenalan bergambar tengkorak.

Partai Anti Indonesia Merdeka atau PAIM

Sebuah gerakan rahasia kontra Republik yang dibentuk Belanda dengan pasukannya bernama "Barisan Parang Bungkul". PAIM diketuai oleh Kiai Besar Merah Nadalsyah (Kiai Besar Afdeling Hulu Sungai) dan ditunjukan langsung untuk menghadapi gerakan ALRI Divisi IV. Anggota PAIM bertugas sebagai petunjuk jalan

bagi pasukan NICA yang melakukan operasi pembersihan terhadap ALRI Divisi IV yang dianggap mereka sebagai pengacau, ekstremis atau komplotan pemberontak.

Partai Bangsa Indonesia atau PBI

Didirikan oleh dr. Soetomo di Surabaya, lahir dari gabungan antara “Studie Club Surabaya” dengan “Studie Club Madura” pada tanggal 16 Oktober 1930. Masuk ke Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Mei 1932 di bawah pimpinan Merah Johansyah (Komisaris PBI Kalimantan), Obetnego Titiahy, M. Masri dan lain-lain. Organisasi ini memiliki cabang seperti di Kandangan, Barabai dan Amuntai.

Partai Ekonomi Kalimantan atau PEK

Sebuah partai yang dipimpin oleh Anang Acil Kesuma Wira Negara. Organisasi ini bertujuan membela si kecil dari kesukaran-kesukaran ekonomi dan memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah semestinya dibebaskan.

Mereka melakukan pembelaan berdasarkan undang-Undang Hindia-Belanda sendiri, yakni berjuang mengusahakan pembebasan pajak pajak kepala, pajak sawah (tanah yang kurang subur), ladang gunung (tidak terpelihara baik) bagi penduduk yang berusia lebih dari 50 tahun, atau yang usianya kurang dari 18 tahun, terutama yang belum kawin.

Tahun 1930-an, nama PEK dan pemimpin-pemimpinnya cukup populer di kalangan penduduk Hulu Sungai, karena pembelaannya secara jujur, tanpa dipungut bayaran.

Untuk menyuarakan perjuangan organisasinya, PEK menerbitkan Soeara Rakyat Kalimantan (SORAK) langsung dipelopori oleh A.A. Kesuma Wira Negara. Pada perkembangannya, SORAK dihentikan penerbitannya, dan sebagai gantinya terbit Soeara

Kalimantan dipimpin oleh A.A. Hamidhan (putera kandung A.A. Kesuma Wira Negara).

PEK berakhir karena selain timbulnya semangat persatuan nasional yang mengakibatkan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak relevan lagi, juga karena tidak adanya kader partai yang mampu meneruskan jalannya organisasi, tidak lama setelah pelopornya yaitu A.A. Kesuma Wira Negara meninggal dunia.

Partai Indonesia Raya atau Parindra

Parindra didirikan oleh dr. Sutomo dan kawan-kawan pada tahun 1935 di Surabaya dan merupakan fusi dari beberapa partai politik.

Di Kalimantan Selatan, pada mulanya Parindra bernama Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang lahir pada tanggal 14 Mei 1932. Organisasi PBI digerakkan oleh kaum intelek, terutama guru-guru. Pada tahun 1935 berdirilah Cabang Partai Indonesia Raya (Parindra) di bawah pimpinan Merah Johansyah.

Perkembangan yang pesat, menjadikan organisasi Parindra satu-satunya partai politik terbesar yang ada saat itu di Kalimantan Selatan.

Parindra berusaha memperbaiki penghidupan rakyat dengan mendirikan badan-badan koperasi, rukun tani, bank rakyat, pelayaran dan perdagangan Untuk kepentingan pendidikan, organisasi ini membentuk Perguruan Rakyat Parindra di Kandangan, Banjarmasin, Barabai, Birayang, dan Amuntai.

Di bidang politik, Parindra berusaha duduk dalam keanggotaan Raad-Raad yang ada seperti Volksraad di pusat, Provinciale Raad yang di daerah menjadi Banjar Raad, Gementeraad, dan Raad-Raad lokal lainnya.

Parindra mempunyai organisasi bawahannya seperti Rukun Tani, Rukun Pelayaran, Rukun Keputrian, Kepanduan Suryawirawan, maupun Perguruan Rakyat Parindra itu sendiri.

Berlainan dengan organisasi sebelumnya, Parindra melaksanakan prinsip *cooperatie* terhadap Pemerintah

Hindia Belanda. Karena prinsip itulah, maka wakil-wakilnya dapat duduk dalam dewan provinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota. Akan tetapi, perasaan cemas dan takut pemerintah kemudian muncul setelah melihat aktivitas Parindra yang cenderung melawan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda selalu menempatkan orang-orang PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) di setiap rapat partai, baik rapat terbuka maupun rapat tertutup. Tidak jarang PID ini mencari-cari alasan atau perkara untuk membubarkan rapat Parindra, menangkap pembicara dan tokoh-tokoh seperti terhadap H. Ali Baderun (Ketua Parindra cabang Barabai), memaksa Merah Johansyah (Komisaris Parindra) dan keluarga untuk pindah ke Surabaya dan baru diizinkan kembali ke Kalimantan Selatan sampai meninggal tahun 1942, mempersonanongratakan A. Zakaria (tokoh Parindra Banjarmasin) di Kalimantan Selatan dan akhirnya dipindahkan ke Malang, memenjarakan tokoh Parindra cabang Kandangan, H. Ahmad Barmawi Thaib, selama penjara 3 tahun dan kemudian dikirim ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat karena sering menulis artikel yang bersifat politik melalui mingguan Pembangunan Semangat sehingga dituduh *persdelict*. Belanda juga menangkap tokoh-tokoh Parindra cabang Amuntai karena mereka membuat mosi menentang peraturan kerja erakan (rodi). Mereka adalah yakni H. Murhan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, Abdul Hamidhan 1 tahun, sedangkan H. Amir dan E. Sandan masing-masing dikenakan penjara 2 tahun.

Nasib serupa juga dialami oleh tokoh Parindra Banjarmasin, Hadhariyah M juga dituduh *persdelict*, karena tulisannya berupa cerpen berjudul "*Tersungkur Di Bawah Kaki Ibu*" (judul aslinya "*Suasana Kalimantan*") yang diterbitkan di Medan, dianggap pemerintah bertendensi politik sehingga penulisnya bersama penanggung jawabnya, Matu Mona (nama

aslinya Hasbullah Parinduri), diajukan ke pengadilan Banjarmasin pada tahun 1941. Hakim kolonial menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Hadharyah M dan 1,5 tahun penjara kepada Matu Mona, karena keduanya melanggar KUHP.

Partai Republik Indonesia atau PARI

Didirikan oleh Tan Malaka, sesudah terjadinya perpecahan dalam tubuh PKI tahun 1927. Di Banjarmasin pernah berdiri PARI, namun tidak jelas pendirinya. Tetapi ada yang mengatakan diasuh oleh Haji Uysaransyah (Konsulat Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan).

Guru-guru PHIS di Marabahan seperti Marjono, Sutomo, dan Sunaryo diduga sebagai anggota PARI. Keterlibatan mereka bermula ketika ditemukannya dokumen-dokumen PARI di Singapura. Diantara dokumen tersebut terdapat surat-surat dari Marjono, Sutomo dan Sunaryo dari Marabahan. Belanda mengambil tindakan tegas dengan menggrebek sekolah PHIS di Rumah Bulat Marabahan, dan menahan dan mengasingkan Marjono dan Sunaryo ke Boven Digul di Irian Barat.

Partai Islam Indonesia atau PII

Berdiri pada tahun 1938 dengan tokohnya antara lain Wali Al Fatah, R.M. Wiwoho Purbohadidjojo, Faried Ma'ruf, A.K. Muzakir, Mr. Kasmat, dan K.H. M. dan Mansur. Masuk ke Kalimantan Selatan pada tahun 1939. Dalam PSII sendiri timbul perpecahan sehubungan persoalan masuk GAPI atau tidak. Golongan yang menentang masuk GAPI yang dipimpin oleh Kartosuwirjo dipecat dari partai. Kartosuwirjo kemudian mendirikan PSII badan kedua yang mempunyai anggaran dasar yang sama dengan yang lama.

Particuliere Hollands Inlandse School

Particuliere Hollands Inlandse School (PHIS) atau HIS Swasta adalah sekolah yang dikelola oleh Sarekat Islam.

Misalnya PHIS di Pasar Lama Banjarmasin yang dipimpin oleh Abdul Gais dan Mansyur Ali Hasan. Sekolah ini didirikan pada tahun 1922 pada saat SI diketuai oleh M. Horman.

Di Marabahan, atas dorongan H.M. Arip telah berdiri pula PHIS Swasta pada tahun 1929 oleh para pemuda Marabahan yang dikelola oleh Sarekat Islam. Mula-mula dipimpin dan diajar oleh Marjono (pegawai Borneo Post). Mengingat pesatnya perkembangan sekolah tersebut, Marjono mendatangkan teman-temannya yakni Sutomo dan Sunaryo anggota Sarikat Buruh di Surabaya untuk menjadi guru di PHIS.

Pusat kegiatan PHIS bertempat di "Rumah Bulat" bergabung dengan Sarekat Kalimantan (sebelum menjadi BINDO). Sekolah PHIS ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Marabahan, sehingga jumlah muridnya semakin banyak. Guru-guru PHIS menggembeleng semangat kebangsaan pemuda-pemuda Marabahan melalui pengajaran dan juga kepanduan yang waktu itu bernama *Borneo Padvinder Organisatie* (BPO).

Setelah berlangsung enam bulan kegiatan PHIS mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Hindia Belanda. Marjono, Sutomo dan Sunaryo dicurigai sebagai anggota partai terlarang.

Keterkaitan mereka dengan PARI diketahui Belanda menyusul ditemukannya dokumen-dokumen PARI di Singapura. Diantara dokumen tersebut terdapat surat-surat dari Marjono, Sutomo dan Sunaryo dari Marabahan. Belanda mengambil tindakan tegas dengan menggrebek Rumah Bulat, dan menahan Marjono dan Sunaryo dan selanjutnya dibuang ke Boven Digul (Irian Barat).

Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII

Partai Sarekat Islam Indonesia berdiri pada tahun 1930 sebagai nama baru dari Sarekat Islam Hindia Timur (1927) hasil dari perpecahan Partai Sarekat Islam.

Pawana

Majalah yang terbit di kota Rantau tahun 1948, namun dicetak di Kandangan. Pimpinan redaksi majalah ini adalah Masdan Rasjifany. Majalah ini tidak sempat berumur lama, karena pada tahun 1948 pemerintah NICA melakukan persbreidel terhadapnya.

Pax Neerlandica

Wilayah aman tertib di bawah naungan Belanda sebagai hasil dari Afrondings-politiek yakni politik ekspansi pembulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal van Heuts.

Pearl Harbour

Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Hawaii yang diserbu Jepang pada 7 Desember 1941 yang menjadi awal pertempuran Pasifik.

Pedoman Perjuangan

Satu-satunya media massa yang terbit di Barabai pada masa Revolusi Kemerdekaan. Majalah ini terbit dua kali seminggu, yaitu setiap hari Rabu dan Sabtu. Nomor pertamanya terbit pada hari Rabu tanggal 1 Januari 1947. Majalah yang berukuran buku tulis ini jumlah halamannya berkisar antara 8 sampai 16 halaman. Diketik stensilan timbal balik. Percetakan yang mengerjakannya adalah Drukkerij Keradjinan Barabai. Pimpinan Redaksinya adalah Tamar Eka dan Wakil Pemimpin Redaksi adalah Noo'ain AS. Alamat redaksi administrasi tercantum Pedoman Perjuangan Barabai. Majalah ini memasang harga langganan 1 bulan f 4,50 atau dengan eceran f 0,50.

Karena isi pemberitaannya seringkali menyuarakan semangat perjuangan, maka pemerintah NICA mengenakan persbreidel bagi majalah ini.

Pedoman Poeteri

Sebuah majalah wanita di Kandangan yang terbit pada tahun 1947 di bawah pimpinan H. Roehajah B. Majalah yang terbit sebulan sekali ini dicetak dalam bentuk stensilan oleh percetakan Republik. Redaksi dan administrasi majalah ini beralamat di jalan Parinda Kandangan.

Terbitan pertama majalah ini bertanggal 3 Februari 1947 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1366 H. Majalah keputerian yang dijual eceran f 1,50 per eksemplar ini diselenggarakan penerbitannya dengan susunan kepengurusan : Sidang Pengarang terdiri dari H. Roehajah B dan Maserah, sedangkan Tata Usaha adalah Siti Roespinah dan Siti Maslara.

Majalah ini dapat bertahan terbit cukup lama, dan baru berhenti pada tahun 1949 sehubungan dengan kepindahan keluarga H. Roehajah B, mengikuti suami yang sejak tahun 1949 berdomisili di Amuntai.

Pegustian

Nama pemerintahan kelanjutan Kesultanan Banjar yang dipimpin Sultan Muhammad Seman (putera Pangeran Antasari) di daerah Hulu Sungai Barito.

Pelajar Pejuang

Para pelajar dari madrasah, sekolah swasta dan sekolah negeri yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan seperti tugas antar kirim surat-surat, melacak kesigapan pertahanan tentara NICA, melaksanakan administrasi di pangkalan-pangkalan, palang merah, bahkan tidak sedikit yang langsung mengangkat senjata, berlatih bersama-sama pejuang lainnya.

Pembakal

Sebutan untuk kepala kampung. Ia merupakan pimpinan unit terkecil sebagai perpanjangan penguasa kolonial. Tugas mereka lebih dititikberatkan kepada

kepentingan pemerintah kolonial. Mereka hanyalah pembantu pemerintah dalam memungut pajak, menyediakan tenaga kerja untuk rodi atau erakan, di samping menjaga ketertiban daerah masing-masing. Persyaratan untuk menjadi kepala kampung amat sederhana, tidak selamanya berasal dari orang baik-baik. Paling tidak ia harus berani, jagoan, taat kepada atasan, boleh buta huruf asal kepemimpinannya jalan. Atasannya mungkin seorang asisten kiai, kiai maupun hoofdkiai (kiai kepala).

Pemberontakan 9 November

Pemberontakan yang terjadi pada siang hari Jum'at tanggal 9 November 1945 di Banjarmasin dengan titik serangan tangsi polisi terus ke Markas Kompi Betet dan terakhir kompi X. Pertempuran itu menimbulkan korban pada pihak pejuang, antara lain M. Amin Effendi mendapat luka tembakan, pimpinan sayap kanan Halid Tafsir tertangkap, di samping ada 9 orang yang gugur sebagai kesuma Bangsa. Mereka yang telah gugur peristiwa adalah Badran (22 tahun), Badrun (27 tahun), Utuh (58 tahun), Umar (58 tahun), Ta'im (58 tahun), Juma'in (57 tahun), Sepa (56 tahun), Dulah (56 tahun), dan Pa' Ma'rup (45 tahun). Nama-nama mereka yang gugur terukir pada tugu peringatan yang terletak di jalan Jawa (sekarang jalan D.I. Panjaitan, depan kantor KPN) yaitu di dekat tangsi polisi di mana peristiwa ini terjadi. Tanda peringatan lainnya terdapat di desa Pengambangan berupa Tugu 9 November.

Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo

Organisasi Kelaskaran pemuda Kalimantan di Surabaya dan Magelang.

Pemuda OSVIA Kalimantan

Organisasi kepemudaan yang didirikan oleh para pelajar OSVIA asal Kalimantan di Makassar, seperti Merah Johansyah, M. Yusran, M. Jahri pada tahun 1925-1926,

Pendidikan Nasional Indonesia

Disebut pula sebagai PNI Pendidikan (PNI Baru), didirikan oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

PNI Pendidikan pertamakali berdiri di Marabahan pada tahun 1932 atas inisiatif M. Yusak. Pengurusnya Musyaffa (Ketua); dibantu oleh Sunhaji (Penulis); seorang bendaharawan, M. Yusak (Pembantu Umum); dan H. M. Arip (Pelindung).

PNI Pendidikan menggunakan Perguruan Taman Siswa dan Kepanduan Bangsa Indonesia sebagai wadah pelaksanaannya untuk menanamkan rasa kebangsaan dan membebaskan mereka dari perasaan takut dan kebodohan.

PNI Pendidikan juga menganjurkan agar lagu Indonesia Raya selalu dikumandangkan, dan disetiap perhelatan perkawinan atau perayaan hari besar Islam dianjurkan pula untuk memasang warna merah putih, meski hanya dalam bentuk hiasan.

Dalam perjuangannya, PNI Pendidikan bekerjasama dengan organisasi yang sudah ada diantaranya dengan Barisan Indonesia (BINDO) yang sebelumnya telah berkembang di Marabahan. Sehingga sebagian pengurus BINDO juga sebagai pengurus PNI Pendidikan.

Sebagaimana halnya dengan Partai Nasional Indonesia, maka kegiatan PNI Pendidikan di Marabahan juga mendapat tekanan dari pemerintah kolonial, apalagi setelah ranting persiapan Banjarmasin terbentuk lengkap dengan pengurusnya.

Perkembangan PNI Pendidikan akhirnya juga tidak dapat berlangsung lama karena tindakan keras Pemerintah Hindia Belanda yang melemahkan pergerakan kebangsaan yang bersikap nonkoperasi, seperti dalam bentuk pengawasan ketat, ancaman,

bahkan pengusiran bahkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang disegani. Demikianlah, akibat tangan besi yang dilakukan pemerintah, maka organisasi PNI Pendidikan akhirnya tidak dapat bergerak lagi.

Pengajian

Salah satu bentuk pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilangsungkan di tempat tinggal Tuan Guru, tetapi kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar.

Pelajaran yang diberikan adalah ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Di samping pelajaran bahasa Arab dan membaca Alquran. Kitab yang digunakan pada umumnya adalah kitab berbahasa Arab (Kitab Kuning) yang dibawa oleh tuan guru yang pernah belajar di Mekkah. Dalam perkembangannya digunakan pula kitab beraksara Arab berbahasa Banjar atau Melayu, sebagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Bentuk pengajian yang berlangsung adalah berupa pengajian *bandongan* atau *balangan*, pengajian *sorongan*, atau pengajian *maahad* karena dilaksanakan pada hari Minggu (*ahad*), atau *manyananya*, *manyalasa*, *maarba*, *mangamis*, *manjumahat*, dan *manyabtu* sesuai dengan nama hari pelaksanaan pengajian, yang mana murid hanya mendengarkan saja dan tidak menggunakan kitab, sedangkan guru menguraikan isi kitab yang dibacanya.

Pengajian Bandongan atau Balangan

Salah satu bentuk pengajian dengan cara guru membacakan dan menguraikan isi kitab, sedangkan murid-muridnya memegang kitab yang sama dan diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.

Pengajian Sorongan

Seperti yang secara khusus dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari kepada anak cucunya, agar sampai kelak mewarisi kealiman bapaknya.

Pengakuan Kedaulatan

Istilah “Pengakuan Kedaulatan” merupakan tafsiran Indonesia terhadap peristiwa *transfer of sovereignty* tanggal 27 Desember 1949 walaupun secara harafiah berarti “Penyerahan Kedaulatan”. Tafsiran itu bertolak dari anggapan bahwa Indonesia berdaulat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan setelah melalui perang mempertahankan kemerdekaan 1945-1949, maka akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Pengaruh Merah

Pengaruh golongan kiri dalam Sarekat Islam yang berhaluan Komunis (faham Marxisme). Mereka dimotori oleh Sarekat Rakyat.

Penjara Banjarmasin

Penjara besar pada masa pemerintahan NICA di jalan Resident de Haanweg tempat para orang hukuman seperti pelaku kriminal, dan tawanan (pejuang gerilya dan politik). Bekas lokasi penjara kini ditempati gedung Pos Besar Banjarmasin di jalan Lambung Mangkurat.

Penjara Nusakambangan

Penjara (bui) tempat pembuangan orang hukuman dan tawanan (tahanan politik). Penjara ini berlokasi di sebuah pulau bernama Nusakambangan dikelilingi laut di selatan Cilacap, Jawa Tengah. Pada revolusi fisik terdapat banyak pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan yang ditangkap dan dipenjarakan di Nusakambangan. Mantan tawanan yakni Ali Akbar, seorang anggota pasukan payung yang diterjunkan di Kalimantan Tengah dan kemudian tertangkap dan

dipenjarakan di Nusakambangan bercerita, bahwa saat itu di Nusa Kambangan terdapat 12 buah bui (penjara), diantaranya ada yang dikenal dengan nama Bui Seng karena beratap seng (zink). Dalam sebuah bilik rata-rata diisi 35 orang. Pakaian yang dibawa harus dikumpulkan tidak boleh dibawa serta. Untuk keperluan sehari-hari diberi 2 lembar celana, 2 baju, 1 sarung, dan 1 kopiah. Alas kaki tidak diberikan, dan bahkan kelom pun tidak boleh dipakai. Tidur beralaskan tikar purun dan sebuah bantal kain berisi ilalang kering. Penerangan hanya dengan minyak tanah, sedangkan lampu listrik hanya ada di Jumplang (pusat penjara). Setiap pagi pukul 5 harus sudah bangun, cuci muka, dan makan getok singkong. Dari jam 7 sampai jam 9 bekerja menurut vaknya. Pekerjaan terberat adalah memecah batu, membuat jalan dan membatat rumput, tanpa henti selama 3 jam. Perlakuan terhadap tawanan sangat kasar. Kata-kata “monyet anjing” dan sebagainya dari penjaga tawanan bukan kata-kata yang mahal.

Penjara Lapangan Terbang Ulin

Sebuah penjara dekat lapangan Terbang Ulin berjarak sekitar 28 km di arah utara dari Banjarmasin. Pada masa pendudukan Jepang, penjara di lapangan Ulin merupakan tempat penjagalan kepala-kepala manusia ---terutama terhadap komplotan Gubernur Gwest Borneo, Dr. B.J. Haga, yang ingin merobohkan kekuasaan Jepang--- yang mana telah didapati 185 buah tengkorak, 30 orang mati karena disiksa, 26 orang lagi termasuk 5 orang perempuan dan 11 orang pegawai B.B. yang dilakukan Jepang pada tanggal 20 Desember 1943.

Perang Kemerdekaan

Perang membela dan mempertahankan kemerdekaan RI tahun 1945-1949. Istilah yang maknanya sama adalah Revolusi Fisik.

Perhimpunan Hindia

Perhimpunan Hindia (*Indische Vereeniging*) di Negeri Belanda, berhaluan sosial dan hanya untuk pelajar-pelajar dari Hindia; termasuk anak Indo.

Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia (*Indonesische Vereeniging*) adalah organisasi para mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang berdiri tahun 1925 bertujuan mencapai persatuan bangsa dan Indonesia yang merdeka, dipimpin oleh Mohammad Hatta dan kawan-kawan.

Pergerakan Kebangsaan

Disebut juga sebagai pergerakan nasional adalah arti harfiah dari bahasa Belanda: *Nationalistische Beweging* atau dalam bahasa Inggris disebut *National Movement*. Belanda juga menyebut gerakan itu dengan istilah *Inlandsche Beweging*. Pergerakan kebangsaan adalah pergerakan-pergerakan yang bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

Perguruan Taman Siswa

Perguruan Taman Siswa didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) di Jogjakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Pada waktu itu nama yang dipakai adalah *National Onderwijs Instituut Taman Siswa* (Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa).

Di Kalimantan Selatan, Taman Siswa mula-mula berdiri di Marabahan berkat dorongan dari H.M. Arip, tokoh Sarekat Islam Kalimantan Selatan. Cikal bakal lahirnya Taman Siswa bermula dari *Particuliere Hollands Inlandse School (PHIS)* atau HIS Swasta pada tahun 1929 yang didirikan pemuda Marabahan dan dikelola oleh Sarekat Islam.

Setelah kegiatan PHIS dibekukan oleh Belanda, maka pada tahun 1931 Ki Hajar Dewantara mengirimkan guru-guru Taman Siswa yaitu M. Yusak, Sundoro dan Yusyadi.

Sejak PHIS dibantu pengelolaannya oleh ketiga guru tersebut, maka pada tanggal 1 Januari 1931 atas

persetujuan bersama ditetapkan bahwa PHIS dijadikan Perguruan Taman Siswa cabang Marabahan dengan kegiatan bertempat di Rumah Bulat. Dari Marabahan, Taman Siswa berkembang di daerah lainnya seperti di Banjarmasin Kandangan, Barabai, Kelua dan Kuala Kapuas.

Sekolah Taman Siswa ini hanya menyelenggarakan pendidikan setingkat Taman Muda atau tingkat pendidikan kelas 4-6 untuk anak-anak berumur 10 s.d. 13 tahun. Meski demikian, orang dewasa juga dapat mengikuti pendidikan yang dikelola Perguruan Taman Siswa pada sore hari.

Selain menyelenggarakan kelas belajar, penanaman rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa juga dilakukan melalui *Borneo Padvinder Organisatie* yang kemudian berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia.

Perguruan Rakyat Parindra

Merupakan bentuk kegiatan di bidang pendidikan yang diselenggarakan Partai Indonesia Raya (Parindra), misalnya Sekolah Rakyat Parindra dan Taman Antara (Banjarmasin), Taman Antara Parindra (Barabai), Perguruan Rakyat Parindra (Birayang), Sekolah Rakyat Parindra (Amuntai), Perguruan Medan Antara yang kemudian diganti menjadi Sekolah Medan Antara (Kandangan), Taman Antara (Negara), Sekolah Rakyat, dan lain-lain.

Perseatuan Rakyat Indonesia atau PRI

Organisasi yang dibentuk di Banjarmasin tidak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Organisasi PRI diketuai Pangeran Musa Ardikesuma, Wakil Ketua A.Ruslan, Sekretaris I Hadhariyah M, Sekretaris II Abu Bakar, Bendahara Abdul Latief, Pembantu Amir Hasan Bondan.

Susunan kepengurusan PRI diresmikan dalam suatu rapat yang dihadiri beratus-ratus orang pada tanggal 16 Agustus 1956 bertempat di gedung Osaka Gekijo di

Banjarmasin. Pertemuan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Partai Persatuan Rakyat Indonesia tersebut dipimpin oleh Aidan Sinaga.

Persatuan Putera Barabai

Sebuah perhimpunan sosial yang bersifat lokal didirikan oleh H. Hasan Basri.

Persatuan Putera Borneo

Dibentuk pada tahun 1929 di Banjarmasin dengan promotornya Abdul Kadir. Organisasi ini bergerak di bidang ekonomi dan sosial yang didasarkan kepada kebangsaan Indonesia.

Persatuan Putera Borneo sebenarnya telah berdiri lama di Surabaya di bawah pimpinan Abdul Kadir. Maksud promotornya dengan membentuk Persatuan Putera Borneo di Banjarmasin agar dapat melakukan kontak langsung dengan Persatuan Putera Borneo di Surabaya.

Persatuan Pemuda Marabahan atau PPM

Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1929 dengan ketuanya M. Ruslan, dibantu oleh Suriadi sebagai Sekretaris I dan Mawardi sebagai sekretaris II dengan pelindungnya H.M. Arip bermarkas di sebuah rumah yang disebut dengan nama Rumah Bulat, yakni sebuah rumah bertipe Joglo atau Limasan di jalan Panglima Wangkang sekarang.

Dalam organisasi PPM mereka mendirikan Taman Bacaan dengan nama Family Bond bertempat di Rumah Bulat bergabung dengan perkumpulan musik yang telah ada.

Sebagai bahan bacaan mereka berlangganan surat kabar dan majalah diantaranya Hindia Baroe, Bintang Baroe, Bintang Islam, dan Kemajoean Hindia.

Pada tahun 1930 Persatuan Pemuda Marabahan memperluas tujuan dan ruang geraknya dengan mensponsori berdirinya Sarekat Kalimantan dengan Ketua Pedoman Besarnya H.M. Arip. Perubahan nama menjadi Sarekat Kalimantan antara lain dalam rangka

memenuhi syarat untuk menjadi anggota Indonesia Muda yang dibentuk setelah Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.

Persideliect

Tulisan yang dianggap menentang atau menghasut terhadap Pemerintah Hindia Belanda hingga dapat dituntut hukuman di Pengadilan.

Tuduhan *persideliect* pernah dikenakan kepada tokoh Parindra cabang Kandangan, H. Ahmad Barmawi Thai, lantaran sering menulis artikel yang bersifat politik melalui mingguan Pembangunan Semangat. Beliau dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Landraad Kandangan dan dikirim ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat.

Persetujuan Linggajati

Persetujuan antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dihasilkan melalui sebuah perundingan di desa Linggarjati, namun dalam naskah perjanjian tertulis "Persetujuan Linggajati".

Naskah Persetujuan Linggajati ditulis dalam Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia dan kedua naskah itu sama kekuatannya. Naskah itu juga dibuat dalam Bahasa Inggris sebagai rujukan kedua belah pihak, jika seandainya terjadi perbedaan penafsiran isi persetujuan antara naskah berbahasa Indonesia dengan naskah berbahasa Belanda

Oleh pihak Belanda maupun Inggris, Linggarjati diucapkan Linggajati (tanpa r), sehingga persetujuan ini secara lisan maupun tulisan lebih sering disebut "Persetujuan Linggajati". Persetujuan ini ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta.

Dalam Persetujuan Linggajati, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Persetujuan Linggajati masing-

masing terdiri dari 17 Pasal ditambah pasal penutup. Pasal terpenting adalah Pasal 1, 2, 3, dan 4.

Persetujuan Linggajati berdampak besar terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan karena hasil persetujuan Linggajati mengakibatkan status Gubernur Kalimantan dihapus. Begitupula dengan Markas Besar ALRI di Tuban yang membawahi Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan dipindahkan ke Madiun disertai dengan perubahan status pula, yakni menjadi Mobiele Brigade ALRI dengan Komandan Mayor Firmansyah.

Persetujuan Renville

Sebuah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Dalam persetujuan itu, Republik Indonesia mengakui wilayah-wilayah yang telah di rebut Belanda ketika terjadi Aksi Militer I, sehingga wilayah Republik Indonesia semakin sempit, kurang lebih seluas wilayah Jogjakarta saja. Selain itu daerah Republik Indonesia yang berada dalam daerah pendudukan Belanda harus dikosongkan pula, sehingga TNI harus melakukan hijrah ke daerah-daerah Republik.

Di Kalimantan Selatan, Persetujuan Renville tersebut mendapat reaksi dari partai politik SKI dan SERMI dan juga dari MPK ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Sehubungan dengan persetujuan Renville tersebut MPK ALRI Divisi IV mengeluarkan pengumuman yang merupakan sebuah keputusan pendiriannya pada tanggal 16 Mei 1948 yang berisi antara lain bahwa pemberitahuan kepada NICA tentang adanya MPK ALRI Divisi IV di Kalimantan sebagai kesatuan dari Angkatan Perang Republik Indonesia, bahwa karena perhubungan yang sangat sukar dan komunikasi yang sangat sulit, menyebabkan MPK ALRI Divisi IV tidak dapat hijrah dari Kalimantan ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia di Jawa sesuai dengan persetujuan Renville dan menyatakan diri tetap berada di Kalimantan sampai ada

ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, bahwa berjanji tidak akan mengadakan gerakan tembak-menembak sesuai persetujuan Renville, kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri.

Pertempuran Batakan

Lebih tepat dikatakan” Palagan Batakan”. Terjadi pada hari Jum’at tanggal 12 April 1946. Tentara NICA menyerbu dari arah Pelaihari ketika rakyat sedang memutuskan hubungan dengan cara merusak jembatan di daerah Kandangan Lama. Pertempuran berkobar dengan sengitnya.

Para pejuang dipimpin oleh Mastur penduduk kampung Batakan sendiri. Tentara NICA yang hanya berkekuatan 15 orang tidak mampu menghadapinya dan terpaksa mengundurkan diri. Tiga hari kemudian yakni tanggal 14 April 1946 NICA kembali menyerang Batakan dengan menggunakan pesawat terbang yang dilengkapi dengan bom api. Rakyat Batakan melakukan perlawanan dengan gagah berani.

Pertempuran terjadi di semua sektor, sektor laut menghadapi 2 buah kapal NICA di Muara Batakan, pesawat terbang berputar-putar menembaki dari udara sehingga rumah penduduk berlubang-lubang karenanya, di samping itu bom api dijatuhkan dari udara. Dalam hal ini sektor utara berhasil menghancurkan kekuatan NICA, sehingga sebuah truk yang penuh dengan tentara NICA terbalik dan puluhan tentara NICA menjadi korban. Pertempuran yang kedua yang terjadi tanggal 15-16 April 1946 berlangsung sampai pukul 21.00 malam hari.

Pertempuran Gunung Janggar

Pertempuran di Janggar di kaki gunung Menteng terjadi pada tanggal 23 Desember 1947 antara pasukan “Barisan Parang Bungkul” yang didukung Belanda dengan pihak 15 orang pejuang yakni H. Aberanie Sulaiman, Pak Moso, Said Charly, Saberi Abas, Margana, Aliansyah, M. Tuhani D, Tulamak, Ibat bin Ahul, Utuh Kandangan, Ibur Jandila,

Rafi'ie, Daud Waki dan Hamdi yang sedang beristirahat di sebuah rumah penduduk suku Dayak dikepung dan diserang oleh militer Belanda pada pukul 03.00 (dinihari) tanggal 23 Desember 1947. Pertempuran sengit terjadi hingga pukul 09.00 pagi. Dalam pertempuran di Janggar, dari pihak pejuang 1 orang gugur yakni Ibad bin Ahul (Ujal), 2 orang tertangkap karena luka tembak yakni Tulamak dan Rafi'ie, dan bahan makanan habis dibakar Belanda. Dari pihak militer Belanda 1 orang tewas dan beberapa orang lainnya luka tembak.

Pertempuran Ambilik

Pertempuran di Ambilik (di kaki gunung Ambulung Haruyan) terjadi pada subuh dinihari tanggal 3 Agustus 1948. Para pejuang dipimpin Hassan Basry dengan pasukannya yakni Alimin, Hamzah Arifin, Ibat, Tulamak, Mustafa, Aliansyah, Saberi Abas, Japau Majid, Aseri, Maseri dan Indera. Para pejuang yang semula berencana menyerang militer Belanda, ternyata mereka lebih dahulu diserang dan dikepung Belanda. Para pejuang yang gugur dalam pertempuran Ambilik adalah Aseri dan Maseri, sedangkan yang luka tembak antara lain Ibat, Mustafa, Tulamak dan Japau.

Pertempuran Bungkukan

Bungkukan adalah sebuah daerah di Kalimantan Tenggara. Pertempuran terjadi di Pasar Bungkukan pada tanggal 13 November 1948 saat berlangsung hari pasar dan terjadi pada pukul 13.00. Dalam pertempuran ini berhasil dibunuh satu orang komandan polisi, dua orang reserse, dan dua orang agen polisi, sedangkan senjata yang diperoleh 5 pucuk karabijn 95, 3 pucuk karabijn, 8 buah pistol dengan pelurunya, 2 buah granat dan sejumlah dokumen.

Pertempuran Anjir

Terjadi pada bulan Maret 1948 di Anjir Pasar Km. 18 antara pasukan BN 10 dari ALRI Divisi IV dengan tentara

Belanda. Pasukan ALRI Divisi IV BN 10 dipimpin oleh Abdurrahman Lubis berangkat menuju Anjir Pasar sebab mendapat laporan bahwa polisi kilat Belanda datang dari Banjarmasin. Sewaktu berada di Anjir Pasar dicegat oleh pasukan gerilya, maka terjadilah pertempuran, dalam pertempuran ini Abdurrahman Lubis dan Tarlan gugur sebagai kesuma bangsa. Sedangkan di pihak Belanda tewas 4 orang dan sisanya melarikan diri. Sebagai pimpinan pasukan diambil alih oleh Atak Imberansyah, lalu dan selanjutnya mengatur strategi (siasat) untuk perjuangan berikutnya.

Pada bulan April 1948 terjadi lagi pertempuran antara pasukan gerilya (BN. 10 ALRI Divisi IV) di bawah pimpinan Atak Imberansyah dengan polisi kilat Belanda di Km. 10 Anjir Serapat. Dalam pertempuran kali ini pasukan gerilya BN 10 mendapat perlawanan cukup sengit. Tidak ada korban pada pasukan gerilya dan di pihak musuh juga tidak diketahui apa ada korban atau tidak. Namun pihak gerilya dapat merampas satu buah motorboat dari tangan musuh (Belanda). Kemudian pasukan gerilya BN 10 bergerak pulang menuju Markas Daerah ALRI Divisi IV Cerbon (Beruang Merah).

Pertempuran Hawang

Terjadi pada tanggal tanggal 21 Desember 1948 yakni ketika kedudukan ALRI daerah Birayang, Ambitu, Hawang, Rangas dan Labuhan diserang pasukan Belanda. Terkenal dengan nama pertempuran Hawang. Menurut Aroba yang turut terlibat dalam pertempuran Hawang sebagaimana diutarakannya kepada Artum Artha hari Kamis tanggal 1 Mei 1968, Pertempuran Hawang terjadi pada tanggal 3 Desember 1948. Pertempuran di hutan Hawang sangat seru, berlangsung dari pukul 08.00 sampai sore sepanjang garis $\pm$ 5 kilometer. Sedemikian serunya, terjadi perang tanding satu lawan satu dan Belanda akhirnya tidak menyadari terjadi pertempuran antara mereka sendiri. Jumlah korban di kedua belah pihak simpang siur. Pertempuran

Hawang mengakibatkan korban 6 orang anggota ALRI gugur, 11 orang di pihak rakyat, 5 rumah terbakar. Sedangkan di pihak Belanda 99 orang serdadu mati dan 6 orang luka-luka. Versi lain, bagaimanain informasi yang diperoleh Artum Artha dari penduduk Hawang, korban di pihak ALRI dan rakyat 16 orang. Dari pihak Belanda, yang mati dan luka berat puluhan orang. Yang mati dikuburkan di Eere-Veld van Nederlands Indie, di wilayah Kota Banjarbaru sekarang. Pada zaman pemerintahan RIS 1950, semua kerangka atau tulang belulanganya diangkut ke negeri Belanda.

Pertempuran Negara

Pertempuran 2 Januari 1949 di Negara dilaksanakan atas dasar Surat Instruksi Pimpinan Umum ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Hassan Basry tanggal 25 Desember 1948, disampaikan oleh Penghubung Utama ALRI Divisi IV Daerah Negara A. Rizal dan Ishak Hasjim. Rute penyerangan bermula dari kampung Hamayung terus ke kampung Pasungkan sebagian menyerang ke kampung Pakan Dalam dan sebagian terus ke kampung Baruh Kembang dan Sungai Mandala, dengan sasaran menyerang kekuatan musuh yang berada pada kompleks kantor Kiai dan polisi kampung Tambak Bitin. Sebagian menghadang terhadap bantuan Militer musuh dari jurusan Amuntai dan Kandangan. Penyerangan itu dilakukan oleh Anggota ALRI Divisi IV dan massa yang jumlahnya diperkirakan lebih ribuan orang. Dan persenjataan yang digunakan hanya terdiri dari parang, tombak, serapang dan sepucuk senapan angin. Pertempuran dimulai dari pukul 15.00 sore dan berakhir sampai tengah malam (dua kali penyerangan). Akibat pertempuran tersebut dalam segi materi ALRI mengalami kerugian yakni sejak saat itu banyak korban baik gugur dalam pertempuran maupun ditangkap dan cacat akibat pukulan atau siksaan. Selainnya juga harta benda yang disita ataupun dihancurkannya.

Perundingan 16-17 Oktober di Banjarmasin

Merupakan perundingan puncak antara pihak ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan pihak Belanda ditengahi misi militer Republik Indonesia dan disaksikan oleh UNCI bertempat di kediaman *Gouverneur van Borneo* (Gubernur Kalimantan) di Banjarmasin.

Pihak ALRI diwakili oleh Kapten Danussaputera sebagai ketua sebagai ketua merangkap anggota, didampingi oleh Kapten Gusti Aman sebagai anggota. Sedangkan pihak Belanda, yang hadir adalah Dr. Eisenberger (Wakil Residen Kalimantan), Letnan Kolonel H.J. Veenendal dengan satu orang ajudan, sebagai ketua delegasi Belanda, didampingi Kapten Verdijk, Letnan J. Koster, Asisten Residen Bloedemaker, Van Harding, satu orang penerjemah dan satu orang notulis. Begitu pula, delegasi Pemerintah dan Militer Republik Indonesia yang hadir adalah Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo sebagai ketua delegasi sekaligus ketua perundingan, didampingi Kapten Muntoyo, Kapten R. Subari. Sedangkan dari pihak UNCI diwakili Mayor William D. Edmond, sekaligus sebagai saksi perundingan.

Perundingan tersebut merupakan sebuah pertemuan yang bersifat resmi, sebab ditengahi oleh Misi Pemerintah dan Militer Republik Indonesia, dan UNCI sebagai saksi, serta mempunyai agenda pembicaraan dan diatur dengan aturan yang bersifat formal.

Agenda pembicaraan yang disepakati dalam perundingan tersebut, antara lain: (1) Penetapan tanggal dimulainya pelaksanaan cease fire order; (2) Pengaturan cara patroli bersama; (3) Penempatan "Panitia Kecil" di setiap kota kabupaten atau distrik sebagai pos penghubung, dan persiapan timbangan terima kota-kota tersebut dari pihak Belanda ke tangan ALRI Divisi IV.

Perundingan itu menghasilkan beberapa keputusan antara lain ditetapkannya dan berlakunya cease fire mulai tengah malam tanggal 16/17 Oktober 1949, diadakannya patroli bersama antara pihak ALRI dan Belanda, serta penetapan dan pelaksanaan perundingan

lanjutan guna pembentukan panitia kecil dan mempersiapkan timbang terima kota-kota, yakni: (1) Di Kandangan, pada 20 Oktober 1949; (2) Di Barabai, pada 23 Oktober 1949; dan (3) Di Amuntai, pada 25 Oktober 1949.

Setelah perundingan tersebut, pengibaran Bendera Merah Putih diperbolehkan oleh Belanda sejak 24 Oktober 1949 di Banjarmasin, kemudian diikuti di tempat-tempat lainnya. Secara berangsur-angsur pihak Belanda menarik militernya dari seluruh Kalimantan Selatan.

Peta

Singkatan dari Pasukan Pembela Tanah Air. Di Kalimantan Selatan, Peta dibentuk tahun 1945 sebanyak satu kompi dari unsur-unsur Boei Teisin Tai. Seminggu sesudah dibentuk mereka dimasukkan dalam kapal yang dikirim ke tujuan yang tidak diketahui dan tak ada satu pun yang kembali. Yang hidup hanya satu orang yaitu Sachrul karena kejatuhan peti di kapal, jari kaki pecah, hingga ia ditinggal.

Pewarta Borneo

Sebuah surat kabar yang didirikan di Banjarmasin tahun 1901 dan menggunakan bahasa Melayu.

Piala

Majalah bulanan Piala di Kandangan pada tahun 1947 di bawah pimpinan Maseri, S.M. Darsel, dan Masdan Rozani. Majalah ini sempat terbit dengan tirus sebanyak 500 eksemplar. Tetapi nasibnya hanya dapat bertahan terbit beberapa bulan saja.

Pimpinan Pemerintahan Cipil

Pimpinan Pemerintah Cipil (PPC) merupakan sebuah badan pemerintahan peralihan yang dibentuk tidak lama setelah Jepang berkuasa. PPC di Banjarmasin dipimpin oleh tokoh-tokoh pemerintahan dan

masyarakat, seperti Pangeran Musa Ardikesuma, Mr.Roesbandi, dan Dokter Sosodoro Djatikusumo, yang diberi pangkat Ridzie, setingkat Residen, dilengkapi dengan sebuah Badan Penyiaran dan Propaganda di bawah pimpinan S.Hardjosoemartojo dan Hadharjah M. Di distrik-distrik terbentuk juga badan-badan seperti PPC dengan berbagai macam nama, seperti Komite Keselamatan Rakyat Indonesia, Pemeliharaan Keamanan Oemoem, Komite Penjaga Keamanan Oemoem, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan beragam susunan dan personalia. Ada pegawai-pegawai pemerintahan, ada perkumpulan-perkumpulan, dari bermacam-macam profesi, sebagian ada yang berambisi kedudukan di pemerintahan.

PPC Barabai, umpamanya, menyambut kunjungan W.Okamoto pimpinan pemerintahan militer, yang didampingi oleh Shogenji dan Jus'a, dengan unjuk rasa dari ribuan penduduk, yang menuntut supaya Kiai Raden tidak ditugaskan kembali di Barabai. Demikian pula dengan PPC Kandungan yang menolak kembalinya Kiai Merah Nadalsyah.

Badan-badan pemerintahan *peralihan* ini dengan sendirinya hapus setelah tersusun suatu Pemerintahan pendudukan Jepang lengkap dengan perangkatnya.

Plaatselijke Raad Barabai

Plaatselijke Raad Barabai atau Dewan Distrik Barabai dibentuk berdasarkan Staatsblad No.368 tahun 1921. Perbedaan mendasar antara Gementeraad Bandjermasin dengan mitranya di Barabai adalah kenyataan yang ada dalam lembaga terakhir bahwa wakil-wakilnya adalah orang-orang pribumi.

Plaatselijke Raad Barabai memiliki suasana demokratis karena jasa kepala distrik, R.J.W. Reys. Sistem demokratis tersebut terbentuk pada tahun 1921 dan diterapkan untuk mengontrol keuangan dan kekayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Plaatselijke Raad Barabai mengawasi dua belas pasar dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah sakit, perusahaan listrik dan telepon. Pada tahun 1920-an anggaran tahunan Plaatselijke Raad Barabai naik dua kali lipat, dari 140.000 gulden menjadi 280.000 gulden.

Politieke Inlichtingen Dienst atau PID

Dinas yang bertugas mencari laporan politik. Merupakan sejenis polisi yang terus menerus membuntuti tiap-tiap orang pergerakan serta aktivitas mereka. Dengan kesalahan-kesalahan kecil dan kadangkala dengan alasan yang dibuat-buat PID dapat menahan para aktivis pergerakan untuk diadili kemudian.

Politik Etis

Dikenal juga dengan sebutan Politik Balas Budi, sebagai sebuah pandangan baru di penghujung abad ke-19 bahwa pemerintah Belanda sebetulnya berutang budi kepada tanah jajahan.

Hutang budi diantaranya harus dibayar dengan memberikan pendidikan kepada bangsa bumiputera. Terkenal slogan trilogi dari Politik Etis, adalah “Irigasi, Edukasi dan Emigrasi” yang dimaksudkan untuk memajukan bumi putera.

Semboyan memajukan irigasi, edukasi dan emigrasi didukung oleh para penanam modal di Hindia Belanda. Karena perkebunan-perkebunan memerlukan irigasi yang intensif, tenaga kerja murah sehingga emigrasi ke luar Jawa sangat diharapkan.

Persekolahan dibuka namun pada dasarnya bukan bertujuan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi untuk kepentingan mencetak pegawai-pegawai rendahan yang berpendidikan Barat, yang diperlukan Pemerintah Hindia Belanda maupun kaum pengusaha partikelir.

Politieke Overheersing

Penjajahan politik.

Politik Garis Warna

Lihat penjelasan *Color Line*.

Proklamasi 17 Mei 1949

Bisa pula disebut sebagai Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Merupakan proklamasi yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1949 yang isinya berbunyi:

“ PROKLAMASI “

Merdeka :

Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari “ALRI” melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.

*Tetap Merdeka !
Kandangan, 17 Mei IV REP.
Atas nama rakyat Indonesia
di Kalimantan Selatan
Gubernur Tentara*

HASSAN BASRY.

Proklamasi dihasilkan setelah melalui serangkaian rapat atau musyawarah diantaranya di Durian Rabung Padang Batung, Ambutun dan terakhir di Telaga Langsung yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan Ambarawa tanggal 15-16 Mei 1949 dihadiri oleh H.

Aberanie Sulaiman, Gusti Aman, Budhigawis, P.Arya Maxim Le Miaty (P. Arya-Munir), Hasnan Basuki dan Romansi, dan dijaga ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hajar. Gusti Aman mengusulkan perlunya pembentukan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV melalui sebuah Proklamasi yang kemudian disetujui bersama. Penyusunan teks awalnya ditugaskan kepada Maxim Le Miaty kemudian disempurnakan bersama-sama. Agar isinya terlihat lebih keras, maka pada kalimat penutup oleh H.Aberanie Sulaiman ---- dalam versi lain oleh Gusti Aman yang disetujui oleh H. Aberanie Sulaiman ---- ditambahkan kata-kata: "Dan jika perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan". Pada malam hari tanggal 15 ke 16 Mei 1949 selesailah teks proklamasi itu dan ditik dengan huruf-huruf balok/kapital dengan menggunakan tinta merah oleh Romansi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1949, kira-kira pukul 10.00 pagi dibuatlah proses verbal mengenai musyawarah dan laporan rumusannya, ditandatangani oleh H.Aberanie Sulaiman, Budhigawis, Maxim Le Miaty dan Romansi. Pada hari itu pula Gusti Aman, Maxim dan Hasnan Basuki ditugaskan untuk membawa dokumen itu kepada Pimpinan Umum Hassan Basry di Niih. Tempat di mana Hassan Basry berada hanya diketahui oleh Hasnan Basuki. Tanggal 16 Mei 1949 kira-kira jam lima sore, rumah persembunyian Hassan Basry dapat ditemukan di Jambu Hulu, di rumah Guru Idar. Rombongan bermalam satu malam di sini, baru keesokan harinya tanggal 17 Mei 1949 mereka berangkat ke Hulu Banyu, melewati Lumpangi, Batantangan dan baru tiba pada sore harinya menjelang magrib di Niih. Selanjutnya rombongan bertemu dengan Pimpinan Umum Hassan Basry dan ajudannya Tobelo di Niih. Rombongan menyerahkan dokumen kepada Pimpinan Umum. Setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Umum, barulah Proklamasi 17 Mei IV Rep ditandatangani oleh Hassan Basry (tertulis pada naskah: Hasan Basri) sebagai Gubernur Tentara di Niih, dan kemudian dibacakan dalam suatu upacara di

Mandapai. Perbanyak konsep dilakukan kemudian, sebanyak 10 lembar, juga diketik dengan huruf warna merah, dan ditandatangani kemudian oleh Hasan Basri (Hassan Basry), juga dianggap sebagai lembaran yang asli. Pada naskah asli maupun perbanyakannya sebanyak 10 lembar itu, nama Gubernur Tentara ditulis “Hasan Basri” bukan “Hassan Basry”, dan bentuk tanda tangannya berbeda dengan bentuk tanda tangan yang dipakai di kemudian hari. Naskah konsep aslinya disimpan oleh Gusti Aman dan kemudian hilang ketika Gusti Aman (dibelakang harinya) ditahan oleh gerombolan Ibnu Hajar.

Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan protes sekaligus pembangkangan terhadap pembentukan daerah otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar yang terbentuk sebelumnya. Pemerintahan Gubernur Tentara yang dibentuk kemudian ternyata menjadikan daerah otonom Banjar dan Kalimantan Tenggara hanya berkuasa di atas kertas.

R

Raad van Justitie

Dewan Kehakiman pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Rabson

Komandan tentara sekutu asal Australia berpangkat kolonel yang tiba di pelabuhan Banjarmasin untuk melucuti tentara Jepang dengan kekuatan militer sebanyak 250 orang.

Regering; Almanak

Sebuah Almanak yang diterbitkan Pemerintah Hindia Belanda sejak pertengahan tahun 1850-an dan memuat secara lengkap data Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda.

Remadja

Sebuah majalah yang lahir di Banjarmasin pada tahun 1948 di bawah pimpinan Zainal dan Arthum Artha.

Republik, Majalah

Majalah ini secara sengaja melakukan penerbitan pertamanya bertepatan dengan hari ulang tahun yang pertama RI 17 Agustus 1946. Nomor perdana seolah-olah mengingatkan masyarakat akan Proklamasi Kemerdekaan yang telah berkumandang setahun yang lalu. Karena itu nomor itu memuat kembali secara lengkap teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 beserta dengan susunan kabinet RI yang pertama.

Majalah ini seringkali secara berani memuat tulisan-tulisan berupa artikel yang menyerang tokoh-tokoh yang memihak Belanda, seperti yang ditulis oleh Isah (nama samaran Zafry Zamzam) yang menyerang K.H. Abdurrahman Sidik tokoh partai Serikat Rakyat Islam (SRI) yang sebelumnya adalah seorang Republikan yakni sebagai pimpinan Partai Serikat Muslim Indonesia (SERMI), akan tetapi kemudian memihak Belanda. Sementara Pemimpin Redaksi Majalah Republik ini dikenal sebagai tokoh Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), sebuah partai Republikan yang menentang ide federalisme.

Majalah ini mampu bertahan terbit selama lebih dari dua tahun, meski isi pemberitaannya seringkali menentang federalisme dan pembentukan Negara Kalimantan. Baru kemudian di bulan Desember 1948 Zafry Zamzam ditangkap tentara Belanda, sebagai bagian dari Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948.

Penangkapan terhadap Zafry Zamzam berakibat Majalah Republik berakhir, karena tidak adanya lagi tenaga penggerak lainnya yang berani menanggung risiko.

Residentie Zuider Afdeling van Borneo

Keresidenan Afdeling Borneo Selatan. Dibentuk oleh pemerintah NICA berdasarkan Staatsblaad 1945 Nomor 64. Keresidenan dengan ibukotanya Banjarmasin ini meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang.

Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo

Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo atau Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo dengan ibukotanya Banjarmasin merupakan bagian wilayah kesatuan administratif pemerintahan Hindia Belanda berbentuk keresidenan di pulau Kalimantan. Luas wilayahnya meliputi Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur sekarang. Dibentuk tidak lama setelah Proklamasi Penghapusan Kerajaan Banjar 11 Juni 1860.

Wilayah keresidenan dibagi dalam beberapa afdeling, onderafdeling, district, dan onderdistrict. Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo sebagian besar dijalankan oleh pegawai-pegawai pamong praja bumi putera, hanya pimpinan puncak dari struktur pemerintahan seperti *resident*, *assistent resident* dan sebagian *controleur* dipegang oleh pegawai Belanda. Sedangkan jabatan selebihnya seperti *hoofd-kiai*, *kiai*, dan *assistent kiai* dipegang oleh pamongpraja bumi putera.

Di posisi puncak, terdapat jabatan-jabatan dengan nama *resident* yang mengepalai *residentie*, *assistent resident* untuk *afdeling*, *controleur* dan *adspirant controleur* untuk sebuah *onderafdeling*. dan onderdistrict. Pada tahun 1938, dua keresidenan di Pulau Kalimantan yakni *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo* dengan ibukotanya Banjarmasin dan *Residentie Westerafdeling van Borneo* dengan ibukotanya Pontianak disatukan menjadi provinsi Borneo (*Gewest Borneo*) dengan ibukotanya Banjarmasin.

Residen

Nama jabatan yang mengepalai wilayah pemerintahan Hindia Belanda setingkat keresidenan (*Residentie*).

Rheinische Missions Gesellschaft

Disingkat RMG. Sebuah misi zending dari Jerman yang menyebarkan agama Kristen di daerah Kapuas dan Barito sejak tahun 1835 sampai dengan 1921 saat tugasnya diserahkan kepada *Bazelsche Zending* atau *Basler Mission Gesellschaft*.

Rikugun

Tentara Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Batavia. Tentara ini tiba di Banjarmasin dari utara yakni Balikpapan – Muara Uya – Tanjung – Kelua – Pasar Arba – Haur Gading – Palimbangan – Amuntai – Barabai – Kandangan dengan jalan kaki, berkuda, dan bersepeda, dan ada yang berperahu. Mereka tiba di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 1942. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan menyebut Angkatan Darat atau Rikugun “Cap Bintang”

Rumah Bulat

Sebuah rumah bertipe Joglo atau Limasan di jalan Panglima Wangkang Marabahan sekarang. Merupakan

tempat aktivitas sejumlah organisasi pergerakan di Marabahan seperti Persatuan Pemuda Marabahan, *Particuliere Hollands Inlandse School (PHIS)* atau HIS Swasta, Sarekat Kalimantan (sebelum menjadi BINDO), dan Perguruan Taman Siswa.

Rusbandi, Mr

Mr. Rusbandi, sesuai gelar di depan namanya ia adalah seorang sarjana hukum. Ia anggota PRI dan Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Kalimantan Selatan hasil penetapan dari Presiden Soekarno. Akan tetapi, KNI Daerah yang diketuai Mr. Rusbandi tidak terbentuk. KNI yang dibentuk kemudian diketuai oleh A. Ruslan. Pada tanggal 7 September 1945 Mr. Rusbandi bersama Dokter Sosodoro Djatikusomo mengikuti A.A. Hamidhan yang diberangkatkan militer Jepang ke pulau Jawa

S

Sarekat Islam

Cabang Sarekat Islam (SI) berdiri Banjarmasin pada tahun 1912 dan mendapat pengakuan badan hukum

(*rechtspersoon*) dengan Besluit Gubernur Jenderal No.33 tanggal 30 September 1914.

Organisasi ini dibawa oleh H.M. Arip, seorang pedagang asal Marabahan yang berdagang pulang pergi antara Jawa dengan Kalimantan dan ketika berada di Surabaya turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya.

Atas saran ketua SI H.O.S Cokroaminoto aktivitas pergerakannya pindah ke Banjarmasin sebagai Komisaris SI untuk daerah Kalimantan Selatan. Bersama-sama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, maka berdirilah SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan.

Selain faktor kedekatan dalam aspek geografi dan ekonomi dengan Pulau Jawa, maka aspek agama juga sangat mendukung berkembangnya SI di Kalimantan Selatan.

Meski SI telah didirikan, tidak mudah bagi pengurusnya untuk merealisasikan program kerjanya. Karena pengakuan berbadan hukum (*rechtspersoon*) oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai SI lokal baru diberikan pada tanggal 30 september 1914 melalui Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 33 kepada SI cabang Banjarmasin.

Sejak itu, mulailah Sarekat Islam dapat bergerak lebih leluasa dalam mengambil langkah-langkah perjuangan di bidang perekonomian, terutama sosial, pendidikan dan keagamaan.

Tahun 1912 SI mendirikan Sarekat Dagang dan Sarekat Pelayaran namun tidak mampu melawan monopoli perdagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina.

Kegagalan SI di bidang ekonomi membawa pengaruh buruk terhadap kinerja organisasi, sehingga sampai tahun 1920 organisasi SI Banjarmasin beku tanpa kegiatan.

Kedatangan HOS Cokroaminoto ke Banjarmasin tahun 1919 erat hubungannya dengan kemunduran SI di daerah

ini, karena setelah itu, pengurus Centraal Sarekat Islam (CSI) mengirim seorang propagandis muda yang terpelajar, cakap, berani dan dinamis bernama Maraja Sayuthi Lubis. Dalam melaksanakan tugasnya di daerah ini, Sayuthi Lubis telah memahami bahwa satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan SI dari kehancuran adalah dengan melakukan reorganisasi diantaranya mengganti pengurus lama dengan pengurus baru.

Sebagai bagian dari reorganisasi, maka dibentuklah beberapa departemen seperti Departemen Perburuhan, Pertanian, Urusan Nelayan, dan sebagainya. SI juga menerbitkan surat kabar dengan nama “Keadaan Zaman” yang dicetak sendiri maupun “Borneo Bergerak” yang dicetak di Surabaya. Pada tahun 1923 SI mendirikan organisasi kewanitaan dengan nama “SI Dunia Isteri” dengan ketuanya Siti Masiah.

Untuk menghimpun potensi SI lokal dan organisasi-organisasi di luar SI lainnya maka pada tahun 1923 dan 1924 dilaksanakan *Nationaal Borneo Congres I dan II* yang diikuti oleh semua wakil-wakil SI Lokal yang ada di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo serta wakil-wakil Perserikatan Dayak, karena saat itu hanya ada dua golongan pergerakan yang dianggap mewakili rakyat Borneo. Meski pemimpin terkemuka SI dari Jawa yaitu H.O.S Cokroaminoto dan H. Agus Salim dilarang Belanda hadir, kongres ini berhasil menyusun mosi berisikan segala macam keberatan-keberatan dan permohonan rakyat Borneo kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang-bidang politik, ekonomi, pajak, rodi, pendidikan dan sebagainya.

Pemakaian kata “nasional” dalam *Nationaal Borneo Congres* merupakan cerminan dari upaya dari pemimpin-pemimpin SI di Kalimantan untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita sebagai satu bangsa, dan cita-cita itu juga dimanifestasikan melalui keikutsertaan cabang-cabang SI Islam di Kalimantan Selatan dalam *Nationaal Indische Congres (NIC)*.

Setelah reorganisasi, SI dapat bergerak lebih dinamis dalam berjuang di berbagai bidang, seperti melanjutkan kegiatan gotong royong dengan membentuk sinoman kematian, sinoman perkawinan, sinoman perayaan dan sebagainya, memberi bantuan kepada anggotanya yang ditimpa kemalangan dan membantu fakir miskin, merehabilitasi masjid-masjid dan langgar, mendirikan sekolah-sekolah Islam.

SI juga menuntut perlakuan yang sama sebagaimana diberikan Pemerintah Hindia Belanda terhadap golongan Eropa, Timur Asing.

Masuknya organisasi Sarekat Islam sedikit banyak telah memberikan perubahan kepada kehidupan keagamaan di Kalimantan Selatan, karena selain bergerak dalam kegiatan sosial, ekonomi, juga bergerak dalam pendidikan dan keagamaan, meski dalam hal pembaharuan keagamaan tidak semenonjol apa yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah.

Sarekat Kalimantan

Hasil dari perluasan tujuan dan ruang gerak dari organisasi Persatuan Pemuda Marabahan pada tahun 1930 dengan Ketua Pedoman Besarnya H.M. Arip.

Perubahan nama menjadi Sarekat Kalimantan antara lain dalam rangka memenuhi syarat untuk menjadi anggota Indonesia Muda yang dibentuk setelah Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.

Susunan pengurus Sarekat Kalimantan terdiri dari M. Ruslan (Ketua), A. Gani (Wakil Ketua), A. Sunhaji (Penulis I), Sabran (Penulis II), Tambi (Bendahara I), Matran (Bendahara II), dan H. Basirun, Sabran B, Muhiddin serta Imbran (Pembantu-pembantu) dengan Ketua Pedoman Besarnya adalah H.M. Arip.

Dalam anggaran dasarnya disebutkan, Sarekat Kalimantan bertujuan ke arah keekonomian dan kesosialan.

Sarekat Kalimantan melangsungkan kongresnya yang pertama pada tahun 1930 di Bakumpai (Marabahan).

Kongres ini dilaksanakan di Rumah Bulat selama tiga hari diantaranya diikuti oleh perwakilan Sarekat Kalimantan cabang Barabai, Amuntai, Kandangan dan Banjarmasin.

Berita kegiatan kongres dikirim Mawardi anggota Sarekat Kalimantan Marabahan ke surat kabar Bintang Borneo yang terbit di Banjarmasin.

Sejalan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan yang terjadi, Sarekat Kalimantan kemudian melakukan kongresnya yang kedua pada tahun 1931 berlangsung di markas Sarikat Kalimantan cabang Barabai.

Kongres II melahirkan suatu tekad bulat untuk menjadikan Sarekat Kalimantan berasaskan kebangsaan dengan merubah nama organisasi menjadi Barisan Indonesia (BINDO) dengan ketuanya H.M. Arip.

Sei Kei Rei

Sikap tubuh membungkuk ke arah Tokyo, sebagai tanda sikap hormat kepada Kaisar Jepang.

Seinendan

Organisasi yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang. Anggotanya pemuda yang berumur 15 sampai 29 tahun, dari tiap satu desa atau Buntai atau regu di pusatkan pada Fuku Gun atau Kecamatan dan Gun atau Kewedanaan. Tugasnya bersifat lokal.

Sekolah Muhammadiyah

Sekolah Muhammadiyah adalah jenis pendidikan yang dikelola organisasi Muhammadiyah. Diantaranya *Standaard School* di Alabio yang kemudian menjadi *Vervolgschool met den Qor'an*.

Pada tahun 1928 di Alabio berdiri sekolah lanjutan yaitu *Wostha School* dengan lama pendidikan tiga tahun dan merupakan sekolah guru dari perguruan Muhammadiyah. Mereka yang lulus ditetapkan menjadi guru-guru di sekolah-sekolah cabang atau ranting Muhammadiyah lainnya.

Karena sekolah Muhammadiyah tidak meninggalkan pengetahuan umum, maka sekolah ini mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda , berupa bantuan tenaga guru yang dibesluitkan oleh Muhammadiyah namun gajinya dibayar melalui dana subsidi pemerintah. Selain sekolah-sekolah tersebut terdapat pula sekolah lainnya, seperti SD Muhammadiyah Teluk Tiram (didirikan tahun 1929), SD Muhammadiyah Kelayan (1932), HIS Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1935 di jalan Kalimantan, dan HIS Muhammadiyah di jalan Pasar Lama.

Sekolah Kelas Dua

Merupakan sekolah bumiputera berpengantar bahasa melayu yang bertujuan mendidik calon-calon pegawai rendah.

Sekolah Kelas Dua yang pertama kali didirikan di Banjarmasin pada tahun 1906 dengan lama pendidikan lima tahun. Untuk jadi guru bantu, tamatan Sekolah Kelas Dua ini bisa memasuki *Normaal Cursus* guru bantu di Banjarmasin dan Kandangan yang dibuka antara 1911-1914 selama dua tahun mengajar.

Pada tahun 1934 sekolah Kelas Dua dipecah menjadi *Volksschool (sekolah desa)* tiga tahun dan setelah menyelesaikannya dapat melanjutkan ke *Vervolgschool* (sekolah sambungan) yang lamanya dua tahun.

Murid-murid lulusan Sekolah Kelas Dua ini meneruskan pelajarannya sejak 1910 ke Makassar memasuki *Kweekschool* untuk jadi guru, dan sesudah 1919 beralih ke *Normaalschool* Makassar karena Kweek-schoolnya tutup.

Sekolah Kelas Satu

Adalah sekolah bumiputera berpengantar bahasa melayu yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atas. Pada tahun 1913 Sekolah Kelas Satu statusnya dijadikan *Hollands Inlandse School*.

Sekolah Kaum Pergerakan

Merupakan sekolah yang dilihat dari segi motivasinya bertujuan agar anak didik memiliki rasa kebebasan dan tanggung jawab juga agar menjadi putera tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian tinggi bagi nusa dan bangsa.

Sekolah ini pada umumnya adalah sekolah swasta yang nasionalistis dan anti kolonial, didirikan oleh perkumpulan dan tokoh pergerakan yang mengutamakan jalan pendidikan dalam pergerakan mereka dan sebagian tidak bersubsidi.

Sebab itu banyak pula didirikan kursus bebas seperti kursus memberantas buta huruf, mengetik sampai dengan kursus politik. Sekolah dimaksud, di Kalimantan Selatan antara lain sekolah-sekolah Perguruan Taman Siswa dan sekolah Perguruan Rakyat Parindra.

Seri Budiman

Didirikan tahun 1901 di Banjarmasin atas inisiatif Amir Hasan Kiai Bondan. Anggota-anggotanya berasal dari golongan pangreh praja dan golongan pedagang, yaitu golongan masyarakat bumi putera yang menjadi elite kolonial atau telah mendapatkan pengaruh pendidikan secara Barat.

Organisasi ini cenderung sebagai perkumpulan sosial, namun organisasi ini dapat dipandang sebagai organisasi perintis di daerah ini yang membuka jalan bagi timbulnya organisasi modern di kemudian hari.

Organisasi Seri Budiman ini sendiri dibentuk dengan memakai cara dan metode modern seperti memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan tertentu yang hendak dicapai serta kelengkapan organisasi seperti kesekretariatan dan taman bacaan.

Perkumpulan Seri Budimanlah yang mula-mula mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan

berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan penonjolan watak sosialnya daripada watak politisnya, maka perkumpulan Seri Budiman bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya, mempropagandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian.

Perkumpulan ini tidak dapat hidup lama, karena pada tahun 1903 dibubarkan secara resmi yang disebabkan antara lain anggota-anggotanya yang penting dan yang menjadi motor pendorong organisasi pindah tempat tugas, berhubung dengan jabatannya maupun usaha perdagangannya

Serikat Dagang

Sebuah badan usaha yang didirikan bersama-sama dengan Serikat Pelayaran, dan dipelopori oleh Sarekat Islam pada tahun 1912. Kedua badan tersebut dimaksudkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat di bidang perdagangan dan pelayaran, meski kemudian kurang berkembang karena tidak mampu melawan monopoli perdagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina yang telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, di samping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi.

Serikat Dagang Borneo

Sebuah perusahaan eksport yang didirikan cabang Sarekat Islam Kalimantan Selatan pada tahun 1912. SDI didirikan selain dengan maksud mengangkat ekonomi rakyat juga untuk melawan monopoli perdagangan yang dikuasai orang-orang Cina yang kemudian gagal karena pedagang China telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, di samping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi.

Serikat Harta

Pertamakali didirikan oleh Muhammad Arif bertujuan mengumpulkan modal untuk mendirikan sebuah Bank Koperasi. Orang-orang penting yang menggerakkan tujuan ini, adalah A.Sangaji, Kyai Kedah dan Amir Hasan Kiai Bondan. Perkembangan selanjutnya, Serikat Harta kemudian menjadi Koperasi Serikat Harta.

Serikat Kerakyatan Indonesia atau SKI

Didirikan pada tanggal 19 Januari 1946 di bawah asuhan dr. D.S. Diapari, dr. Suranto, A.A. Rivai, A. Sinaga, R. Sa'ban, E.S. Handuran, Abdullah, dan lain-lain. Pembentukan SKI dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa berjuang dengan cara kekerasan dan dengan gerakan-gerakan gelap untuk pemberontakan, hanya akan mengakibatkan cengkeraman Belanda akan bertambah kokoh dan kuat. Oleh karena itu dibentuklah SKI sebagai siasat baru perjuangan parlementer atau perjuangan secara damai. Pada mulanya SKI adalah organisasi politik lokal yang berkembang menjadi partai yang berlingkup nasional dengan Banjarmasin dengan daerah pusatnya. Organisasi ini berkembang di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Partai ini dinyatakan sebagai suatu lanjutan dari PRI yang lalu. Tujuan Partai ini jelas mencantumkan hendak mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui perjuangan parlementer.

Serikat Muslimin Indonesia atau SERMI

Merupakan organisasi yang bercirikan keagamaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Republikan yang berasal dari golongan ulama agama Islam. Gagasan pembentukan SERMI lahir dari SKI, akan tetapi organisasi politik tersebut bukanlah onderbouw SKI. Dalam perjuangannya mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, SERMI berjuang bahu-membahu dengan SKI. Oleh karena itu, SERMI merupakan organisasi seperjuangan SKI yang

terpenting. Untuk kepentingan itu dibentuklah suatu Badan Koordinasi SKI–SERMI, yang berperan mencetuskan kesepakatan dalam menjalankan taktik perjuangan menentang ide federalisme Van Mook.

Serikat Pelayaran

Sebuah usaha angkutan kapal sungai yang dibentuk Sarekat Islam untuk memperlancar transportasi dan melawan dominasi China dalam hal angkutan antar sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan Selatan.

Serikat Rakyat

Sebuah organisasi onderbouw Partai Komunis Indonesia, yang anggotanya kebanyakan berasal dari Sarekat Islam lokal yang berhaluan komunis.

Serikat Rakyat Islam atau SRI

Merupakan partai Islam pro Belanda, karena memang didirikan pemerintah NICA pada tanggal 2 Juli 1947 di Banjarmasin dengan ketuanya K.H. Abdurrahman Sidik yang sebelumnya menjabat ketua SERMI. Partai SRI ini bersama pemerintah Belanda giat menganjurkan pembentukan Negara Kalimantan dengan terlebih dahulu membentuk Dewan Daerah Banjar. Tugas utama SRI adalah berusaha menarik simpati rakyat dan akan memilih wakil-wakil rakyat dari pihak mereka yang nantinya akan dikirim ke Konferensi Malino. Oleh masyarakat SRI dikenal dengan sebutan “partai gula”, sebab yang menjadi anggotanya akan mendapat bagian gula gratis.

Serikat Tani Lok Paikat

Didirikan tahun 1917 di Lok Paikat, menanam kopi, kelapa, jeruk dan karet.

Schakel School

Sekolah yang menghubungkan para murid sekolah desa (*Volksschool*) atau sambungannya (*Vervolgschool*) yang tak bisa melanjutkan ke HIS untuk mengecap pendidikan setingkat atau menyeberang ke lingkungan sekolah berbahasa Belanda. Lama pendidikan 4 tahun. Pertama kali didirikan di Barabai tahun 1933.

Shogenji

Seorang warga Jepang di Kalimantan Selatan yang berprofesi sebagai dokter gigi sekaligus bertugas sebagai mata-mata atau spionase bagi negerinya guna melancarkan rencana ekspansi Jepang di kemudian hari.

Sihan Gakko

Sekolah Guru setingkat SGB. Terdapat di Banjarmasin.

Sinar Hoeloe Soengai

Merupakan koran Republikan. Pada mulanya Sinar Hoeloe Soengai dibentuk atas keinginan Belanda sebagai pers pendukung kekuasaannya di Hulu Sungai. Sehubungan dengan hal itulah Belanda mencari tenaga-tenaga yang sebelumnya telah bekerja sebagai pengelola koran Borneo Simboen yang terbit di Kandangan, atau yang sebelumnya telah menangani sarana percetakan dimaksud, yakni Merah Danil Bangsawan dan Haspan Hadna. Keduanya mendapat tugas untuk menerbitkan surat kabar edisi setempat.

Penyerahan sarana percetakan untuk penerbitan media massa NICA, pada mulanya menimbulkan keengganan mereka. Hanya dikarenakan nasihat dan jaminan tokoh-tokoh pejuang setempat seperti Zafry Zamzam dan H.M Rusli, maka penyerahan itu diterima saja untuk kemudian diatur siasat dalam melaksanakannya untuk kepentingan perjuangan. Selanjutnya untuk penerbitan koran Sinar Hoeloe Soengai, Merah Danil Bangsawan disertai tugas sebagai pemimpin umum dan Haspan

Hadna sebagai pemimpin redaksi. Setelah lebih kurang 8 bulan, Haspan Hadna mengundurkan diri kemudian digantikan oleh Adonis Samat sebagai pemimpin redaksi. Haspan Hadna kemudian mendirikan media massa lain yakni surat kabar Kalimantan Berdjuang.

Semula kegiatan yang dilakukan dengan segala macam siasat ini tidak begitu saja dapat mengelabui pihak Belanda, namun karena adanya hubungan pengasuh Sinar Hoeloe Soengai yang akrab dengan tokoh-tokoh pejuang telah menimbulkan kecurigaan bagi penguasa setempat. Selanjutnya pengawasan atau sensor dilakukan dengan ketat terhadap pengasuh dan isi penerbitan Sinar Hoeloe oleh Asisten Residen maupun juga oleh Kiai Besar Merah Nadalsyah. Dalam bulan Desember 1948, Danil Bangsawan ditangkap oleh penguasa NICA dengan tuduhan telah membantu gerakan perjuangan. Dan sejak peristiwa penahanan itu, pemimpin percetakan Sinar Hoeloe Soengai selanjutnya dipegang oleh Abdul Hamid.

Pimpinan baru Sinar Hoeloe Soengai ternyata mengecewakan para pejuang, karena menolak permintaan pencetakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan perjuangan dengan alasan takut ketahuan Belanda. Masalah inilah yang menjadi sebab terbakarnya percetakan koran Sinar Hoeloe Soengai beberapa waktu kemudian. Bersamaan dengan hancurnya sarana percetakan tersebut, maka berakhir pula riwayat surat kabar Sinar Hoeloe Soengai yang terbit di daerah ini.

Sinar Borneo

Surat kabar di Banjarmasin, didirikan di tahun 1906 dan menggunakan bahasa Melayu.

Sinoman

Sebuah organisasi sosial kemasyarakatan di Kalimantan Selatan yang bersifat tradisional dan lokal, seperti sinoman kematian, perkawinan, dan sebagainya.

Soeara Kalimantan, Surat Kabar

Surat kabar yang terbit antara tahun 1930-1942 yang isi pemberitaannya seringkali melawan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam Soeara Kalimantan Saptoe 7 Februari 1942 – 19 Moeharram 1361 tertulis bahwa: Directeur-Hoofredacteur A.A. Hamidhan. Kantoor Redactie dan Administratie Pasar Baroeweg No. 110 – Telefoon - adres “swarakalimantan”. Penerbit: Drukk. en Uitgev. My. Kalimantan Bandjermasin. Surat kabar ini dijual eceran 6 sen. Harga langganan satu bulan f. 1, tiga bulan (kwartaal) f.3, Luar negeri setahun f 15. Surat kabar ini mempunyai agen di Batavia dan Surabaya.

Karena seringkali berlawanan dengan Pemerintah Hindia Belanda, maka menjelang kedatangan tentara Jepang di Banjarmasin, mesin cetak Soeara Kalimantan dihancurleburkan oleh AVC (*Algemene Vernielings Corps*) Belanda bersamaan dengan praktek pembumihangusan objek vital lainnya di Banjarmasin.

Soeara Kalimantan, Surat Kabar

Terbit pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 1945 dipimpin oleh Ardansyah dan Gusti A. Soegian Noor. Karena pada mulanya bersikap menyuarakan kepentingan NICA, maka surat kabar ini sempat diprotes oleh A.A. Hamidhan. Sebelumnya nama Soeara Kalimantan pernah dipakai sebagai nama surat kabar yang terbit pada tahun 1930-1942 yang dipimpin oleh A.A. Hamidhan yang isi pemberitaannya seringkali melawan Pemerintah Hindia Belanda.

Soeloeh

Sebuah majalah anak-anak yang dipimpin oleh H. Roehajah B. Majalah ini terbit sekali sebulan. Penerbitnya adalah “Taman Pengetahuan”, beralamat redaksi dan

administrasi di jalan Masjid 143 B Kandangan. Penerbitan yang pertama bertanggal 1 Januari 1948. Majalah ini berisi tulisan-tulisan ilmu pengetahuan serta memuat hasil-hasil karya anak-anak dalam bentuk prosa dan puisi. Percetakan yang menerbitkannya adalah Typ S.H.S. Kandangan. Harga langganan tiap bulan/pernomor tercantum sebesar f 0, 60. Berakhirnya penerbitan majalah Soeloeh ini bersamaan dengan berakhirnya Pedoman Poeteri, yakni ketika H. Roehajah B, selaku pimpinan media massa ini pindah domisili ke Amuntai pada tahun 1949.

Soesilo, Dokter

Seorang dokter ahli malaria, adik dari Dokter Soetomo salah seorang pendiri Boedi Oetomo. Pada masa pendudukan Jepang, ia berperan sebagai anggota komplotan B.J. Haga yang memimpin bagian spionase dan seringkali berhubungan dengan komplotan serupa di Borneo Barat yang dipimpin Pattiasina/Syarif-Muhammad-Alkadri. Ia bersama B.J. Haga, Ir. Makaliwy, C.M. Vischer, dan sejumlah anggota komplotan lainnya, akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati oleh militer Jepang pada 20 Desember 1943.

Societeit de Kapel

Tempat dansa atau hiburan orang Eropa, terutama para pengusaha dan penguasa pemerintah Hindia Belanda di perkotaan.

Son-Cho

Kepala Kampung/Pembakal.

SORAK atau Soeara Rakyat Kalimantan

Surat kabar yang diterbitkan oleh Partai Ekonomi Kalimantan dipimpin oleh Anang Acil Kesuma Wira Negara. Pada perkembangannya, SORAK dihentikan penerbitannya, dan sebagai gantinya terbit Soeara

Kalimantan dipimpin oleh A.A. Hamidhan, putera kandung A.A. Kesuma Wira Negara.

§rie

Suatu perkumpulan golongan muda terpelajar yang didirikan tahun 1923 oleh dr. Rusma, Gusti Citra, Kumala Ajaib, Amir Hasan Bondan, Mas Abi dan Abdullah. Organisasi ini memiliki Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) yang dibentuk bukan hanya memberikan sekedar untuk bersilaturahmi kepada anggota-anggotanya tetapi juga sebagai *study club* untuk bersama mempelajari politik dan warna tipu muslihat penjajahan Belanda. Mereka juga menerbitkan majalah mingguan *Malam Djoema'at* yang dipimpin oleh Amir Hasan dan Saleh Bal'ala, mereka mengadakan rubrik tulisan tersendiri bagi anggota-anggotanya. Haluan dan isi tulisan mereka mula-mula nya bertemakan keagamaan, lambat laun isinya mengarah kepada kebangsaan.

§tad;gementeraad

Nama Dewan Provinsi pada saat pembentukan Provinsi Borneo (*Gewest Borneo*) tahun 1938. Dengan dibentuknya Provinsi Borneo, maka terjadi pula pembaharuan dewan kota, dimana status *Gementeraad Bandjermasin* ditingkatkan menjadi *Stadsgementeraad* sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 17 Juni 1938 (*Staatsblad* 1938 Nomor 359).

§tad;wacht

Sebuah milisi pengawal kota yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi serangan Jepang.

§uku Banjar

Berasal dari nama nasion lama yakni Bangsa Banjar sebagai penduduk asli dari Kerajaan Banjarmasin. Setelah Kesultanan Banjar dihapuskan Belanda pada

tahun 1860, maka Bangsa Banjar turun status menjadi bangsa jajahan dan kemudian dikenal sebagai suku Banjar.

Suhardjo Hardjowardojo

Nama lengkapnya Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo. Merupakan pimpinan delegasi militer Republik Indonesia untuk menengahi perundingan gencatan senjata (*cease fire order*) antara pihak ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan pihak Belanda. Pertama kali tiba di lapangan Ulin pada tanggal 28 Agustus 1949 pukul 12.20 dengan menumpang pesawat KLM, dibantu oleh kapten Zainal Abidin (AD) dan Kapten Budiardjo (AURI), disertai seorang peninjau UNCI Kolonel Neals (Australia), bersama seorang juru bahasa.

Pada tanggal 2 September 1949 bertempat di Munggu Raya, Kandangan, Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo sebagai wakil delegasi Militer Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan delegasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, delegasi UNCI, dan delegasi Belanda. Selanjutnya sebagai realisasi perintah *cease fire* tanggal 2 September di Munggu Raya, berlangsung serangkaian perundingan antara pihak ALRI dengan Belanda yang ditengahi oleh UNCI dan disaksikan oleh Jenderal Mayor Suhardjo. Terakhir pada tanggal 16-17 Oktober 1949 berlangsung perundingan di Banjarmasin yang menghasilkan perhentian permusuhan antara ALRI Divisi IV dengan pihak Belanda di Kalimantan Selatan.

Syogyo Djitsumo Gakko

Sekolah Dagang di Banjarmasin sebagai pengganti Klein Handel School.

Syu

Wilayah pemerintah pada masa pendudukan Jepang yang serupa dengan Residentie pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Syuchosho-Cho

Kepala wilayah Minseibu Banjarmasin Syuchosho.

T

Tanaka Memorial

Sebuah memorandum yang dikeluarkan tahun 1927 oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Jepang Jenderal Guchi Tanaka. Memorandum yang disetujui Kaisar Jepang Tenno Heika itu berisi garis-garis besar rencana untuk menduduki atau menaklukkan bukan saja Asia, tetapi juga Eropah.

Taman Medan Antara

Merupakan sekolah pergerakan kebangsaan yang dikelola oleh Partai Indonesia Raya (Parindra). Oleh masyarakat, sekolah itu lebih dikenal dengan nama "Taman Medan Antara".

Tanah Negara

Disebut pula tanah G.G. (*Gouverneur Generaal*). Orang Banjar mengejanya "Tanah Hi Hi". Semua tanah yang tidak terbukti pemilikannya, ditetapkan sebagai Tanah Negara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi tanah-tanah milik orang bumiputera. Yang dimaksud "tanah negara" dalam *Domeinverklaring* terdiri dari dua golongan (1) Tanah Negara Bebas, yakni mutlak dikuasai oleh Negara; dan (2) Tanah Negara yang Tidak-Bebas, atau di atasnya masih dibebani suatu hak utama (*voor-recht*) yang lebih rendah dari hak-eigendom (orang Barat) atau hak-milik (agraris) bumiputera.

Terompet Rakyat, Harian

Sebuah harian republikan, terbit pertama kali tanggal 2 Desember 1946. Tempat kegiatan penerbitan surat kabar ini di rumah Hamran Ambrie, yang dikenal sebagai "Abang Betel", yakni penjaga "Pojok" yang sering melontarkan protes, sindiran, kritik dan lain-lainnya. Susunan redaksinya terdiri atas: Hamran Ambrie sebagai

pimpinan redaksi, Yusni Antemas sebagai wakil pimpinan redaksi, dan pembantu-pembantunya adalah Baderun Arsyad, Akhmad Samidie, Akhmad Yusran, Syamsul Anek, Akhmadan H.A, dan Halim Bertindak sebagai ilustrator tetap Bihman Villa dan pemimpin usaha H.Mohammad Idris.

Keberanian surat kabar ini dalam mengkritik kebobrokan politik penjajahan melalui editorialnya menyebabkan media massa ini beserta penyelenggaranya senantiasa mendapat sorotan dari penguasa setempat. Oleh Kiai Besar Afdeling Hulu Sungai Merah Nadalsyah yang datang dari Kandangan, Hamran Ambrie dan Yusni Antemas diminta untuk menghentikan kegiatannya sebagai wartawan Republiken, menghentikan penerbitan harian Terompet Rakyat dengan iming-iming hadiah namun ajakan Kiai Besar itu ditolak dengan tegas.

Dampak lanjut dari gagalnya bujukan tersebut adalah terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Yusni Antemas pada tanggal 6 Mei 1947 ketika sedang berpergian ke kota Tanjung. Situasi semakin memburuk menyebabkan pada tahun 1947 media cetak ini pindah ke Alabio dan terbit secara darurat dengan modal yang semakin berkurang dan sarana semakin terbatas. Pemerintah NICA akhirnya mengeluarkan larangan terbit (*Persbreidel*), dan kemudian menangkap Hamran Amrie dan Yusni Antemas sehingga tamatlah riwayat Terompet Rakyat.

Tentara Pelajar

Aktivitas Tentara Pelajar Kalimantan dikenal sejak 1948, diantaranya Kesatuan Tentara Pelajar ALRI Divisi IV yang bertugas antara lain ikut membantu melatih calon prajurit dari berbagai pangkalan yang dipusatkan di Paku Alam II/Alam Roh. Anggota-anggota tentara pelajar Kalimantan ini antara lain: Rawansyah Baderun, Nurman Ibas, Gusti Syamsir Alam, Riduan Iman, Yaffandi Seman.

Pelajar-pelajar yang tergabung dalam tentara pelajar Kalimantan ini berasal dari beberapa sekolah seperti : MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), Sekolah Menengah Tinggi (SMT), *Kweekschod*, OVVO (*Opleidingschool voor Volksonderwijzers*) dan VHO (*Voorbereidend Hoger Onderwijs*), SMIP, dan beberapa madrasah dari Banjarmasin, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai, Tanjung dan Amuntai.

Tokubetsu Toku Tai

Heiho pilihan dan prajurit Kaigun yang dibentuk Jepang pada awal 1945 untuk berperang menghadapi pendaratan Sekutu. Markas Tokubetsu Toku Tai ini berada di Bati-bati di Kabupaten Tanah Laut sekarang.

Tuan Guru

Sebutan terhadap pemuka agama atau ulama yang diakui kedalaman ilmu keislamannya di Kalimantan Selatan. Sebelum masuknya pengaruh Barat, para Tuan Guru umumnya memberikan “pengajian” yakni sistem pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilaksanakan di tempat tinggal Tuan Guru, tetapi kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar. Melalui sekolah-sekolah agama, para Tuan Guru sangat berperan dalam mengembangkan anak didik atau santrinya, bukan hanya dalam bentuk pendidikan agama namun juga dalam bentuk penanaman kesadaran berbangsa.

U

Ulama

Kata “ulama” berasal dari bahasa Arab yang sering diidentikkan sebagai dengan Islam. Meski pada kenyataannya kata “ulama” juga dipakai untuk menyebut para elite agama non Islam, namun seringkali istilah untuk menyebut elite agama non Islam adalah “tokoh agama” bukan “ulama”.

Dalam komunitas Islam, ulama merupakan sebutan kepada seseorang atau kelompok yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan agama yang mumpuni yang melebihi guru-guru agama Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan, seorang ulama disebut sebagai Tuan Guru atau Guru Agama.

Unitarisme

Merupakan ajaran (faham, kecenderungan) yang menginginkan bentuk negara kesatuan. Pada masa revolusi fisik di Kalimantan Selatan, faham unitarisme dipresentasikan oleh dua kelompok pejuang. Kelompok pertama, adalah berjuang dengan senjata dan bergerilya, sifatnya non kooperatif, yakni ALRI Divisi IV dan organisasi kelaskaran lainnya yang pro Republik. Kelompok kedua, adalah kelompok yang berjuang dengan taktis politik, sifatnya kooperatif, yakni tokoh-tokoh politik, dari beberapa perkumpulan politik, seperti SKI, SERMI dan lain-lain. Antara kedua kelompok itu saling bekerja sama, sehingga Belanda tidak bisa leluasa mempergunakan Dewan Banjar untuk kepentingan-kepentingan Belanda.

Usaha Dagang Belanda,

kelompok yang mengusahakan terbitnya Borneo Advertentie Blad.

Usaha Dagang Tienghoa,

Perkumpulan yang menerbitkan surat kabar
Pengharapan untuk usaha iklan pedagang.



Van Assenderp, Mayor

Komandan tentara NICA sebanyak kurang lebih 100 orang yang kedatangannya di Banjarmasin membonceng tentara Australia.

Van der Plas

Nama lengkapnya Charles Olke van Der Plas (Ch. O. Van der Plas). Seorang orientalis yang fasih berbahasa Arab dan menguasai Tafsir Al-Qur'an. Pernah menjabat Gubernur Jawa Timur (1 Juli 1936-30 Juni 1941). Tahun 1948 diutus pemerintah NICA ke Kalimantan Selatan untuk memecah umat Islam dan terutama sekali untuk merangkul tokoh-tokoh agama Islam agar berpihak kepada ide federalisme pemerintah. Di antara beberapa ulama yang dijumpai Van Der Plas adalah Tuan Guru H. Muhammad Jakfar di kampung Pakan Dalam Negara. Ulama ini dibujuk agar bersedia membantu Belanda dengan menawarkan jabatan Qadi Besar, serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti mendapatkan mobil dan kemudahan lainnya. Namun bujukan dimaksud ditolak oleh ulama tersebut. Tokoh ulama lain yang di bujuk seperti itu adalah Tuan Guru H. Muhammmad Arsyad, tokoh pimpinan SERMI di Kandangan. Bujukan tersebut juga ia tolak.

Van der Meulen

Pejabat Walikota Banjarmasin, yang dipancung lehernya oleh tentara Jepang di atas reruntuhan Jembatan Coen tanggal 13 Februari 1942. Selain Van der Meulen, ikut juga dipancung pemimpin Redaksi Borneo Post Smits, dan seorang Cina.

Voeding, Middelen Fonds (VMF)

Badan untuk urusan bahan makanan

Volkano Islam

Merupakan stigma yang ditujukan terhadap pergerakan Islam yang menurut kalangan penguasa Belanda seolah seperti volkano atau gunung berapi yang semakin aktif dan suatu saat meletus menghancurkan kekuasaan Belanda. Untuk menghadapinya, beberapa kalangan Belanda mengembangkan pendidikan gaya Barat, dengan tujuan bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah kolonial, tetapi juga seperti dikatakan oleh van der Puijs – untuk membentengi Belanda dari “volkano Islam”.

Volksraad

Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda disahkan untuk pertama kali pada tahun 1916. Anggota *Volksraad* berasal dari orang-orang pilihan dari daerah kekuasaan Belanda di Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Mengadakan sidang pertama pada tanggal 8 Mei 1918. Sejak tahun 1927 kepada Dewan Rakyat Hindia Belanda diberikan pula kekuasaan legislatif.

Sampai Mei 1927 anggota dewan ini hanya pria, kemudian ---setelah sembilan tahun--- kaum perempuan memperoleh emansipasinya dengan juga diberikan hak untuk duduk dalam dewan ini. Empat puluh delapan anggotanya ---termasuk seorang Ketua-- - separo ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dan separo lainnya dipilih oleh dewan-dewan daerah di haminta/kota (*gemente*).

Para anggotanya yang terdiri dari dua puluh orang bumiputera dan dua puluh delapan orang Eropa dan Timur Asing berasal dari berbagai profesi ini, seperti pejabat pemerintah, tentara, wartawan, penguasa, guru, pemilik tanah, mewakili sejumlah partai, akan tetapi ada pula yang non-partai.

Anggota Dewan Rakyat ini mempunyai hak-hak sebagai berikut : (1) Hak memberikan nasihat; (2) Hak petisi, mengajukan masalah-masalah kepada Raja/Ratu,

Parlemen, dan Gubernur Jenderal; (3) Hak bebas mengeluarkan pendapat, sehingga tidak dapat dituntut secara hukum atas apa yang dikemukakannya dalam sidang-sidang dewan, atau tertulis kepada dewan; (4) Hak interpelasi atau hak bertanya (sejak 1 Januari 1926). Dewan ini tidak mempunyai hak angket atau penyelidikan. Dari hak-hak yang dipunyai dan tidak dipunyai dewan tersebut di atas, maka Dewan Rakyat atau Volksraad ini hanya merupakan suatu lembaga penasihat, belum berfungsi sebagai suatu parlemen.

Vrijwillinggers Oefen Corps

VOC (*Vrijwillinggers Oefen Corp*) atau Korps Barisan Sukarela. Sebuah milisi yang anggotanya para sukarelawan yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi Jepang.

W

Wijkmeester

Kepala Kampung Belanda (Wijk = kampung).

Wilde Scholen Ordonnantie

Wilde Schoolen Ordonnantie atau Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932 bertujuan untuk mengendalikan perasaan kebangsaan di kalangan pelajar. Berdasarkan ordonansi itu, sekolah partikelir dan guru-gurunya harus minta izin dahulu kepada pemerintah, dan isi pelajarannya tidak boleh melanggar peraturan pemerintah.

Wilayah pemerintahan Hindia Belanda

Terdiri dari Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa dibagi dalam Provinsi, Keresidenan, dan Keregenan. Sedangkan daerah luar Jawa terdiri dari Afdeling, Onderafdeling, District, dan Onderdistrict.

Z

Zafry Zamzam

Tokoh wartawan dan politik kelahiran Simpur, Kandangan tahun 1917. Pendidikan terakhir adalah Kweek School Islam di Ponorogo. Dan pernah menjadi guru di Kalsel, Kaltim, dan Kalteng.

Kegiatan dalam organisasi dan gerakan politik yang menonjol adalah dalam Musyawaratutthalibin (1931), Partai Islam Indonesia (1936), dan Serikat Kerakyatan Indonesia (1946). Tahun 1948, ia terpilih menjadi anggota Dewan Banjar dan aktif menggerakkan dewan tersebut untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1946 menerbitkan majalah Republik di Kandangan. Zafry Zamzam dengan nama samaran Isah seringkali menulis artikel yang menyerang tokoh-tokoh yang memihak Belanda, seperti terhadap K.H. Abdurrahman Sidik tokoh partai Serikat Rakyat Islam (SRI) yang memihak Belanda.

Sesudah Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 Zafry Zamzam ditangkap tentara Belanda. Penangkapan terhadap Zafry Zamzam berakibat Majalah Republik berakhir, karena tidak adanya lagi tenaga penggerak lainnya yang berani menanggung risiko.

Setelah bebas dari tahanan Belanda, di awal 1949 ia bersama Yusni Antemas bergabung ke dalam surat kabar Kalimantan Berdjung di Banjarmasin. Ia kemudian diserahi jabatan sebagai Ketua/Pemimpin Redaksi yang ditinggalkan Adonis Samat yang bergabung dalam barisan perjuangan bersenjata, mendampingi Haspan Hadna (Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan), dan Abdoel Djabar (Kepala Tata Usaha).

Zelfbestuur

Daerah berpemerintahan sendiri (Daerah Otonomi). Zelfbestuur di Kalimantan lahir sebagai upaya dari Van Mook untuk mewujudkan federalisme.

Zelfbesturende Landschappen

Daerah dengan pemerintahan sendiri atau masyarakat adat yang hidup dengan tatacaranya sendiri.

Zuid Borneo

Borneo Selatan, yakni sebuah keresidenan pada masa pemerintahan NICA yang wilayahnya meliputi daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Nama resminya adalah Residentie Zuider Afdeling van Borneo ibukotanya Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Staatsblaad 1945 Nomor 64.

Zuider en Oosterafdeling van Borneo

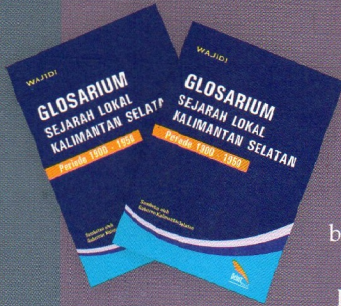
Afdeling Selatan dan Timur Borneo. Merupakan nama wilayah keresidenan di pulau Borneo (Kalimantan) yakni Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo, beribukota di Banjarmasin, di samping Residentie Westerafdeling van Borneo yang beribukota di Pontianak.

Wilayah Afdeling Selatan dan Timur Borneo, kira-kira sama besarnya dengan gabungan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antemas, Anggraini. 1988. *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan*. Amuntai: Mega Sapura.
- Artha, Artum. 1975. *Album Pembangunan Kalimantan*. Banjarmasin: Percetakan RAPI.
- Basry, Hassan. 2003. *Kisah Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949*, Jilid I dan II. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua.
- Gafuri, Ahmad. 1984. *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*. Kandangan: Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Ideham, M. Suriansyah dkk (ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kementerian Penerangan RI. 1953. *Republik Indonesia: Kalimantan*. Banjarmasin: Djawatan Penerangan Provinsi Kalimantan.
- Lapian, A.B. dan P.J. Drooglever. 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nawawi, Ramli dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.
- Nawawi, Ramli ed. 1992. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan.

- Pemda Tk.I Kalsel. 1990. *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*. Banjarmasin.
- Saleh, M. Idwar. 1981/1982. *Banjarmasih*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan.
- Saleh, M. Idwar dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Saleh, M. Idwar dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Wajidi. 2007. *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Wajidi. 2007. *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Van Dijk, C. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafitipers.



Glosarium sejarah lokal sebagaimana terdapat dalam buku ini memuat berbagai pemaknaan yang dianggap sesuai untuk menjelaskan sebuah kata atau istilah yang berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Periode Pergerakan Kebangsaan (Perintis Kemerdekaan), Periode Pendudukan Jepang, dan Periode Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik), sampai dengan Pengakuan Kedaulatan di tahun 1950.

Meski tidak dimaksudkan sebagai sebuah ensiklopedi, kamus, dan lain-lain yang serupa, isi buku ini layak untuk dipelajari oleh peminat sejarah atau siapa saja yang berkeinginan memperoleh pengetahuan tentang Sejarah Lokal Kalimantan Selatan dengan cara lebih mudah.



Drs. Wajidi, dilahirkan di Pagat Hulu Sungai Tengah, 15 Januari 1969. Ia alumni PSP Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin tahun 1992. Sejak 1993 telah aktif menulis tentang kesejarahan, permuseuman dan kepurbakalaan yang tiada lain adalah refleksi dari pekerjaannya sebagai staf bidang Muskala Kanwil Depdikbud Provinsi Kalsel (1993-2000). Kini ia adalah peneliti bidang ilmu sejarah dan arkeologi lainnya pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dan telah menerbitkan buku: *Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Sebuah Catatan Ringan* (2008), *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950* (2008), *Artum Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan* (2008), *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik* (2007), *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942* (2007), dan anggota tim peneliti/editor buku *Urang Banjar dan Kebudayaan* (2005), dan buku *Sejarah Banjar* (2003).

ISBN 978-979-96468-37-X